

ALIP SUGIANTO

SEJARAH
Adipati dan Bupati
Ponorogo
(1496 - 2016)

Penerbit : Unmuh Ponorogo Press

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113

KETENTUAN PIDANA SANGSI PELANGGARAN

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3. Setiap Orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

SEJARAH
Adipati dan Bupati
Ponorego
(1496 - 2016)



**Sejarah Adipati dan Bupati Ponorogo
(1694-2016)**

Penulis :
Alip Sugianto

Hak Cipta © 2020, Penulis
Hak Terbit © 2020, Penerbit : Unmuh Ponorogo Press
Jalan Budi Utomo Nomor 10 Ponorogo-63471
Telp. (0352) 481124, 487662
Faks. (0352) 461796
E-mail : unmuhpess@umpo.ac.id

Desain Sampul: Tim Unmuh Ponorogo Press
Sumber Gambar Sampul : <https://bit.ly/2TLdWAG>

ISBN : 978-602-0791-71-5
Cetakan Pertama, Mei 2020

xii + 104 halaman, 15,5 x 23 cm

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotocopi, atau memperbanyak dalam bentuk apa pun, baik sebagian maupun keseluruhan isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit Unmuh Ponorogo Press.



BUPATI PONOROGO

SAMBUTAN BUPATI PONOROGO

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan ini Saya menyambut dengan gembira dan mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku yang berjudul "SEJARAH ADIPATI DAN BUPATI PONOROGO (1496-2016)". Buku ini merupakan buku sejarah yang merangkum perjalanan Pemerintahan dan Kepemimpinan semenjak berdirinya Pemerintahan Ponorogo pada tanggal 11 Agustus 1496, didalam buku ini juga ditulis kondisi sosial dan politik pada era tahun 1496 -2016 Masehi.

Kiranya sangat penting buku ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan literasi didalam penulisan karya tulis, serta memudahkan masyarakat di dalam memahami dan mengenal sejarah Kabupaten Ponorogo. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga sedang menyelesaikan penyusunan Buku Sejarah Ponorogo yaitu penulisan sejarah lokal Panaraga yang lebih berbasis pada sumber-sumber primer dengan pendekatan empiris – akademis mulai Prasejarah, Era Klasik, Masa Mataram, Masa Kolonialisme, Revolusi dan Nasionalisme hingga Orde baru.

Oleh karena itu saya atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penulis yang telah berupaya menggali informasi dan sejarah Kabupaten Ponorogo, sehingga buku ini bisa bermanfaat menjadi buku pengetahuan sejarah bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo yang Lebih maju, Berbudaya dan Religius.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PONOROGO, 24 Pebruari 2020





KETUA DPRD PONOROGO

SAMBUTAN KETUA DPRD PONOROGO

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya atas nama pribadi maupun Institusi menyambut gembira atas terbitnya buku sejarah Adipati dan Bupati Ponorogo (1496-2016). Kehadiran buku ini sangat penting bagi semua khalayak, khususnya masyarakat Ponorogo sebagai salah satu sumber data, informasi dan kasanah intelektual. Budaya literasi semacam ini perlu dimasifkan sebagai upaya membangun suatu peradapan yang berkemajuan.

Kemajuan masyarakat tentu tidak bisa dilepaskan dengan sejarah masa lalu sebagai upaya introspeksi dan batu pijakan pengembangan kemajuan selanjutnya. Dalam buku ini menarik, pasalnya membahas mengenai profile Adipati dan Bupati hingga kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan masyarakat Ponorogo.

Ikhtiar yang dilakukan oleh penulis ini patut diapresiasi untuk mendorong dan mengarahkan makna dibalik peristiwa sejarah dan dinamika yang ada di Ponorogo, tidak hanya sebatas pada hafalan peristiwa atau kejadian yang berlalu, akan tetapi lebih dari itu yakni mencermati apa makna peristiwa atau hikmah yang terjadi bagi pembaca, dan khususnya bagi masyarakat Ponorogo.

Saya menyambut baik atas kehadiran buku ini sebagai salah satu upaya mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan religius, salah satunya unsur penting itu adalah melalui buku sejarah ini. Selamat membaca, dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Ponorogo, 4 Pebruari 2020

KETUA DPRD PONOROGO

SUNARTO, S.Pd.

KATA PENGANTAR PENULIS

SEBUAH KATA PENGANTAR SEJARAH ADIPATI -BUPATI PONOROGO

Wal Tandzur Nafsun Maa Qoddamat Lighad: Perhatikanlah Sejarahmu Untuk Hari Esok (Q.S. 59:18).

Ponorogo merupakan sebuah wilayah yang memiliki nilai historis tinggi. Sebagai daerah yang tergolong kota tua berdiri pada tahun 1496, Ponorogo banyak mewariskan berbagai peninggalan budaya adi luhur. Peninggalan-peninggalan tersebut banyak yang belum tergali maupun terekpos secara luas sehingga banyak yang belum dimengerti mengenai berbagai kekayaan tersebut. Baik itu berupa, kesenian, arkeologis, maupun sejarah masa lalu. Sejarah tersebut tentu tidak terlepas dari perjuangan para ulama, tokoh masyarakat maupun rakyat Ponorogo dalam membangun Ponorogo.

Salah satu yang berjasa dalam membangun pemerintahan adalah peran dari Adipati atau Bupati sebagai orang yang berkuasa mengendalikan pemerintah. Oleh karena itu, penulis ingin menggali dan meneropong masa lalu dari sudut pandang sejarah perjuangan, pergolakan maupun kejadian-kejadian penting yang terjadi pada masa Adipati dan Bupati Ponorogo pada waktu itu. Sehingga dapat diketahui khalayak secara luas sehingga kita semua dapat belajar dan mengambil aura positif yang diharapkan dapat memicu dan memacu semangat bagi generasi yang akan datang.

Secara resmi pemerintahan di Ponorogo dimulai pada 11 Agustus 1496 yang merujuk pada buku PKDT II yang diterbitkan pada tahun 1996. Pemerintahan tersebut, terletak di Kota lama yang dipimpin oleh Adipati Pertama Raden Djoko Pitoeroen sampai dengan 13 pergantian kepemimpinan yang diwariskan kepada anak-cucu beliau sampai tahun 1837 yang dipimpin Adipati terakhir Raden Suradiningrat II sebelum Ponorogo Kota Lama berpindah di Mangkujayan atau Kota sekarang ini.

Adapun Ponorogo kota sekarang ini sudah mengalami pergantian sebanyak 26 bupati yang telah penulis sampaikan secara

berkesinambungan di dalam media ini. Maka setelah edisi Bupati Ponorogo selesai dikupas, akan berusaha kami sampaikan mengenai Adipati-Adipati Ponorogo sejak tahun 1496 sampai dengan tahun 1837 yang mengalami pergantian sebanyak 13 Adipati yang memimpin Ponorogo Kota Lama. Adapun perbedaan dalam pemerintahan Kota Lama dan Kota sekarang, kalau kota lama yang memimpin masih garis keturunan anak-cucu dari Adipati Raden Djoko Pitoeroen sedangkan pemerintahan sekarang ada yang dipilih atau “direkomendasikan” pihak belanda hingga sampai pemilihan umum sekarang ini.

Untuk mengungkap perjalanan Adipati dan Bupati Ponorogo tersebut penulis melakukan dengan berbagai pendekatan seperti heuristik dimana penulis berusaha untuk menemukan sumber-sumber yang diperlukan dan kemudian melakukan kritik sumber agar sumber yang dijadikan bahan acuan dapat dipertanggungjawabkan data dan keakuratannya. Selain itu penulis juga melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap atas fakta yang harus dilandasi sikap objektif, dan walaupun ada yang bersifat subjektif maka berusaha dengan rasional pemikiran dan bukan atas dasar emosional yang diharapkan dapat mendekati kebenaran.

Adapun kegiatan terakhir dari penulisan ini adalah adalah merangkai fakta berikut maknanya baik secara kronologis atau diakronis dan sistematis. Sehingga tulisan sejarah Adipati dan Bupati Ponorogo menghasilkan karya sejarah ilmiah yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang ilmu-ilmu sosial yang relevan (Sosiologi, antropologi, ekonomi, politik). Semoga tulisan-tulisan mengenai sejarah Adipati dan Bupati Ponorogo dari periode- ke periode ini dapan memberi gambaran dan ekplanasi kepada masyarakat Ponorogo dengan baik. Penulis menyadari dari berbagai tulisan-tulisan yang di muat dalam media ini masih banyak kekurangan di sana sini. Harapan penulis, tulisan ini memberi sumbangsing pemikiran dan bermanfaat bagi semua khalayak luas baik itu peneliti, pemerhati, maupun penikmat sejarah, khususnya sejarah Ponorogo.

Alip Sugianto
Penikmat Sejarah

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| PENGANTAR BUPATI PONOROGO | v |
| PENGANTAR KETUA DPRD PONOROGO | vi |
| KATA PENGANTAR PENULIS | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| BAB I | 1 |
| ADIPATI PONOROGO | 1 |
| KOTA LAMA..... | 1 |
| 1.1 RADEN DJOKO PITOEROEN PENDIRI KADIPATEN PONOROGO..... | 2 |
| 1.2 ADIPATI PONOROGO KE II SAYYID KULKUM WOTGALEH | 5 |
| 1.3 PANGERAN DODOL ADIPATI PONOROGO CUCU RADEN DJOKO PITOROEN | 7 |
| 1.4 PANGERAN SEDAKARYA ADIPATI PONOROGO YANG MEMBANGUN MAKAM RADEN DJOKO PITOEROEN | 9 |
| 1.5 PANGERAN ADIPATI SEPUH YANG MEMBANGUN MASJID AGUNG KAUMAN KOTA LAMA | 11 |
| 1.6 PANGERAN RANGGAWICITRA I MENANTU RADEN DJOKO TINGKIR..... | 13 |
| 1.7 PANGERAN RANGGAWICITRA II MEDIATOR RAJA MATARAM..... | 15 |
| 1.8 RADEN MERTAWANGSA I BERSELISIH DENGAN AMANGKURAT I | 17 |
| 1.9 RADEN MERTAWANGSA II MELAWAN RAJA KARTASURA AMANGKURAT III | 19 |
| 1.10 RADEN SURABRATA IKUT MENGAWAL PAKU BUWANA II KE KARTASURA | 22 |
| 1.11 RADEN SURADININGRAT SEDA DUMUNG PERANG MELAWAN PANGERAN SAMBER NYAWA | 24 |

| | | |
|--|---|----|
| 1.12 | RADEN SURALAYA KESATRIA DI TENGAH KONFLIK KADIPATEN | 27 |
| 1.13 | RADEN SURADININGRAT II ADIPATI TERAKHIR KOTA LAMA | 29 |
| BAB II..... | | 33 |
| BUPATI PONOROGO KOTA BARU/TENGAH | | 33 |
| 2.1 | BUPATI MERTAHAINEGARA SANG FOUNDING FATHER KOOOTA BARU | 34 |
| 2.2 | BUPATI SASRAKUSUMA SEBAGAI PATIH PERTAMA KOTA TENGAH..... | 36 |
| 2.3 | BUPATI TJAKRANEGARA I BUPATI TERLAMA..... | 38 |
| 2.4 | BUPATI TJAKRANEGARA II SANG PENDIDIK | 40 |
| 2.5 | BUPATI SASRAPRAWIRA TERSINGKAT MEMIMPIN PONOROGO..... | 42 |
| 2.6 | BUPATI TJAKRAHADINEGARA SANG SENIMAN ... | 44 |
| 2.7 | BUPATI KUSUMAYUDA SANG MUSISI | 46 |
| 2.8 | BUPATI ARIA SAM ERA KONDANGNYA BATIK PONOROGO..... | 48 |
| 2.9 | RADEN SUTIKNO BUPATI PONOROGO ERA PENJAJAHAN JEPANG..... | 50 |
| 2.10 | M.R SOESANTO TIRTAPRADJA BUPATI PONOROGO SANG AHLI HUKUM | 53 |
| 2.11 | BUPATI PONOROGO TJAKRADIPRADJA SANG PELINDUNG | 55 |
| 2.12 | RADEN PRAJITNA, MEMINDAHKAN KABUPATEN KE MLARAK..... | 58 |
| 2.13 | BUPATI PONOROGO MUHAMMAD MANGUNDIPRADJA : SANG PAHLAWAN NOVEMBER 1945 | 60 |
| 2.14 | BUPATI PONOROGO RADEN MAHMOED ERA BANGKITNYA KESENIAN REYOG | 63 |

| | | |
|------|---|-----|
| 2.15 | BUPATI PONOROGO R. M. HARIYOGI PUTRA MAHKOTA KEMBALI BERTAHTA | 66 |
| 2.16 | BUPATI PONOROGO RADEN DASOEKI PRAWIRAWASITA SANG PEMERSATU | 69 |
| 2.17 | BUPATI PONOROGO RADEN SOEYASA SOSOK YANG SEDERHANA | 72 |
| 2.18 | BUPATI PONOROGO RADEN SUDONA SUKIRDJA PENDIRI STADION GBK (GELORA BATORO KATONG)..... | 75 |
| 2.19 | BUPATI PONOROGO SOEMADI SOSOK MIKUL DHUWUR MENDEM JERO | 78 |
| 2.20 | BUPATI PONOROGO SOEBARKAH PUTRA HADIWIRYA PENCETUS GREBEG SUR..... | 81 |
| 2.21 | BUPATI PONOROGO GATOT SUMANI SOSOK PEDULI LITERASI | 84 |
| 2.22 | BUPATI PONOROGO MARKOEM SINGADIMEDJA SANG FENOMENAL | 86 |
| 2.23 | BUPATI PONOROGO MURYANTO PECINTA MUSIK CAMPURSARI | 89 |
| 2.24 | BUPATI PONOROGO MUHADI SUYONO KAYA PRESTASI BERGENGSI | 92 |
| 2.25 | BUPATI PONOROGO AMIN SOSOK YANG RAMAH | 95 |
| 2.26 | BUPATI PONOROGO MASKUR SANG AHLI PETERNAKAN | 98 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 101 |
| | GLOSARIUM | 103 |
| | TENTANG PENULIS..... | 104 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar: 2.1 RMT Tjakranegara I..... | 38 |
| Gambar: 2.2 Soesanto Tirtapradja..... | 53 |
| Gambar: 2.3 Tjakradipraja..... | 55 |
| Gambar: 2.4 Prajitna..... | 58 |
| Gambar: 2.5 Mangundipradja | 60 |
| Gambar: 2.6 Mahmoed | 63 |
| Gambar: 2.7 Haryogi..... | 66 |
| Gambar: 2.8 Dasoeki..... | 69 |
| Gambar: 2.9 Soeyoso | 72 |
| Gambar: 2.10 Sudono | 75 |
| Gambar: 2.11 Sumadi | 78 |
| Gambar: 2.12 Soebarkah | 81 |
| Gambar: 2.13 Gatot Sumani | 84 |
| Gambar: 2.14 Markum Singodimedjo | 86 |
| Gambar: 2.15 Muryanto..... | 89 |
| Gambar: 2.16 Muhadi Suyono..... | 92 |
| Gambar: 2.17 Amin | 95 |
| Gambar: 2.18 Ir. H. Maskur, M.M | 98 |

BAB I
ADIPATI PONOROGO
KOTA LAMA

1.1 RADEN DJOKO PITOEROEN PENDIRI KADIPATEN PONOROGO

Raden Djoko Pitoeroen merupakan putra dari Raja Majapahit Pangeran Prabu Brawijaya V dengan Istri yang berasal dari Ponorogo sedangkan sumber lain mengatakan bahwa Istrinya berasal dari putri Campa. Raden Djoko Pitoeroen nama kecilnya adalah Lembu Kanigoro setelah dewasa berganti nama menjadi Batoro Katong, ia merupakan adik dari Lembu Kenongo yang kelak berganti nama menjadi Raden Fatah yang mendirikan Kesultanan Demak Bintaro. Kelak Lembu Kanigoro atau Batoro Katong mengikuti jejak kakaknya memperdalam Islam dibawah bimbingan Wali Songo guna memperdalam Agama Islam. (Purwowijoyo, 1985)

Setelah memeluk agama Islam maka nama Lembu Kanigoro berganti nama menjadi Djoko Pitoeroen. Pergantian nama ini sangat lazim mengingat setiap perubahan agama dan budaya diikuti dengan perubahan nama. Nama merupakan cerminan budaya agama apa atau bangsa mana yang terkuat pada zaman pemakai nama tersebut. Oleh karena itu, Rosululloh menganjurkan kepada setiap muslim berilah nama anakmu dengan nama yang baik.

Sejarah banyak mencatat bahwa nama-nama pra Islam terdapat kecenderungan menyukai nama-nama binatang seperti Gajah Madha, Hayam Woeroek, Ciung Wanara, Walang Soengsang. Setelah mengenal Islam maka diikuti dengan perubahan nama seperti Walang Soengsang kemudian setelah masuk Islam menjadi Abdullah Iman kemudian Lembu Kenongo menjadi Raden Fatah. Pun demikian Lembu Kanigoro setelah dewasa dan memeluk agama Islam, Ia berganti nama menjadi Djoko Pitoeroen¹.

Raden Djoko Pitoeroen berdiaspora mendakwahkan agama Islam di tanah leluhurnya Kademangan Wengker atas mandat dari Prabu Brawijaya V guna mengenai misi pemerintahan. Kademangan Wengker dipimpin oleh Ki Ageng Kutu. Daerah petilasan yang menjadi tempat Ki

¹ Penggunaan nama Batoro Katong lebih familiar di masyarakat Ponorogo, dan secara masif didengarkan ketika masuknya penjajahan Belanda ketika masuk di Ponorogo pada tahun 1836.

Ageng Kutu kini dinamakan desa **Kutu Wetan** dan **Kulon** di Kecamatan Jetis. Djoko Pitoeroen ketika ke Wengker bersama Seloadji dan diikuti oleh 40 santri.

Pada saat ke Ponorogo ia bersama rombongan melakukan perjalanan melalui arah barat, saat berada di timur gunung lawu ia sempatkan Istirahat di daerah yang terdapat banyak pohon Suko. Pohon tersebut digunakan sebagai tempat mengikat Kuda-kuda yang digunakan oleh santri-santri dalam melakukan perjalanan Demak-Ponorogo. Tempat dimana Raden Djoko Pitoeroen istirahat dikemudian hari dinamakan **Suko Sewu** masuk Kecamatan Sukorejo.

Setelah istirahat kemudian Raden Djoko Pitoeroen melanjutkan perjalanannya ke arah utara dan bertemu dengan seorang ulama yang bernama Kiai Muslim yang akrab dikenal dengan Ki Ageng Mirah kemudian tempat Ki Ageng Mirah tinggal dinamakan desa **Mirah**. Perkenalannya dengan Ki Ageng Mirah dengan Djoko Pitoeroen inilah dapat diketahui peta politik Kademangan Wengker yang dipimpin oleh Ki Ageng Kutu.

Ki Ageng Kutu terkenal sebagai Warok yang memiliki kesaktian tinggi, ia menciptakan kesenian Reyog yang digunakan sebagai simbol dari “*perlawanan*” terhadap kebijakan Prabu Brawijaya V yang pada masa kepemimpinannya lebih didominasi oleh permaisurinya. yang berasal dari Cina. Akibat dari itu banyak pedagang dari Cina Masuk ke Majapahit yang membuat pedagang pribumi menjadi kalah bersaing. Reyog tersebut sebagai simbol Raja yang di Kuasai oleh Permaisurinya dengan maksud Harimau sebagai Raja Hutan takluk dan tunduk terhadap Burung Merak. (Ponorogo, 1993)

Raden Djoko Pitoeroen berusaha meredam gejolak perlawanan Ki Ageng Kutu yang lebih luas dengan melakukan negosiasi jalan damai. Raden Djoko Pitoeroen menggunakan strategi dengan cara menikahi Putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini untuk menjadi istrinya. Pernikahan tersebut merupakan jalan damai sebagai upaya mencegah pertumpahan darah. Strategi melalui saluran pernikahan inilah menjadi awal proses transisi perpindahan kekuasaan dari Ki Ageng Kutu yang diwariskan kepada menantunya Raden Djoko Pitoeroen. Ketika menjadi penguasa Wengker, maka Raden Djoko Pitoeroen pada tahun

1486 membuat tempat Kadipaten Baru bersama para prajurit wengker dan para warok sebutan untuk murid-murid Ki Ageng Kutu di daerah lereng Wilis hingga berdiri sebuah Kadipaten baru yang dinamakan “Pramanaraga” yang berasal dari kata Prana artinya Wasis dan Raga artinya Jasmani. Hingga sekarang dikenal dengan Ponorogo.

Raden Djoko Pitoeroen kemudian memboyong istrinya Niken Gandini ketempat yang baru, adapun adik iparnya yang bernama Suryolono mendapat kedudukan sebagai Bayangkaranya Ponorogo yang dikenal dengan nama Suromenggala. Sedangkan Seloadji sebagai Patih pertama dan Kyai Ageng Mirah sebagai penasehat Agama. Pada masa Raden Djoko Pitoeroen menjadi Adipati Ponorogo menandai kehidupan masyarakat Ponorogo yang aman dan tentram, setidaknya terjadi dua keberhasilan misi utama Raden Djoko Pitoeroen yaitu sebagai upaya Dakwah Islam dan berdirinya pemerintahan Islam di Kadipaten Ponorogo.

Berdirinya Kadipaten Ponorogo ditandai dengan batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di Komplek Makam Raden Djoko Pitoeroen yang menunjukkan Candrasengkala Memet berupa gambar manusia, pohon, burung dan gajah yang melambangkan angka 1418 saka atau tahun 1496 M.

Batu Gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Raden Djoko Pitoeroen adalah sebuah prasasti yg menggambarkan Candrasengkala Memet - Penobatan Raden Djoko Pitoeroen sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo pada hari Ahad Pon Tanggal 1 Bulan Besar, Tahun 1418 saka bertepatan dengan Tanggal 11 Agustus 1496 M atau 1 Dzulhijjah 901 H². (Ponorogo, 1996) Namun ada perbedaan pendapat mengenai batu Gilang di dekat makam Raden Djoko Pitoeroen tersebut, yakni pendapat J. Knebel sebagai tanda 1318 Saka atau

² Tanggal tersebut menurut Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang diterbitkan oleh Dinas PKDT II merujuk pada Hand Book of Oriental History Halaman 37, Namun penulis belum menemukan buku tersebut dan belum jelas siapa pengarang? Maupun tahun? dan penerbitnya. Namun Ada catatan lebih Jelas yang merujuk berdirinya Ponorogo berdasarkan pendapat M. Suwarno dalam Bukunya yang berjudul Raden Bhatara Katong Pendiri Ponorogo terbit tahun 1979 di Jakarta oleh Penerbit Yudha Gama Corp.

1398 M. Menurutnya Batu Gilang tersebut sebagai Prasasti berdirinya Masjid Batoro Katong.

Terlepas dari perbedaan tersebut, Raden Djoko Pitoeroen merupakan Adipati Ponorogo pertama. Setelah menjadi Adipati maka ia membentuk tata kota baru dan menyebarkan agama Islam di masyarakat. Ia memanfaatkan kesenian Reyog yang dirintis mertuanya tersebut sebagai media dakwah Islam, selama mendakwahkan Islam Raden Djoko Pitoeroen terkenal dengan sebutan **Syeih Amang Raga**. Maksud dari nama tersebut adalah Amang yang berarti membimbing dan Raga dimaknai Ponorogo. Artinya membimbing masyarakat Ponorogo sampai akhir hayatnya sampai wafat dan di makamkan di pemakaman Setono.

1.2 ADIPATI PONOROGO KE II SAYYID KULKUM WOTGALEH

Pangeran Panembahan Agung merupakan putra mantu pertama Raden Djoko Pitoeroen dengan istrinya yang bernama Niken Gandini. Pernikahan Adipati Ponorogo pertama tersebut memiliki tiga orang anak putri semua. Anak mantu pertamanya adalah bergelar Pangeran Panembahan Agung, kedua Kanjeng Gusti Pambayun yang menikah dengan Kyai Ali salah seorang Putra Ki Ageng Mirah dan Nyai Ageng Kaliwungu yang menikah dengan Sunan Tembayat (Ki Pandanarang II). Maka setelah Raden Djoko Pitoeroen wafat yang mengantikan kedudukan sebagai Adipati Ponorogo adalah putra mantu pertama yakni Pangeran Panembahan Agung.

Pangeran Panembahan Agung memiliki nama asli Sayyid Kulkum Wotgaleh yang merupakan cikal bakal wagsa Kajoran dan Wagsa Sawo (Naskah Kuna Pangeran Kajoran Tahun 1677 dan Ranji Silsilah Kuna Pangeran Kajoran 1677). Dugaan penulis masa pemerintahan Pangeran Panembahan Agung ini hidup pada era Penjajahan Portugis 1511 hal ini merujuk pada anak menantu Raden Djoko Pitoeroen lainnya yakni Sunan Pandanarang II yang hidup sekitar tahun 1500.

Pangeran Panembahan Agung selama memimpin Ponorogo dikenal sangat lemah, sebagaimana pendapat (Purwowijoyo, 1985) Hal ini dikarenakan Pangeran Panembahan Agung Kurang memperhatikan urusan kerajaan. Maka banyak para demang yang membangkang terhadap

pemerintahannya. Situasi itu menurut Purwowijoyo dikarenakan adanya perpecahan politik di Ponorogo oleh Surahandaka yang merupakan putra dari Ki Ageng Kutu atas kematian ayahnya ditangan Batara Katong. Faktor Balas dendam inilah yang mengakibatkan melemahnya pemerintahan Panembahan Agung.

Penulis mempunyai hipotesis berbeda dengan pendapat Purwowijoyo mengenai permasalahan di atas. Hipotesis yang pertama adalah mengenai teori sejarah masuknya Islam di Nusantara selalu dengan damai melalui berbagai saluran seperti perdagangan dan pernikahan sebagaimana banyak sejarawan yang mengemukakan seperti Buya Hamka, Prof. Drewes, Tome Pires dll. Sedangkan menurut Babad Ponorogo kedatangan Islam di Ponorogo dengan Peperangan antara Batoro Katong melawan Ki Ageng Kutu.

Kedua, Jika benar pendapat Purwowijoyo melalui peperangan maka bisa dipastikan bahwa Batara Katong belum menganut agama Islam. Hal ini tentu bertentangan dengan teori masuknya Islam di Nusantara berdasarkan beberapa ahli sejarah tersebut. Apalagi nama Batoro Katong memiliki cirikhas suatu Agama tertentu. Menurut Purwowijoyo penggunaan nama Batara tersebut sebagai upaya mendekatkan diri kepada masyarakat Wengker.

Pendapat Purwowijoyo tentu bertentangan dengan hadist nabi yang mengatakan berikanlah nama yang baik kepada anakmu, oleh karena itu biasanya terjadi transformasi perubahan nama dari nama agama lama menuju nama-nama bercirikan agama Islam. Sebagaimana para tokoh-tokoh pada zaman dahulu yang tercatat dalam sejarah seperti Walang Sungsang berganti menjadi Abdulah Iman, Lembu Kenongo menjadi Raden Fatah, Ki Gedeng Alang-alang menjadi Ki Danusila dan lain sebagainya. Tentu mengganti nama untuk mengelabui orang lain tidak dibenarkan, apalagi bertentangan dengan syiar Islam.

Ketiga, Ki Ageng Kutu yang kepalanya dipenggal oleh Batoro Katong sebagaimana pendapat Babad Ponorogo yang kemudian anak Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini dinikahi oleh Batoro Katong dinilai kurang masuk akal. Bagaimana membayangkan hubungan Rumah Tangga keduanya jika ayahnya yang notabene sebagai menantunya dihabisi, tentu menjadi dendam membara bagi Istrinya. Oleh karena itu

sejarah Ponorogo perlu kajian mendalam untuk meluruskan.

Keempat, melemahnya pemerintahan Pangeran Panembahan Agung karena mendapatkan perlawanan dari Surahandaka yang tidak terima ayahnya meninggal dunia di tangan Batoro Katong, padahal yang menjadi Adipati di Ponorogo terhitung sebagai Keponokannya sendiri anak dari kakaknya Niken Gandini? Analisis penulis melemahnya pemerintahan pada waktu itu dikarenakan Pangeran Panembahan Agung belum terlalu menguasai medan Kadipaten Ponorogo, serta statusnya sebagai anak mantu dirasa oleh sebagian masyarakat memiliki status yang lemah secara garis keturunan trah Raden Djoko Pitoroen.

Terlepas dari kepemimpinan Pangeran Panembahan Agung, Ia memiliki empat orang anak dan yang menggantikan kedudukan Adipati Ponorogo adalah Pangeran Dodol. Pangeran Panembahan Agung ini dimakamkan di kompleks pemakaman Raden Djoko Pitoeroen lokasinya tepatnya berada di sebelah kanan Gedong Raden Djoko Pitoeroen.

1.3 PANGERAN DODOL ADIPATI PONOROGO CUCU RADEN DJOKO PITOROEN

Pangeran Dodol merupakan putra dari Adipati Ponorogo yang ke II yakni Sayyid Kulkum Wotgaleh atau yang bergelar Pangeran Panembahan Agung. Pangeran Dodol ini tidak lain adalah cucu Raden Djoko Pitoeroen. Pangeran Dodol menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Adipati Ponorogo, ia menjadi Adipati ketiga trah darah Katongan (Djoko Pitoeroen).

Kehidupan keluarga bangsawan dan pendiri kadipaten Ponorogo membuat ia terbiasa dengan pola hidup kerajaan yang penuh dengan sistem dan tata cara sebuah keluarga bangsawan. Biasanya trah yang akan menjadi raja dan akan memimpin sebuah pemerintahan oleh orangtuanya sudah dipersiapkan sejak kecil. Hal ini, sebagai upaya proses kaderisasi kepemimpinan maka putra mahkota selalu dididik dan ditempa dengan berbagai ujian sebagai upaya menyiapkan kader penerus estafet kepemimpinan, maka tidak mengherankan pada setiap pergantian pimpinan pada sistem kerajaan, putra mahkota siap tidak siap harus mampu mengemban amanah terserbut.

Pangeran Dodol sebagai putra mahkota tentu menyadari hal itu yang mana akan meneruskan estafet kepemimpinan di Ponorogo sehingga Pangeran Dodol mengasah ilmu pemerintahan secara langsung dari orang tuanya Pangeran Panembahan Agung. Orang tua Pangeran Dodol memahami betul bahwa, mempersiapkan penerusnya sebagai Adipati Ponorogo harus jauh lebih baik daripada kepemimpinannya demi kemajuan masyarakat Ponorogo. Setelah memasuki usia dewasa Pangeran Dodol menggantikan kedudukan Pangeran Panembahan Agung menjadi Adipati Ponorogo, ia berganti nama dengan memperoleh gelar baru sebagai Pangeran Adipati Anom.

Pada saat era kepemimpinan Adipati Anom ini yang menjadi patihnya adalah putra dari Patih Seloadji yang bernama Kyai Wurat. Jadi Pemerintahan pada waktu itu, yang menjadi pengageng di istana Kadipaten Ponorogo masih saling berkaitan trah antara Pemerintahan Raden Djoko Pitoeroen dengan patihnya Seloadji yang menurunkan kepada Cucu Raden Djoko Pitoeroen dan putra dari Patih Seloadji. Harmonisasi pemerintahan berdasarkan tupoksi (Tugas pokok fungsi) inilah yang menjadikan keutuhan dalam masyarakat pada waktu itu.

Harmonisasi Pemerintahan di Kadipaten Ponorogo tidak selamanya berjalan mulus hal tersebut dikarenakan pengaruh dari ekspansi luar kadipaten sebagaimana pendapat Purwowijoyo era Pemerintahan Pangeran Dodol jalannya semakin lemah, kehidupan pertanian semakin mundur. Menurut analisis penulis hal tersebut terjadi karena kondisi pada saat itu erat terjadi hegemoni antar satu daerah dengan daerah lain. Pengaruh kekuasaan dan yang dikuasai sebagai upaya tarik menarik kekuatan politik yang terkuat pada waktu itu.

Pangeran Dodol menjabat sebagai Adipati sekitar tahun 1586-1601 atau era Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya yang menjadi raja dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama. Pada Pemerintahan Panembahan Senopati tidak berjalan dengan mulus karena diwarnai pemberontakan-pemberontakan. Kerajaan yang berpusat di Kotagede (sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang) ini selalu terjadi perang untuk menundukkan para bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram, seperti Bupati Ponorogo, Madiun, Kediri, Pasuruan bahkan Demak. Namun, semua daerah itu

dapat ditundukkan. Daerah yang terakhir dikuasainya ialah Surabaya dengan bantuan Sunan Giri.

Sebagaimana daerah lain, hal ini juga terjadi di Ponorogo, yang kemudian masuk ke dalam daerah kekuasaan Mataram. Maka secara logika suatu kondisi masyarakat yang terjadi peperangan ataupun pemberontakan bisa dipastikan kondisinya mengalami kemunduran diberbagai sektor seperti pertanian, yang mana sebagai komoditas utama masyarakat pada waktu itu. Sektor pertanian merupakan faktor fundamental dalam sebuah pemerintahan. Tidak bisa dibayangkan apabila masyarakat mengalami gagal dalam sektor pertanian akan berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat lainnya seperti kemiskinan, kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi Pemerintahan Ponorogo relatif baru pada waktu itu dengan mengalami proses pergantian kepemimpinan berjalan tiga kali kepemimpinan. Maka sebagai Kadipaten baru memerlukan sebuah tata kelola yang baik untuk kesejahteraan rakyat.

Pangeran Dodol berusaha dalam mensejahterakan masyarakat Ponorogo tentu mengalami berbagai kendala tersebut, sehingga segala daya dan upaya dicurahkan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur hingga akhir hayatnya. Pangeran Dodol setelah wafat, kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga Trah Katongan di desa Setana Ponorogo tepatnya pada sisi sebelah kanan makam kakeknya. Estafet kepemimpinan Ponorogo kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Sedakarya.

1.4 PANGERAN SEDAKARYA ADIPATI PONOROGO YANG MEMBANGUN MAKAM RADEN DJOKO PITOEROEN

Pangeran Sedakarya adalah Adipati Ponorogo ke empat, ia merupakan putra dari Pangeran Dodol. Pergantian estafet kepemimpinan dari Ayah ke anak ini disebabkan oleh kondisi pemerintahan ayahnya pada waktu itu berjalan tidak stabil khususnya sektor perekonomian yang mana masyarakat mengalami penurunan dibidang pertanian yang mengakibatkan lemahnya jalannya pemerintahan.

Pangeran Sedakarya sejak kecil hidup dalam keluarga bangsawan, ia memperoleh pendidikan secara langsung dari keluarganya. Apalagi keluarga besarnya merupakan tokoh-tokoh pembesar dan pendiri Kadipaten Ponorogo, Buyutnya Raden Djoko Pitoeroen merupakan Pendiri Kadipaten Ponorogo. Kultur keluarga *founding father* Ponorogo membuatnya memiliki jiwa inovasi, kreasi dan ekspansi untuk mengembangkan Ponorogo lebih baik.

Amanah sebagai Adipati Ponorogo meneruskan jejak perjuangan keluarga besarnya, membuat ia menyadari betul tanggung jawab moral terhadap masyarakat untuk membawa kearah lebih baik. Maka dari itu, ketika diamanahi menjadi Adipati menggantikan kedudukan ayahnya Pangeran Dodol, ia langsung “*tanjap gas*” untuk memperbaiki kondisi masyarakat Ponorogo yang sempat terpuruk pada masa era kepemimpinan Ayahnya. Ia dedikasikan penuh jiwa dan raganya untuk totalitas membangun masyarakat Ponorogo, oleh karena itu Pangeran Sedakarya dikenal masyarakat sebagai Adipati yang memiliki karakter pekerja keras. (Purwowijoyo, 1985) Langkah-langkah yang dilakukan Adipati Sedakarya untuk mewujudkan Ponorogo lebih baik dengan melalui konsolidasi internal dan membuat berbagai kegiatan Program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Diantara program tersebut adalah tilik desa, ia meninjau langsung perkembangan desa-desa di Ponorogo secara langsung, kesempatan tersebut selain digunakan sebagai wahana silaturahmi dengan masyarakat Adipati Sedakarya juga memberikan bimbingan penyuluhan mengenai masalah-masalah pertanian. Tidak berselang lama, dampak dari kegiatan Adipati Sedo Karyo “nyetrum” kepada masyarakat sehingga giat bekerja, yang kemudian berimplikasi kehidupan masyarakat berangsur-angsur stabil dan berjalan lancar hal ini ditandai dengan murahnya sandang, pangan dan papan pada saat era kepemimpinan Adipati Sedokaryo.

Adipati yang memiliki hobi tirakat ini, semasa pemerintahannya selain membangun masyarakat ia juga membangun kompleks makam keluarganya yakni para pendahulu pendiri kadipaten Ponorogo. Hal tersebut sebagai wujud menghormati jasa-jasa perjuangan para pendahulu pejuang Kadipaten Ponorogo. Langkah yang dilakukan Adipati Sedakarya adalah mengumpulkan masyarakat melakukan kerjabakti mendirikan

komplek pemakaman. Komplek tersebut meliputi beberapa bagian. Bagian utamanya adalah makam buyutnya Raden Djoko Pitoeroen dengan membuat semacam kraton dapur *griya limas tanpa sungsun*, yang di atas terdapat mahkotanya.

Kraton tersebut terbuat dari kayu jati tanpa dihaluskan (*Pasah*) hanya bekasnya dihaluskan dengan kapak (*Pethelan*). Di dalam makam terdapat sakaguru (tiang utama) yang didalamnya sebagai tempat peristirahatan terakhir Raden Djoko Pitoeroen yang ditutup dengan *gebyok* sedangkan diluar *gebyok* merupakan makam untuk putra-putranya. Untuk melengkapi makam tersebut, Pangeran Sedakarya juga membangun gapuro masuk menjadi tiga lapis. Pada saat proses pembuatan makam buyutnya tersebut pangeran Sedakarya tiba-tiba mengalami sakit.

Pangeran Sedakarya konon sakitnya karena mendapat perlawanan dari dua Jin yang bernama Sember Nyawa dan Patri Nyawa. Sember Nyawa merupakan Jin yang menunggu Kedung Sentul (Kedung Sentul merupakan makam lama timur Makam Raden Djoko Pitoeroen) dan Patri Nyawa adalah Jin yang menunggu Goa Sigala gala. Perlawanan dua Jin tersebut dikarenakan Pangeran Sedakarya menolak keras bersekutu dengan dua Jin tersebut. Karena Sakit yang dialami oleh Pangeran Sedakarya tersebut, ia meninggal dunia dan dimakamkan di gedung luar makam Raden Djoko Pitoeroen tepatnya di sebelah sampingnya.

1.5 PANGERAN ADIPATI SEPUH YANG MEMBANGUN MASJID AGUNG KAUMAN KOTA LAMA

Pangeran Adipati Sepuh merupakan Adipati ke 5 Ponorogo kota lama, Ia menggantikan kedudukan ayahnya Pangeran Sedakarya yang meninggal dunia karena sakit. Pangeran Adipati Sepuh merupakan anak pertama dari Pangeran Sedakarya maka sebagai putra dari Adipati Ponorogo yang akan menggantikan kedudukan ayahnya. Pangeran Adipati Sepuh ini sengaja telah dipersiapkan oleh ayahnya untuk menjadi Adipati kelak. Oleh karena itu, Pangeran Adipati Sepuh dididik dengan baik, sehingga estafet kepemimpinan yang berlangsung akan mengalami perubahan yang baik.

Pangeran Sedakarya menyadari hal itu dengan melakukan kaderisasi sejak Pangeran Adipati Sepuh kecil. Salah satu upaya kaderisasi tersebut, melibatkan anaknya dalam urusan-urusan pemerintahan. Maka setelah putranya Pangeran Adipati Sepuh dewasa siap menerima tampuk pimpinan siap menjalankan amanah mengabdikan pada masyarakat. Maka dari itu ketika Pangeran Sedakarya saat sakit dan wafat secara “tiba-tiba” ketika proses pembangunan makam Raden Djoko Pitoeroen yang tidak lain adalah canggah dari Pangeran Adipati Sepuh. Pangeran Adipati Sepuh tidak memerlukan waktu lama dalam proses adaptasi kepemimpinan saat menjabat Adipati Ponorogo karena memang sejak kecil sudah dipersiapkan ayahnya.

Pangeran Adipati Sepuh menjabat sebagai Pemimpin Kadipaten Ponorogo sekitar tahun 1568-1586 atau pada era Kasultanan Pajang. Semasa menjabat Adipati banyak perubahan yang ia lakukan guna memajukan tata kota Ponorogo maupun mensejahterakan rakyat Ponorogo. Kebijakan Pangeran Adipati Sepuh antara lain ia memindahkan istana yang lama, yang semula berada di dusun tingen yang berasal dari atas setinggi artinya tanah yang tinggi menuju ketempat yang baru sekarang masuk desa Setana yang berasal dari kata Istana.

Istana yang baru menghadap kearah selatan dan didepan alun-alun terkena jalan besar kearah selatan mengarah ke Jeruksing. Untuk melengkapi fasilitas yang baru, maka Pangeran Adipati Sepuh juga membangun sarana peribadatan Masjid yang lokasinya berada disebelah barat Alun-Alun. Untuk menandai berdirinya masjid Agung Baru ditandai dengan prasasti batu *candra sengkala memet* yang bertuliskan Angka 1560 dan beberapa hiasan gambar yang menyiratkan arti tertentu.

Berdirinya sebuah Masjid Agung lama ini sebagai upaya Adipati membangun Jiwa rohani masyarakat, karena masjid merupakan faktor penting dalam membangun sebuah peradapan umat muslim. Di masjidlah selain sebagai tempat beribadah, juga sebagai tempat madrasah kaderisasi umat. Masjid tersebut sekarang terkenal dengan sebutan Masjid Agung Kauman Kota Lama. Nama demikian, karena Sekitaran Masjid Agung dahulu dinamakan Kauman atau akronim dari Kaum beriman, karena banyak masyarakatnya yang gemar memakmurkan Masjid. Pada sisi barat kauman terdapat tempat tinggal para patih Kadipaten Ponorogo, sehingga

masyarakat menyebut tempat tersebut sebagai Kepatihan sehingga dinamakan desa Patihan.

Selain Masjid Agung Kota lama dari sektor Perekonomian, maka pemerintah membangun Pasar sebagai sentra perdagangan pada waktu itu. Pasar tersebut sangat ramai pada hari Pon (Penanggalan Pasaran Jawa) sehingga pasar tersebut dinamakan Pasar Pon atau lebih dikenal dengan sebutan sarpon. Tata kota demikian mirip dengan konsep-konsep kerajaan seperti Mataram. Pada sisi selatan perempatan alun-alun terdapat gardu pantau sebagai tempat istirahat para pejalan kaki atau juga digunakan sebagai tempat memantau keamanan. Di dalam gardu terdapat kentongan sebagai alat komunikasi masyarakat. Kentongan tersebut dinamakan *Kyai Geger* nama tersebut karena Kentongan dipukul lebih awal, kemudian diikuti kentongan lainnya. Kentongan *Kyai Geger* tersebut hilang pada tahun 1837 Masehi bersamaan dengan perpindahan kota lama menuju kota baru.

Pangeran Adipati Sepuh juga membangun rumah penjara yang lokasinya berada di depan kadipaten sebelah timur, yang terbuat dari semen beton sehingga bangunan kuat. Pangeran Adipati Sepuh sengaja membuat konsep bangunan kuat besar di dekat Alun-alun hal ini sebagai “tanda” peringatan kepada masyarakat agar menjauhi dari perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah. Pangeran Adipati Sepuh ini memiliki beberapa putra, salah satu putranya diambil menantu oleh Sultan Pajang Prabuwijaya atau Jaka Tingkir. Pangeran Adipati Sepuh wafat dan dimakamkan dipesarean Setana.

1.6 PANGERAN RANGGAWICITRA I MENANTU RADEN DJOKO TINGKIR

Pangeran Ranggawicitra merupakan Adipati Ponorogo ke enam. Ia menggantikan kedudukan Adipati Sebelumnya Pangeran Adipati Sepuh yang meninggal dunia. Pangeran Ranggawicitra adalah putra mantu dari Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh mertuanya yang bernama Sultan Hadiwijaya. Secara otomatis hubungan antar kedua belah pihak yakni kerajaan Pajang dan Kadipaten Ponorogo menjadi lebih erat. Berdasarkan analisis penulis, pernikahan putra dari Panembahan Adipati Sepuh dengan Putri Sultan Hadiwijaya tersebut guna untuk memperkuat kekuasaan Kerajaan Pajang di Jawa Timur.

Penulis menduga hal itu berdasarkan analisis mengenai kekuasaan dan kekuatan Kerajaan Pajang pada waktu itu. Pada awal berdirinya Kerajaan Pajang pada tahun 1549 bahwa wilayah pajang terkait eksistensi Demak pada masa sebelumnya, hanya meliputi sebagian Jawa Tengah. Hal ini disebabkan negeri-negeri Jawa Timur banyak yang melepaskan diri semenjak kematian Sultan Trenggana.

Pada Tahun 1568 Hadiwijaya dan Para Adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Giri Prapen. Dalam kesempatan itu, Para Adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Sebagai tanda ikatan politik. Panji Wiryakrama dari Surabaya memimpin persekutuan Adipati-Adipati di Jawa Timur dinikahkan dengan Putri Hadiwijaya. Jika melihat strategi pada masa tersebut, pun dugaan penulis menggunakan pola sama demikian hal ini dimana salah satu Adipati di Jawa Timur, yakni Ponorogo yang bernama Pangeran Adipati Sepuh menikahkan putranya yang bernama Ranggawicitra dengan salah satu Putri Hadiwijaya atau Raden Joko Tingkir. Selain mengambil menantu Putra Panji Wiryakrama dari Surabaya dan Pangeran Adipati Sepuh dari Ponorogo. Pangeran Hadiwijaya juga mengambil menantu dari negeri kuat lainnya di wilayah Jawa Timur yakni Madura yang berhasil ditundukan Pajang. Pemimpin Madura yang bernama Raden Pranatu alias Panembahan Lemah Dhuwur juga diambil menantu Pangeran Hadiwijaya, sehingga secara otomatis Kerajaan Pajang menjadi lebih kuat. Salah satu strategi dengan jalur pernikahan tersebut, sehingga memperkuat basis kekuatan Kerajaan Pajang. Melalui saluran pernikahan tersebut, yang merupakan metode efektif pada waktu itu untuk mendukung dan menaklukkan sebuah pemerintahan. Sehingga eksistensi suatu Pemerintahan atau kerajaan menjadi lebih kuat karena memperoleh dukungan dari besan dan menantunya.

Pemerintahan Pajang menjadi lebih kuat, tidak terlepas dari Jasa para wali yakni Sunan Giri Prapen yang bertindak sebagai pelantik Hadiwijaya sebagai raja dan juga sebagai mediator pertemuan dengan para Adipati di Jawa Timur tahun 1568, Sunan Giri Prapen berjasa banyak terhadap peta perpolitikan khususnya membangun Kerajaan-kerajaan Islam, sehingga Agama Islam mudah menyebar di kepulauan Jawa.

Semasa menjalin hubungan dengan Pajang, Kadipaten Ponorogo, Pangkat Adipati diganti dan hanya tinggal berpangkat Bupati. Adipati kemudian hanya menjadi sebutan gelar saja. Kekuasaan di Ponorogo pun menjadi lebih kuat, karena juga di dukung oleh Kerajaan yang lebih besar yakni Kerajaan Pajang. Menantu Pangeran Hadiwijaya yang menguasai Kadipaten Ponorogo yang bernama Raden Adipati Ranggawicitra ini meninggal dunia sekitar tahun 1587 dan Jenazahnya dimakamkan dikomplek pemakaman Setono.

Adipati Ponorogo Pangeran Ranggawicitra tersebut memiliki beberapa istri, dengan Istri dari putra Raden Hadiwijaya memiliki satu anak yang bernama Pangeran Kuning dan dari Istri kedua memiliki tiga Anak yang bernama Raden Penghulu, Raden Penengah dan Raden Jontono. Setelah Pangeran Ranggawicitra meninggal dunia, Kedudukan Adipati Ponorogo digantikan oleh Pangeran Ranggawicitra II.

1.7 PANGERAN RANGGAWICITRA II MEDIATOR RAJA MATARAM

Pengeran Ranggawicitra II nama lainnya adalah Pangeran Ranggawarsita II karena ia menjadi Adipati menggantikan kedudukan Adipati Ranggawicitra I maka ia memperoleh gelar Raden Adipati Ronggawicitra II. Ia menjadi Adipati Ponorogo ke Tujuh. Ia menjabat Adipati Ponorogo sekitar tahun 1587-1601 atau era Raden Sutawijaya raja Mataram peletak dasar-dasar kesultanan Mataram.

Raja Mataram pertama Sutawijaya memiliki beberapa anak diantaranya adalah Gusti Kanjeng Pambayun atau dipanggil Retno Pambayun, Pangeran Rangga Adipati Pati, Pangeran Puger atau Raden Mas Kentol Kejuro Adipati Demak, Pangeran Tepasana, Pangeran Purbaya atau Raden Mas Damar, Pangeran Ria Menggala, Pangeran Adipati Jayaraga Adipati Gadingreja (Ponorogo), Panembahan Hadi Prabu Hanyakrawati atau lebih dikenal dngan sebutan Panembahan Seda Ing Krapyak yang artinya Baginda yang wafat di Krapyak, dan Pangeran Pringgalaya.

Putra Raden Sutawijaya beberapa diantaranya yang menggantikan kedudukannya menjadi Raja Mataram adalah Panembahan Seda Krapyak. Pergantian estafet kepemimpinan tersebut menjadi Polemik Politik di

Keraton Mataram. Hal tersebut dikarenakan faktor kekuasaan yang menjadikan kecemburuan Putra-putra Sutawijaya yang lainnya. Hal ini dikarenakan Pangeran Seda Krapyak merupakan anak yang kedelapan, sehingga mendapat pertentangan dari banyak saudara tuanya. Diantara saudara tuanya yang menentang adalah Pangeran Puger yang menjadi Adipati Demak atau kakak tertua putra dari Pangeran Sutawijaya yang seharusnya menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga Pangeran Puger menentang ke Mataram yang mengakibatkan ia harus diasingkan di Selong Kudus. Pun demikian putra Raden Sutawijaya yang lain yaitu Pangeran Bethotot atau Raden Jayaraga ia oleh ayahnya diamanahkan kepada Adipati Ranggawicitra II Adipati Ponorogo untuk menjadi salah satu Bupati di bagian Wilayah Ponorogo, oleh Tumenggung Ranggawicitra II, Pangeran Jayaraga ditempatkan di sebuah dusun bernama Srigadhing yang terletak kurang lebih 15 Km kota Ponorogo sekarang masuk desa Campureja Sambit. Daerah kabupaten Gadingreja tanahnya datar, subur dan luas sehingga dalam waktu singkat Bupati Jayanegara dan keluarganya menjadi kaya raya. Setelah berhasil, beliau mengumpulkan anak-anak muda untuk dilatih pelajaran beladiri dan taktik perang. Anak-anak muda merasa senang, namun para pinisepuh menjadi khawatir karena menduga pasti ada maksud dari Bupati Jayaraga menghimpun kekuatan para pemuda.

Kecurigaan masyarakat bukan tidak beralasan, apalagi Adipati Jayaraga merupakan keturunan bangsawan Raja Mataram yang memiliki trah penerus Kerajaan. Perihal aktifitas Putra Sutawijaya sebagai adipati Gadingreja, terdengar sampai ke Mataram. Apalagi Adipati Jayaraga menolak hadir pada acara-acara Kerajaan bahkan sudah selama tiga kali perayaan Maulud dan Idul Fitri tidak pernah hadir. Hal ini mengundang tanda tanya dari raja Mataram dan sebuah bentuk *mbalelo*, apalagi Pangeran Jayaraga mengubah namanya menjadi Jayanegara. Setelah melalui proses penyelidikan pihak Mataraman, dugaan kuat Pangeran Jayaraga memiliki rencana kuat untuk melawan Mataram.

Pangeran Jolang kemudian meminta pangeran Pringgalaya adiknya untuk berangkat ke Gadingreja menanyakan kesetiaan Adipati Gadingreja Pangeran Jayaraga kepada Mataram. Beliau selama di Gadingreja ditemani oleh Tumenggung Ranggawicitra II Adipati

Ponorogo sebagai mediator bersama Tumenggung Martalaya. Kedatangan Rombongan dari Mataram dan Kadipaten Ponorogo membuat masyarakat Gadingreja menjadi panik dan ketakutan. Banyak masyarakat yang lari dan masuk kedalam rumah karena kebingungan dengan apa yang terjadi di Kadipaten Gadingreja.

Rombongan setiba dalam Pendopo Kadipaten Gadingreja Pihak Mataram yang dipimpin oleh Pangeran Pringgalaya disambut dengan hangat oleh Adipati Jayaraga terkait kedatangan Pembesar Mataram. Setelah terjadi dialog perihal dugaan Pangeran Jayaraga ingin memberontak Mataram, terjadilah jalan buntu dimana Pangeran Jayanegara merasa lebih tua dan yang berhak menjadi Raja Mataram sehingga merasa tidak perlu datang ke Mataram. Namun perbuatan tersebut dirasa sebagai wujud ketidak patuhan Kadipaten Gadingreja kepada Mataram. Maka, atas perbuatan tersebut Pangeran Jayaraga dijatuhi hukuman pengasingan di Gunung Loreng Slahung pada sebuah tempat bernama Tumpak Sewangon hingga meninggal.

Pangeran Tumenggung Ronggowicetro II selama menjadi mediator dirasa cukup berhasil, keberhasilan tersebut paling tidak dapat menyelesaikan konflik keraton tanpa pertumpahan darah di dalam masyarakat sehingga Adipati Ranggawicitra II dikenal di dalam masyarakat sebagai seorang mediator, ia meninggal dimakamkan di pemakaman Setana tepatnya Gedung nomer satu berdekatan dengan ketiga istrinya.

1.8 RADEN MERTAWANGSA I BERSELISIH DENGAN AMANGKURAT I

Raden Tumenggung Mertawangsa I merupakan Adipati Kabupaten Ponorogo kota lama yang ke 8. Ia adalah Putra dari Adipati Ponorogo sebelumnya Raden Tumenggung Ranggawicitra II. Ia memimpin Kadipaten Ponorogo sekitar tahun 1677, Kepemimpinan Raden Tumenggung Mertawangsa I bersamaan pada era Kepemimpinan Amangkurat Prabu atau lebih dikenal dengan nama Amangkurat I raja Mataram.

Amangkurat I merupakan putra dari Raja Sultan Agung Hanyakrakusuma. Nama aslinya Raden Mas Sayyidin, Ibunya Ratu Wetan, Putri Tumenggung Upasanta Bupati Batang Keturunan Juru

Martani. Sejak kecil Raden Mas Sayyidin dididik oleh Tumenggung Mataram. Setelah Sultan Agung mangkat, Raden Mas Sayyidin menggantikannya dan berkuasa tahun 1646-1677 dengan gelar Amangkurat I.

Pada Masa Kepemimpinan Amangkurat I dianggap sebagai masa kemunduran kerajaan Mataram karena sikap dan kebijakannya penuh dengan Kontroversial. Diantara kebijakan tersebut adalah memindahkan ibu kota kerajaan dari kota gede yang keratonnya terbuat dari kayu di pindah ke Plered yang terbuat dari batu bata dan dikelilingi parit buatan seperti menggambarkan jiwa Amangkurat I terasing. Ia bahkan mencurigai siapapun yang berada di sekelilingnya, konon pada setiap malam, seluruh kompleks keraton disterilkan dari laki-laki. Hanya ia sendirian bersama ratusan wanita, abdi dalem dan istri-istrinya. Penjagaan diserahkan kepada pasukan wanita, terdiri dari tiga puluh prajurit wanita cantik yang disebut Prajurit *Trinisat Kenya* yang setia selalu menjaganya.

Amangkurat I juga terkenal raja yang kejam, arogan dan suka memaksa kehendaknya. Sebelum menjadi putra mahkota ia terlibat skandal dengan istri Tumenggung Wiraguna Ketika menjadi Raja Amangkurat I menumpahkan kebencian terhadap Tumenggung Wiraguna. Amangkurat I mengirimnya ke timur untuk menumpas pasukan ekspansi pasukan Bali di Blambangan. Ditempat yang jauh dari keluarga dan pendukungnya itu, Tumenggung Wiraguna di Bunuh. Konon pembunuhan adalah orang dekat Amangkurat I Ngabehi Wirasaputra. Pun kekejaman Amangkurat I tidak berhenti pada itu saja, suatu ketika ia mengadakan pesta yang pesertanya adalah seluruh Adipati di bawah kedudukan wilayah Mataram. Para Adipati tersebut dikumpulkan di Kartasura untuk bersenang-senang dengan mengadakan sebuah acara keramaian seperti pertunjukan dan adu kekuatan. Acara tersebut meliputi sabung ayam, adu kambing dan lain sebagainya.

Adipati Ponorogo Mertawangsa I membawa kambing prucul dan ayam bekisar. Kambing *Prucul* (Kambing tanpa tanduk) Raden Tumenggung Mertawangsa I diadu dengan Kambing yang lebih besar diadu dengan milik Amangkurat I. Ternyata Kambing milik Amangkurat I kalah melawan Kambing *prucul* milik Raden Tumenggung Mertawangsa I. Kekalahan kambing milik Amangkurat I tersebut memicu kemarahan

Amangkurat I. Ia merasa dipermalukan oleh Raden Mertawangsa I kemudian marah. Kemarahan tersebut, ia lampiaskan dengan menghukum Raden Tumenggung Mertawangsa I dengan cara di hukum gantung (*Lawe*). Oleh karena itu Raden Tumenggung Mertawangsa I disebut juga Raden Mertawangsa Seda Lawe.

Setelah dihukum mati dan wafat, Raden Tumenggung Mertawangsa I dibawa pulang ke Ponorogo dan dimakamkan di Pemakaman Setono. Ia wafat meninggalkan dua orang anak yang terdiri dari satu putra dan satu putri. Putra pertama menggantikan kedudukannya sebagai Adipati Ponorogo yang bernama Raden Tumenggung Mertawangsa II dan Putrinya menikah dengan Putra Raden Mas Tumenggung Mantahun Jipang dari Bojonegoro.

1.9 RADEN MERTAWANGSA II MELAWAN RAJA KARTASURA AMANGKURAT III

Raden Tumenggung Mertawangsa II merupakan Adipati Ponorogo Kota lama yang ke 9, Ia menggantikan kedudukan Ayahnya yang bernama Mertawangsa I. Ia menjabat sekitar tahun 1675-1706. Tahun tersebut berdasarkan analisis penulis tentang *Babad Ponorogo* pada saat kepemimpinan Raden Tumenggung Mertawangsa I terjadi perselisihan dengan Sri Susuhunan Amangkurat Mas, atau yang sering ditulis Amangkurat III atau terkenal dengan sebutan Sunan Mas yang menjabat Keraton Kartasura antara tahun 1703-1705.

Amangkurat III menurut Babad tanah Jawi adalah satu-satunya putra Amangkurat II karena ibunya telah menguna-guna istri ayahnya yang lain sehingga mandul. Sehingga Amangkurat III menduduki tahta Raja. Amangkurat III juga dijuluki Pangeran Kuncet, karena menderita cacat di bagian Tumit. Dikisahkan pula bahwa Amangkurat III memiliki watak yang buruk, mudah marah-marah dan cemburu bila ada pria lain yang lebih tampan. Ketika menjabat sebagai Adipati Anom, ia menikah dengan sepupunya bernama Raden Ayu Lembah putri pangeran Puger. Namun Istrinya kemudian dicerai karena berselingkuh dengan Raden Sukra Putra Patih Sindureja.

Raden Sukra kemudian dibunuh utusan Amangkurat III, sedangkan Pangeran Puger dipaksa menghukum mati mantan istrinya, Amangkurat III kemudian menikahi Ayu Himpun adik Ayu Lembah. Amangkurat III ini naik tahta di Kartasura menggantikan Amangkurat II yang meninggal tahun 1702. Konon menurut *Babad Tanah Jawi* wahyu keprabon sebenarnya jatuh kepada pangeran Puger. Dukungan Pangeran Puger pun mengalir dari pejabat yang tidak menyukai pemerintahan Amangkurat III. Hal ini membuat Amangkurat III resah. Ia menceraikan istrinya Raden Ayu Himpun dan mengangkat permaisuri baru, seorang gadis dari desa Onje.

Dukungan terhadap keluarganya membuat Raden Suryakusuma Putra Pangeran Puger memberontak. Amangkurat III yang ketakutan membuat kebijakan mengurung Pangeran Puger sekeluarga, mereka kemudian dibebaskan kembali atas bujukan Patih Sumabrata. Setelah keluar dari “Tahanan” justru membuat Pangeran Puger mendapat banyak simpati dan dukungan dari banyak kalangan untuk memberontak. Akhirnya, pada tahun 1704, Amangkurat III mengirim utusan untuk membunuh Pangeran Puger sekeluarga, mengetahui hal ini Pangeran Puger melarikan diri ke Semarang.

Di Semarang Pangeran Puger mendapat dukungan dari VOC dengan balas jasa yang menguntungkan pihak Belanda. Ia kemudian mengangkat dirinya sebagai raja bergelar Paku Buwana I. Gabungan pasukan Paku Buwana I dengan VOC bergerak tahun 1705 untuk merebut Kartasura. Amangkurat III membangun pertahanan di Ungaran dipimpin oleh Pangeran Arya Mataram, pamannya, yang ternyata diam-diam pamannya mendukung Paku Buwana I yang tidak lain adalah kakaknya.

Amangkurat III ini mulai terdesak, oleh Pangeran Arya Mataram membujuk agar segera meninggalkan Kartasura. Ia sendiri kemudian bergabung dengan Pasukan Paku Buwana I. Sehingga Paku Buwana I mampu menguasai Kartasura pada tahun 1705. Kondisi Amangkurat III yang mulai terdesak kemudian Rombongan Amangkurat III melarikan diri ke Ponorogo sambil membawa semua pusaka keraton. Di Ponorogo Amangkurat III ini diterima dengan baik oleh Raden Mertawangsa II Adipati Ponorogo, namun sikap Amangkurat III selama di Ponorogo ini

tidak mencerminkan perilaku yang baik sebagai seorang pembesar kerajaan. Ia setiap hari selalu mengadakan pesta, bukan selayaknya sebagai seorang pengungsi dan menghindari dari bahaya. Pada suatu ketika Amangkurat III meminta kepada Raden Tumenggung Mertawangsa II untuk disediakan peralatan berburu kemudian memerintahkan utusan untuk membuat grogolan di dalam hutan. Tempat grogolan (Tempat pengintaian) tadi kemudian menjadi desa **Grogol** Sawoo.

Seekor menjangan (kijang) tidak berselang lama kemudian melewati di depan Panggung. Amangkurat III kemudian membentangkan busurnya dan memanah kearah menjangan tersebut hingga terkualai kesakitan. Melihat demikian Raden Mertawangsa II memerintahkan pengawalnya yang bernama Surengpati segera menyembelih menjangan tersebut sebelum menjadi bangkai. Ternyata hal ini membuat marah Amangkurat III dan menangkap Raden Tumenggung Mertawangsa II bersama pengawalnya Surengpati mereka berdua oleh Amangkurat III dihukum kebiri, kemudian ditinggal pergi begitu saja oleh Amangkurat III³.

Raden Tumenggung Mertawangsa II dan Surengpati pingsang dan diobati oleh pengikut dan keluarganya saat berburu. Setelah siuman Raden Tumenggung Mertawangsa II memberikan perintah kepada rakyat Ponorogo untuk menangkap Amangkurat III. Ia berpesan kepada rakyatnya jangan takut mati oleh raja yang tidak tahu balas budi, kejar mereka dan jika tertangkap maka bunuhlah, penggal lehernya kepada Raja yang tidak mengerti kebajikan. Para rakyat yang dipimin oleh putra Raden Tumenggung Mertawangsa dan Surengpati mengejar rombongan Amangkurat III.

Amangkurat III melihat amarah rakyat Ponorogo, ia bersama keluarga melarikan diri mengendarai kuda sementara para prajuritnya berhadapan dengan rakyat Ponorogo. Pertempuran tersebut kemudian dimenangkan oleh rakyat Ponorogo, namun sayangnya Amangkurat III berhasil meloloskan diri ke Madiun melalui Jalur air Sungai Sekayu,

³ Menurut Babad Ponorogo, Amangkurat III menyimpan dendam terhadap Mertawangsa II dikarenakan salah satu permaisuri Amangkurat III tertarik ketampanan Mertawangsa II yang membuat Amangkurat III cemburu.

sementara Surengpati wafat pada saat pertempuran tersebut dan dimakamkan di Durisawo sedangkan Raden Tumenggung Mertawangsa II karena sakit yang dideritanya juga wafat kemudian terkenal dengan Raden Tumenggung Sedo Pondhoh.

Raden Tumenggung Mertawangsa II wafat meninggalkan lima orang Putra yaitu Raden Kertana, Raden Kecebongan, Raden Kertanaya, Raden Kertamenggala, dan Raden Songo. Raden Tumenggung Mertawangsa II semasa hidup dikenal Masyarakat sebagai Adipati Ponorogo yang memiliki jiwa luhur budinya. Sementara apa yang diperbuat oleh Amangkurat III terhadap Adipati Mertawangsa II tersebut mendapatkan balasan setimpal dari Allah, sepanjang 1707 Amangkurat III mengalami penderitaan karena diburu pasukan Paku Buwana I ke berbagai daerah seperti Malang, Blitar, Kediri dan menyerah di Surabaya tahun 1708 sebelum dibuang ke Srilangka oleh VOC.

1.10 RADEN SURABRATA IKUT MENGAWAL PAKU BUWANA II KE KARTASURA

Pangeran Surabrata merupakan adipati Ponorogo ke X. Raden Surabrata adalah putra dari Raden Tumenggung Mertawangsa II. ia menjabat Adipati Ponorogo sekitar tahun 1725-1755. Pada saat Raden Surabrata menjadi Adipati Ponorogo pada tahun 1742. Ponorogo kedatangan rombongan pengungsi dari Keraton Surakarta yang di pimpin oleh Paku Buwana II. Kedatangan Paku Buwana II ke Ponorogo dikarenakan di Keraton Surakarta di serang oleh Raden Mas Garendi. Serangan tersebut, membuat Keraton Kartasura dikuasai Raden Mas Garendi dan menjadi Raja Bergelar Sunan Kuning. Serangan ini terkenal dengan sebutan Geger Pecinan.

Selama huru-hara di keraton Paku Buwana II mengungsi ke Ponorogo misi utamanya adalah ingin menemui Kakaknya Pangeran Kalipa Kusuma yang sedang bertapa di Gunung Bhayangkaki Sawoo. Rute Perjalanan Paku Buwana di Ponorogo melalui suatu tempat yang kondisinya kesulitan air, yang ada adalah *badeg* kemudian daerah ini dinamakan **Badegan**. Perjalanannya sampai kesuatu tempat melihat sebuah rumah pendhapa besar. Paku Buwana II mempunyai firasat bahwa orang tersebut memiliki trah pembesar dan silaturahmi ke pemilik rumah

tersebut yang pemiliknya bernama Jayengrana yang berasal dari desa Kranggan Sukorejo.

Paku Buwana II ternyata keberadaan di Ponorogo tersebut, terdengar oleh Adipati Ponorogo Raden Surabrata. Adipati Ponorogo tersebut dengan cepat menemui keberadaan Paku Buwana II untuk singgah di Kadipaten. Namun Paku Buwana II menolak singgah sebelum mendapat petunjuk firasat dari Allah. Beliau terus melanjutkan perjalanan kearah timur, pada saat perjalanan terjadi hujan kemudian beliau menggunakan payung songsong, tempat dimana Paku Buwana II memakai Payung di namakan dusun **Sepayung**.

Malam hari beliau istirahat dan terlihat wajahnya pucat karena setelah melakukan perjalanan dan kehujanan. Wajahnya seperti mayat maka tempat dimana ia istirahat dinamakan dusun **Selayon**. Di tengah malam beliau melihat cahaya jatuh kedalam sebuah rumah seorang kakek. Setelah itu beliau silaturahmi bertanya perihal cahaya tersebut kepada pemilik rumah yang diketahui bernama empu Salembu. Setelah dijelaskan sang pemilik rumah benar adanya bahwa cahaya tersebut adalah sebuah pusaka. Pusaka itu kemudian diserahkan empu salembu ke Paku Buwana II dan diambilah pusaka tersebut oleh Jeyengrana. Tempat kediaman empu salembu ini kemudian dinamakan **Pulung**.

Paku Buwana II menjelang pagi hari menjalankan Sholat subuh dan mengambal air wudhu di sebuah blumbang yang agak besar seperti segara, kemudian dinamakan dusun **Segaran**. Setelah usai sholat beliau melanjutkan perjalanan ke Bhayangkaki bertemu dengan Kalipa Kusuma di Bhayangkaki, Kakaknya tersebut menyarankan untuk melakukan pertapaan disebuah pohon Sawoo kembar (Lokasinya Utara Pasar Sawoo). Tempat dimana Paku Buwana II dinamakan Sawoo.

Setelah pulang dari Sawoo Paku Buwana II melanjutkan perjalanan kearah barat sampai ke Pesantren Tegalsari. Paku Buwana kemudian sempatkan untuk mendalami ilmu Agama di bawah bimbingan Kyai Ageng Muhammad Besari. Setelah itu, Paku Buwana II kembali melanjutkan perjalanan ditemani oleh santri yang bernama Harun Basyariah ke Kadipaten Ponorogo guna menemui Raden Surabrata.

Raden Surabrata kemudian ikut menghantar Paku Buwana II kembali ke Kartasura ditemani oleh Jayengrana, keponakannya dan Kyai Harun Basyariah melalui suatu tempat yang memiliki banyak Pohon Sambirata kemudian tempat ini dinamakan **Sumoroto**. Perjalanan terus berlangsung kearah barat, sampai waktu menjelang malam kemudian istirahat di sebuah rumah seorang Janda memiliki punuk (Bungkuk) yang dikenal dengan Mbok Randa Punuk. Selama dikediaman Mbok Randa, Paku Buwana II diberi hidangan Jenang.

Paku Buwana II saat makan jenang merasa kepanasan, oleh Mbok Randa Punuk di beri nasehat ***kalau makan dari pinggir, saya nengah saya adhem, nek perang menang***. Perkataan itu kemudian menjadi Firasat Paku Buwana II untuk menghadapi Raden Mas Garendi melalui siasat perang diawali dari pinggir hingga menusuk Jantung pertahanan dan menang. Setelah kembali ke Kartasura, keraton dalam kondisi rusak oleh karena itu keraton pindah ke Surakarta.

Kemenangan melawan Raden Mas Garendi tentu atas bantuan banyak pihak diantaranya atas pengabdian Jayengrana, Mbok Randa Punuk, Kyai Harun Basyariah dan Raden Subrata, atas jasa mereka memperoleh penghargaan dari Raja Kartasura. Mbok Randa Punuk memperoleh piagam keturunannya menjadi Lurah dan dimana desa Mbok Randa tinggal dinamakan desa Perdikan **Menang**, Kyai Harun Basyariah memperoleh payung gawat, Jayengrana menjadi Adipati Pedanten dan Raden Subrata memperoleh Payung Mas.

1.11 RADEN SURADININGRAT SEDA DUMUNG PERANG MELAWAN PANGERAN SAMBER NYAWA

Raden Adipati Suradiningrat I adalah Bupati Ponorogo Kota Lama yang ke 11. Ia merupakan Putra dari Bupati sebelumnya yang tidak lain adalah ayahnya yakni Raden Surabrata. Pada saat menjabat sebagai Adipati Ponorogo Raden Adipati Suradiningrat I didampingi oleh Patihnya yang bernama Patih Tambakbaya atau yang dikenal dengan sebutan Patih *Margo ewuh*. Sebutan tersebut dikarenakan sang Patih memiliki sifat membingungkan, dan memiliki kebiasaan berbicara *ngawur*. Ketika memberi sebuah perintah kepada seseorang, perintahnya selalu membingungkan.

Patih Tambakbaya yang memiliki sifat tidak baik itu membuat ia kurang disukai oleh orang lain, oleh karena itu tidak heran jika lamarannya terhadap putri Raden Adipati Suradiningrat ditolak dengan halus. Penolakan Lamaran terhadap putri Suradiningrat I ternyata menjadi bara api dalam dada Patih Tambakbaya, ia memiliki rencana jahat kepada Raden Suradiningrat I. Ia menyusun sebuah rencana kudeta sang raja dengan cara *Nabok Nyilih Tangan* atau memanfaatkan oranglain yakni demang Rangganiti.

Demang Rangganiti merupakan salah seorang warok yang terkenal sakti di Ponorogo. Ia memiliki banyak murid sehingga banyak disegani masyarakat, namun disisi lain demang Rangganiti memiliki sifat ceroboh, mudah terhasut apalagi jika mendapat sanjungan dari orang lain. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh Patih Tambakbaya untuk membujuk Demang Rangganiti melawan Raden Suradiningrat I dengan memperoleh imbalan kedudukan sebagai Tumenggung.

Patih Tambakbaya dengan hasutan dan imbalan yang dijanjikan kepada Demang Rangganiti maka adu kesakten antara Demang Rangganiti dengan Raden Suradiningrat pun tidak bisa dihindarkan peperangan pun terjadi. Pertempuran sengit kedua belah pihak berlangsung cukup lama yang pada akhirnya Demang Rangganiti dapat dikalahkan oleh Raden Suradiningrat I. Beruntung kudeta tersebut, tidak diketahui oleh Raden Adipati Suradiningrat I siapa dalang yang sesungguhnya dibalik pemberontakan Demang Rangganiti. Sehingga kedudukan Patih Tambakbaya dalam pemerintahan masih selamat. Namun kedudukan Patih Tambakbaya dalam pemerintahan ibarat duri dalam daging, selalu ada riak-riak kecil untuk menghalangi laju pemerintahan Raden Adipati Suradiningrat I sehingga roda pemerintahan Ponorogo berjalan kurang maksimal, tidak berselang dari peristiwa tersebut, Pada suatu hari Ponorogo kedatangan utusan tamu dari Pangeran Adipati Aria Mangkunegaran atau terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Utusan tersebut memberi kabar perihal ajakan berjuang melawan Penjajahan Belanda. Raden Suradiningrat I dengan menyambut dengan senang hati, karena penjajahan yang dilakukan oleh pihak Belanda sangat merugikan rakyat. Untuk mengatasi tersebut, tentu memerlukan dukungan kuat dari Adipati-adipati dari daerah lain untuk

melawan bersama.

Raden Suradiningrat I sebagai salah satu Adipati mendukung penuh Pangeran Sambernyawa, maka sebagai bentuk dukungan tersebut Raden Adipati Suradiningrat I mengutus Patih Tambakbaya untuk membalas surat ajakan Pangeran Sambernyawa dalam menentang pemerintahan hindia Belanda. Bara api dalam dada Patih Tambakbaya masih belum reda untuk menghabisi Raden Suradiningrat I, Perintah Raden Adipati Suradiningrat I untuk membalas surat pangeran Sambernyawa ia manfaatkan untuk mengadu domba kedua belah pihak.

Surat Adipati Suradiningrat I yang berbunyi "*Sampun Samekta Sedaya*" yang artinya sudah siap semuanya, diganti redaksinya oleh Patih Tambakbaya menjadi ajakan berperang "*Sampun Samekta ing Ngayuda*", Surat balasan yang diplitir oleh Patih Tambakbaya membuat kemarahan Pangeran Sambernyawa sehingga timbul perselisihan, timbulah perang catur diantara keduanya. Dari perang catur berkembang menjadi perang fisik yang berkobar dengan sengit. Perang tersebut mengakibatkan Raden Adipati Suradiningrat I meninggal dunia di tangan Pangeran Sambernyawa. Gugurnya Adipati Suradiningrat I dikenang oleh rakyat dengan sebutan Suradiningrat I Seda Dumung.

Menjelang wafatnya Suradiningrat I, Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mangkunegara I menemuinya dengan menunjukan sepucuk surat yang dikirim oleh Patih Tambakbaya yang berisikan ajakan perang. Mengetahui bahwa dirinya telah diadu domba dengan KGPAA Mangkunegaran I, Raden Adipati Suradiningrat I memerintahkan pasukannya mengejar Patih Tambakbaya yang melarikan diri dan memenggal kepala patih tersebut sebagai penebus kesalahan yang dilakukan Patih Tambakbaya. Raden Adipati Suradiningrat I kemudian wafat dan jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Gondoloyo Setana Jenangan. Ia semasa hidup meninggalkan 17 anak yaitu : Ray Sindureja (Istri Adipati Surakarta), Ray Pamongan (Istri Sunan Bagus / Paku Buwana IV), Ray Mangkudipura (Istri Bupati Madiun), Ray Mangkuyuda (Istri Tumenggung Surakarta). Ray Sumajaya (Istri Bupati Nayoko Surakarta), Ray Rantamsari (Istri Adipati Purbonegoro), Ray Selarong (Istri Bupati Nayaka Yogyakarta), Ray Danureja (Istri Patih Dalem Yogyakarta), Ray Jayengrana (Bupati Caruban), Ray Yudonegara (Bupati

Banyumas), Pangeran Suroloyo (Bupati Ponorogo ke 12), R. Tjakramenggala (Bupati Nayoko Tjokramenggalan), R. Suradiningrat II (Bupati Ponorogo ke 13), R. Bratadiwirya (Bupati di Madura), R. Bratanegara (Bupati Polorejo), R. Surayuda (Bupati di Sregat), dan R. Panji Hoedan (Bupati di Jakarta)

1.12 RADEN SURALAYA KESATRIA DI TENGAH KONFLIK KADIPATEN

Raden Suralaya merupakan Adipati Ponorogo kota lama yang ke 12, ia menggantikan kedudukan Adipati sebelumnya yang tidak lain adalah Bapaknya yang bernama Raden Suradiningrat I. Ayahnya meninggal dunia akibat fitnah dari patihnya yang bernama Patih Tambakbaya. Patih Tambakbaya merubah isi surat Suradiningrat I yang aslinya berbunyi sampun *samekta sedaya* menjadi *samekta ing ngayuda*. Akibat dari fitnah tersebut timbulah peperangan yang mengakibatkan terbunuhnya Raden Suradiningrat I oleh Raden Mas Said.

Raden Suradiningrat I setelah wafat, maka kondisi Kadipaten Ponorogo relatif tidak kondusif diantara putra-putra Raden Suradiningrat I. Situasi itu, bergejolak karena diantara putra-putranya ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Kondisi ini pun diperparah dengan kekosongan Kadipaten pasca meninggalnya Raden Suradiningrat I. Banyak putra-putra Suradiningrat pun tergiur mengisi kedudukan ayahnya menjadi Adipati Ponorogo.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Raja Surakarta Sri Sunan Paku Buwana III mengirim utusan Raden Tumenggung Wiryadiningrat yang tidak lain adalah Putra Mantu Paku Buwana III. Raden Tumenggung Wiryadiningrat diutus menata pemerintahan Kadipaten Ponorogo Kota Lama. Namun kedatangan Wiryadiningrat di Kadipaten Ponorogo selama tiga bulan belum membuahkan hasil signifikan. Dugaan Penulis kedatangan Raden Tumenggung Wiryadiningrat menjadi sebuah dilematis prasangka bagi anak-anak Raden Suradiningrat I yang dikhawatirkan menggantikan kedudukan Ayahnya.

Raden Tumenggung Wiryadiningrat untuk menghindari prasangka itu, ia menempati kediaman di dusun Temanggungan sekarang masuk wilayah Kelurahan Mangkujayan. Efek dari kedatangan Raden

Tumenggung Wiryadiningrat di dusun Tumenggungan ini ternyata juga diikuti oleh masyarakat lainnya, yaitu dengan mendirikan rumah-rumah disekitar Raden Tumenggung Wiryadiningrat, maka dari itu dusun Temunggungan sekarang banyak peninggalan rumah kuna, semakin ramainya kondisi tersebut, seiring pula dengan kebutuhan masyarakat sekitar terkait kebutuhan primer sandang pangan.

Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer dengan berbelanja di suatu tempat yang strategis yang mana lama kelamaan tempat itu menjadi pasar yang dinamakan pasar mernung (Sekarang pasar legi), karena kondisi kota lama semakin tidak tentram maka banyak masyarakat yang pindah ke arah barat tepatnya disekitar area Pasar Mernung. Paku Buwana III melihat situasi yang semakin lama semakin memprihatinkan maka mengirim pangeran Purbanegara untuk membantu tugas Raden Tumenggung Wiryadiningrat. maka langkah yang diambil kedua utusan dari Raja Surakarta tersebut adalah mengumpulkan semua anak-anak Raden Suradiningrat.

Diantara anak-anak Suradiningrat yang pantas menggantikan kedudukan ayahnya ada tiga yaitu Raden Bratanegara, Raden Suralaya dan Raden Kertanata, maka Raden Purbanegara kemudian mengatur putra-putri Raden Suradiningrat dengan menempati tempat-tempat strategis guna menghindari perebutan kekuasaan. Diantara putra-putrinya yang menjadi pembesar adalah Raden Suralaya ditetapkan sebagai Adipati Ponorogo Kota Lama menggantikan Ayahnya, Raden Bratadiningrat menjadi Adipati Polorejo, Hudan Sunyoto Adipati di Jakarta, Suroyuda di Srengat, Yudanegara sebagai Adipati Banyumas serta puti-putrinya banyak diperistri oleh Pejabat dilungkup Keraton Surakarta dan Jogyakarta.

Atas kebijakan Raden Tumenggung Wiryadiningrat dan Pangeran Purbanegara tersebut banyak putr-putri Suradiningrat merasa senang dan puas. Sehingga kondisi Ponorogo relatif aman dan tentram. Setelah kondisi aman maka Pangeran Purbanegara kembali ke Surakarta sedangkan Raden Tumenggung Wiryadiningrat tetap di Ponorogo menjadi Wedana di Ponorogo (Versi lain Tumenggung Wiryadiningrat adalah Bupati Ponorogo hal tersebut merujuk pada tulisan yang berada di Makam beliau di Kelurahan Tamannarum). Kelurahan Tamanarum dulu

merupakan Desa Perdikan atau bebas pajak Pemerintahan karena atas Jasa Tumenggung Wiryadiningrat.

Sementara setelah ditetapkan menjadi Adipati Ponorogo, Raden Suralaya sebagai Adipati Ponorogo menjabat tidak berapa lama hal ini disebabkan oleh gejolak politik lokal yang masih ada riak-riak kecil, maka untuk menjaga keutuhan Kadipaten Ponorogo ia rela pindah menempati posisi baru sebagai Adipati di Jakarta sampai ia meninggal dunia dan Jenazahnya dimakamkan di daerah Mangga Dua Jakarta. Adipati Suralaya setelah tidak menjabat Adipati Ponorogo diganti dengan Adiknya yang bernama Raden Suradiningrat II. Menurut perkiraan Penulis Raden Suralaya ini menjabat sekitar tahun 1780-1795 M.

1.13 RADEN SURADININGRAT II ADIPATI TERAKHIR KOTA LAMA

Raden Suradiningrat II merupakan putra dari Raden Suradiningrat I, ia merupakan Adipati terakhir Ponorogo Kota Lama atau yang ke Tiga belas Kadipaten Kota Lama. Ia menjabat Adipati sekitar tahun 1795-1837. Tahun tersebut berdasarkan analisis penulis bahwa pada saat Adipati Suradiningrat II menjabat terjadi perang Diponegoro pada tahun 1825. Pada saat meletusnya perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro bergerilya kedaerah-daerah bersama Panglimanya yang berasal dari Madiun Setot Ali Basha Prawirodirja, seorang pemuda berusia 18 tahun sebagai Jendral gerilya melawan Belanda.

Pangeran Diponegoro seusai dari Madiun melanjutkan perjalanan menuju kearah selatan tepatnya di Kabupaten Polorejo, dimana Kabupaten Polorejo saat itu dipimpin oleh Adipati Bratanegara yakni adik dari Raden Suradiningrat II. Saat di Polorejo Adipati Bratanegara turut berpartisipasi mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro dengan menjadi salah satu donatur untuk melawan Belanda. Saat di Polorejo, Pangeran Diponegoro singah berapa saat di Kadipaten. Ternyata, keberadaan Pangeran Diponegoro di Polorejo diketahui Residen Belanda di Ponorogo, akibat dari itu Kadipaten Ponorogo diserang oleh Belanda.

Kadipaten Polorejo hancur di bombar dir oleh pasukan Belanda, sekarang Kadipaten tersebut digunakan sebagai Sekolah Dasar Polorejo. Masih terdapat peninggalan Bangunan Kadipaten berupa ris yang membentang di lapangan sekolah. Beruntung Adipati Bratanegara beserta Pangeran Diponegoro dapat menyelamatkan diri dengan mengendarai kuda terlebih dahulu sebelum Belanda menghancurkan Kadipaten.

Raden Bratanegara untuk memecah konsentrasi pemerintahan Hindia Belanda, maka beliau lari ke arah selatan wilayah Kauman. Sedangkan Pangeran Diponegoro meneruskan Gerilya ke arah selatan tepatnya di Baosan Kidul Ngrayun. Pada saat berada di desa Mangkujayan Raden Brotonegoro sempat di halau oleh prajurit Belanda, di Tempat tersebut sempat terjadi perlawanan sengit. Daerah di Mangkujayan sebagai tempat genjatan senjata tersebut dinamakan Dusun Prajurititan. Beruntung Raden Bratanegara dapat meloloskan diri sampai ke arah dengok belok ke barat sampai ke sebuah gunung Gombak.

Adipati Bratanegara saat berada di gunung Gombak dengan mengendarai kudanya. Ia tertembak dan meninggal dunia dan oleh Belanda di makamkan di atas gunung gombak. Mengetahui bahwa Adipati Bratanegara telah wafat, maka Pihak Belanda melarang masyarakat naik ke atas gunung Gombak. Larangan tersebut apabila dilanggar oleh masyarakat, maka akan memperoleh konsekuensi hukuman dari pihak Belanda. Larangan tersebut, sebagai upaya Belanda menutupi kondisi Adipati Bratanegara yang telah wafat guna agar tidak memicu kemarahan rakyat. Tempat dimana desa Gunung Gombak berada kemudian dinamakan Desa Larangan masuk wilayah Kecamatan Kauman.

Sementara Ponorogo kota lama kondisinya relatif lebih aman dibandingkan dengan Kadipaten Polorejo. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan Raden Suradiningrat II lebih kooperatif dengan pemerintah Belanda, berbeda dengan Kadipaten Polorejo yang turut menentang Pemerintahan Hindia Belanda, maka Kadipatennya di bumi hanguskan karena tidak menurut Pemerintahan Hindia Belanda dan Mendukung Perjuangan Pangeran Diponegoro.

Hancurnya Kadipaten Polorejo ini ternyata juga berdampak pada pemerintahan Ponorogo Kota lama, seiring dengan hangusnya Kabupaten Polorejo, Kadipaten Kota Lama juga menjadi pusat

pemerintahan terakhir sebelum Kadipaten Polorejo dan Kadipaten Kota Lama *dimarger* menjadi satu pemerintahan baru berpindah pusat kekuasaan di Kota Tengah atau sekarang ini. Jadi Kadipaten Ponorogo Kota lama terakhir dipimpin oleh Adipati Suradiningrat II.

Adipati Suradiningrat II ini menikah selama 6 kali. Dari istri pertama yang berasal dari Kadilungu memiliki tiga putra yang bernama Raden Ngabei Bratanegara, Panji Natawijaya, dan Raden Ayu Wanaprawirareja. Istri Kedua dari Surakarta memiliki empat anak yakni Suradiningrat III menjadi Adipati Magetan, Mertahadinegara Adipati Ponorogo kota Baru, Sasrakusuma, Sumadiwirya.

Istri Ketiga bernama Ismawati memiliki satu anak yang bernama Panji Suralaya. Istri keempat Dayawati memiliki tiga anak yang bernama Surabrata, Wiryasaputra, Wirabrata. Istri kelima menikah dengan Pujawati memiliki satu anak yang bernama Sumabrata dan Istri yang keenam bernama Raden Ayu Regu memiliki anak bernama Danakusuma. Raden Suradiningrat II ini meninggal pada tahun 1837 dan dimakamkan di pesarean Gondoloyo masuk desa Setana. Dimana desa Setana masuk wilayah desa Perdikan, yakni desa yang bebas dari Pajak Pemerintah.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB II
BUPATI PONOROGO KOTA
BARU/TENGAH

2.1 BUPATI MERTAHAINEGARA SANG FOUNDING FATHER KOTA BARU

Raden Barata atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Mertohadinegara adalah Bupati Ponorogo pertama kota tengah (Sekarang) setelah perpindahan kota lama menuju kota sekarang ini. Raden Mertohadinegara merupakan anak ke 11 dari 25 bersaudara dari seorang ayah yang bernama Raden Jayengrana II seorang Bupati Pedanten yang berasal dari Ponorogo bagian selatan. Bupati Raden Jayengrana II pernah dipindah tugaskan menjadi Bupati Caruban pada tahun 1785.

Perpindahan tersebut, juga diikuti oleh sebagian para keluarga, salah satunya adalah Raden Barata muda. Raden Barata pada masa muda belajar mengelola pemerintahan langsung kepada ayahnya Raden Jayengrana II, Setelah ayahnya wafat pada tahun 1805 Raden Barata menggantikan kedudukan ayahnya sebagai bupati Caruban. Raden Barata menikah dengan putri Raden Suradiningrat II seorang Bupati Ponorogo *Kutha Timur* atau sekarang terkenal dengan sebutan kota lama sekarang ini, yang tak lain adalah keturunan Raden Batoro Katong.

Pada tahun 1837 masa-masa kelabu bagi pemerintahan Ponorogo, hal ini disebabkan karena banyak kehilangan tokoh-tokoh daerah dikarenakan meninggal dunia di antaranya Raden Suradiningrat II bupati *Kutho Timur* (Sekarang: Pasar Pon) atau tepatnya mertua Raden Mertohadinegara, tidak berselang lama disusul oleh Raden Tumenggung Bupati Wedana Mernung pun demikian. Sebagai langkah untuk mengisi kekosongan pemerintahan, Pemerintah Belanda kemudian menarik Raden Barata dari Bupati Caruban untuk menjadi Bupati Ponorogo, hal ini dikarenakan Raden Barata masih memiliki trah Katongan dan Jayengranan, yang keduanya dahulu merupakan orang-orang yang berjasa ketika babad Ponorogo.

Raden Barata di Ponorogo lebih dikenal oleh masyarakat Ponorogo dengan Sebutan Raden Mertohadinegara, ketika mendapat amanah menjadi Bupati Ponorogo. Raden Mertohadinegara memindahkan pusat pemerintahan dari *kutha timur* menuju sekarang ini, Perpindahan tersebut pada tahun 1837 atau dengan sinegkalan "*Wiku Tri anggesti Tunggal*" Sebagai seorang bupati baru di lokasi baru, maka ia membangun berbagai fasilitas tata pemerintahan.

Pusat pemerintahan yang dipilih adalah kelurahan Mangkujayan, dipilihnya kelurahan Mangkujayan bukan berarti tidak ada alasan. Alasan utamanya adalah faktor strategis yang mana sebagai jalur perdangan antar wilayah yang meliputi sebelah selatan Kadipaten Pacitan, sebelah Barat Kabupaten Wonogiri, Sebelah utara, Kadipaten Madiun dan Magetan dan sebelah timur Kadipaten Trenggalek. Untuk memudahkan akses tersebut maka Raden Mertahadinegara membuat jalan lingkaran kota yaitu Jl. Diponegoro, Jl Urip Sumoharjo (dulu Sriwijaya). Jl Ahmad Dahlan (dulu Hayam Wuruk), Jl. Sultan Agung. Jl.Jend Basuki Rahmad, Jl.A.Yani. Jl. Gatot Subroto dan Alun-alun.

Raden Mertahadinegara juga membuat kebijakan penghijauan jalan dengan menanami Pohon Asem di sepanjang pinggir Jalan sehingga jalan menjadi rindang, dan pada setiap perempatan jalan terdapat gardu pengamanan atau yang disebut dengan *gerdon*, *gerdon* ini selain sebagai tempat memantau keamanan wilayah juga berfungsi sebagai tempat istirahat bagi siapapun yang melakukan perjalanan.

Selain itu, untuk membangun perekonomian masyarakat, beliau juga membangun pasar ditempat strategis seperti pasar Tambakbayan, pasar Tajug, dan Pasar Alun-Alun. Kebijakan ini, sangat penting karena salah satu roda ekonomi yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat pada waktu itu terletak pada aspek perdagangan. Fasilitas lain yang dibangun antara lain Masjid Agung Kauman pada tahun 1843, Komplek rumah dinas bupati, pringgitan (sekarang diganti bangunan baru), Paseban, masjid Suranatan (selatan sasana praja) Kantor asisten residen (Sekarang SMP 1 Ponorogo, Rumah Jaksa (Sekarang digunakan Bank BNI 46), Rumah Tahanan Negara yang lokasinya berada di depan Bank BNI 46 sekarang ini serta pembangun rumah sakit yang lokasinya di Jalan Batoro Katong tepatnya kantor Pembatik, namun tidak berselang lama di pindahkan ke dusun Jarakan Banyudono.

Raden Mertahadinegara menjabat bupati Ponorogo selama 17 tahun yaitu mulai tahun 1837 sampai dengan 1854 karena pada tahun itu pula Bupati yang terkenal dengan *Founding father* kota baru ini meninggal pada hari Selasa Pon tanggal 10 Agustus 1854 dan disemayamkan di Pemakaman desa Tajug Siman. Berkat Jasa dan Pengorbanan selama menjadi Bupati maka desa Tajug dijadikan desa Perdikan, atau desa yang

terbebas dari segala pajak Pemerintah dan status tersebut dihapus oleh pemerintah pada tahun 1964.

2.2 BUPATI SASRAKUSUMA SEBAGAI PATIH PERTAMA KOTA TENGAH

Raden Mas Tumenggung Sasrakusuma merupakan Bupati kedua Ponorogo Kota Tengah atau sekarang ini. RMT Sasrakusuma merupakan anak dari Raden Suradiningrat II (Bupati Terakhir Kota Lama) dari hasil pernikahan dengan putri Surakarta. Semasa muda Sasrakusuma sudah terbiasa hidup dalam lingkungan bangsawan, Ia menikah dengan anak pertama Bupati Sumoroto ke II, yang tidak lain adalah menantu Raden Sumanegara. Jadi antara Bupati *Kutho Etan* yakni Raden Suradiningrat II dengan Bupati *Kutha Kilen* Sumoroto Raden Sumanegara merupakan besan. Dugaan penulis, hal tersebut, dikarenakan untuk meredam gejolak pada waktu itu, karena kondisi Ponorogo pada waktu itu relatif tidak stabil hal ini diperburuk dengan masuknya belanda di Ponorogo pada tahun 1836 yang dipimpin oleh Aries Robert Andriese.

Kedatangan Belanda di Nusantara membawa tiga misi utama yang terkenal dengan 3 G (*Gold, Glory, dan Gospel*), *Gold* merupakan upaya Belanda dalam merebut perdagangan asia dengan sistim taman paksa, sedangkan *Glory* upaya menghancurkan negara-negara Islam dan *Gospel* yaitu menyebarkan agama kristen. (Lihat *Encyclopædie van Nederlandsch-Indië. Jilid IV. Zending*. Hlm. 829) Kebijakan Belanda tersebut, juga diberlakukan ke daerah-daerah seperti di Ponorogo.

Di Ponorogo Belanda, menerapkan misi tersebut antara lain di bidang *Gospel* yakni penyebaran kristen dimulai di desa Trenceng Jenangan pada tahun 1850⁴ yang dibawa oleh Pendeta berkebangsaan Belanda yang bernama Jellesma yang mukim di desa ujung timur Jenangan ini. (Akkharen, 1995)

Selain itu dalam bidang *Gold* adalah tanam paksa. Belanda membuat peraturan kultur stelsel, yakni sebuah peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk menanam kopi atau *tom*. Untuk

⁴ Philip Van Akkharen 1995. Dewi Sri dan Kristus, Hal 164. Jakarta. Gunung Mulia

mendukung program tersebut, Belanda juga membuat pabrik kopi sebagai penampungan hasil rakyat dengan membuat pabrik di beberapa tempat yang meliputi desa Pondok dan Japan sekarang masuk wilayah Babadan, selain itu juga di desa Siman dan desa Jalen Balong. Bagi siapa saja yang menolak perintah Belanda tersebut mendapat hukuman yang tegas.

Dalam bidang *Glory* pemerintah Belanda ingin menggabungkan beberapa kabupaten di Ponorogo yang meliputi Kabupaten *Kutha Kilen* Sumoroto, Kabupaten *Kutha* timur (Lama) kabupaten Polorejo⁵ dan Kabupaten Pedanten. Diantara empat kabupaten di Ponorogo tersebut yang menentang keras adalah kabupaten Sumoroto.

Kebijakan Belanda tersebut ditentang oleh Bupati Sumoroto. Karena dengan penggabungan tersebut akan memicu kemarahan rakyat, dan membuat kekacauan negara, selain itu dengan tanam paksa rakyat akan kekurangan pangan dan tentu akibat dari peraturan Belanda yang semena-mena bisa berakibat menyengsarakan rakyat. Ketika Belanda mengetahui sikap Bupati Sumanegara ini, ia dibawa ke Surabaya oleh Belanda untuk mendapatkan hukuman dengan pengasingan ke Makasar, namun sebelum hukuman tersebut terlaksana Bupati Sumanegara meninggal dunia dan di makamkan di Ngampel Surabaya.

Untuk meredam kekacauan di Ponorogo pada waktu itu, dugaan penulis salah satunya adalah dengan menikahkan Raden Tumenggung Sasrakusuma dengan putri Bupati Sumoroto, sehingga rencana pembentukan Kabupaten Ponorogo kota baru dapat berjalan dengan lancar, hal ini terbukti ketika Penggabungan Kabupaten-kabupaten tersebut Patih pertamakali di Kota Baru adalah Raden Tumenggung Mas Sasrakusuma mendampingi kakaknya Raden Mertahadinegara yang menjabat sebagai Bupati Pertama Kabupaten Ponorogo kota baru.

RMT Sasrakusuma menjabat sebagai patih Ponorogo selama 17 tahun dimulai sejak berdirinya Kabupaten Ponorogo Kota Baru pada tahun 1837 sampai dengan 1854. Duet kakak beradik terbukti mampu membawa perubahan Ponorogo kota baru lebih maju, hal ini ditandai

⁵ Kabupaten Polorejo yang dipimpin oleh RMT Bratanegara karena membantu melindungi Pangeran Diponegoro kabupaten Polorejo dihancurkan oleh Belanda.

dengan banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh duet kepemimpinan kakak beradik ini.

Pada tahun 1854 kakaknya Raden Tumenggung Sasrakusuma yang tidak lain menjabat Bupati Ponorogo yakni Raden Mertahadinegara meninggal dunia. Maka untuk mengisi kekosongan Pemerintah pada waktu itu, Raden Tumenggung Sasrakusuma yang menjabat sebagai Patih menggantikan kedudukan kakak menjadi Bupati Ponorogo. RMT Sasrakusuma menjabat Bupati Ponorogo ke dua selama dua tahun dan setelah meninggal dunia dimakamkan di pesarean Tajug yang lokasi dekat dengan makam kakaknya Raden Mertahadinegara.

2.3 BUPATI TJAKRANEGARA I BUPATI TERLAMA



(Gambar 2.1: Bupati RMT Tjakranegara, Dokumen Ponorogo)

Tjakranegara adalah Bupati Ponorogo yang 15 atau yang ke 3 setelah perpindahan pusat pemerintahan dari kota lama menuju kota baru. Ia besar dalam lingkungan keluarga ulama dan bangsawan. Ayahnya Kyai Kasan Besari salah seorang Pemimpin Pesantren Tegalsari Jetis Ponorogo, sementara ibunya bernama Raden Ayu Murtosiah salah seorang putri Raja Kasunanan Hadiningrat Surakarta Paku Buwana ke III.

Tjakranegara sejak kecil telah belajar agama kepada Ayahnya di Pesantren Tegalsari, tradisi keilmuan di Pesantren membuat pribadi Tjakranegara menjadi pribadi cerdas, santun dan menghargai banyak

kalangan sehingga banyak disukai orang. Masa mudanya Tjakranegara disibukan dengan mengkaji al Qur'an di Pesantren sekaligus mengamalkannya keberbagai tempat sehingga Tjakranegara muda sudah banyak dikenal oleh Masyarakat.

Tjakranegara setelah dewasa mendapatkan amanah menjadi Bupati menggantikan Bupati Sasrakusuma. Maka dalam kepemimpinan Bupati Tjakranegara nilai-nilai Islam diterapkan dalam kebijakan-kebijakan politiknya. Salah satu kebijakannya adalah membangun masjid Agung Ponorogo yang semula adalah Masjid yang dirintis oleh Bupati Mertahadinegara. Kebijakan ini dirasa sangat penting karena Masjid sebagai tempat bertemunya ummat muslim. Ia juga memimpin pembuatan bedug untuk masjid agung dan Masjid Jami Tegalsari, kayu Jati yang digunakan sebagai bahan bedug diambil dari Hutan Selentuk Pulung.

Bedug tersebut, pada waktu itu memiliki peran sangat penting sebagai media komunikasi masyarakat sebagai tanda tiba waktu sholat. Selain itu, Tjakranegara juga dikenal oleh masyarakat sebagai seorang ulama. Ia juga aktif memakmurkan masjid Agung, hampir setiap hari melaksanakan sholat di masjid Agung karena lokasi rumah Bupati Tjakranegara hanya berjarak 200 meter, tepatnya sebelah selatan alun-alun Ponorogo.

Bupati Tjakranegara, selain membangun jiwa masyarakat Ponorogo, juga membangun dari sisi jasmaniahnya dengan membangun sarana olahraga pemandian Bale Kambang di dusun Ngembak Siman Ponorogo. Lokasinya dari Pusat pemerintah berjarak 3 km kearah timur dari Rumah kediaman Bupati Tjakranegara. Dari dua unsur tersebut diharapkan masyarakat Ponorogo memiliki jiwa rohani dan jasmani menjadi lebih kuat.

Pada era Bupati Tjakranegara masyarakat Ponorogo pada waktu itu kondisinya sangat makmur, *gemah ripah loh jinawi*, dari pemerintah belanda pernah mendapat anugrah penghargaan bintang yakni *Gouvernement Goud Ster Orde Van Orange Naasau Koninklyke Nederlancshe Leger (G.G.St.0.0.N.K.N.L)*, dari keraton mendapat payung emas sebagai simbol mengayomi dan mensejahterakan masyarakat, kemudian mendapat sebutan dari masyarakat Gusti Lider atau Gusti Sepuh.

Bupati Tjakranegara menjabat sebagai Bupati Ponorogo selama 26 tahun, atau bupati terlama di Ponorogo kota baru yakni sejak tahun 1856 sampai dengan 1882 sebelum meninggal ia pernah berwasiat agar dimakamkan di belakang masjid Jami Agung. Ia wafat pada tanggal 20 Maret 1900 dan di makamkan di pemakaman Purnomosari tepatnya belakang Masjid Agung Kauman Ponorogo. Berkat jasa dan perjuangannya selama menjadi Bupati Ponorogo, Masjid Agung yang telah didirikan oleh Tjakranegara, oleh generasi penerus di kemudian hari Masjid Jami Kauman dinamakan sebagai Masjid Agung Tjakranegara.

2.4 BUPATI TJAKRANEGARA II SANG PENDIDIK

Raden Mas Tumenggung Tjakranegara II nama kecilnya adalah Imam Buchori Tjakraamijaya. Ia lahir dan besar di kota Reyog Ponorogo. Ia dari keluarga santri dan bangsawan. Tinggal di rumah keprabon jalun alun-alun selatan Pakunden Ponorogo. Sebagai putra keluarga bupati, ia mengenal tata kehidupan dan pergaulan di kalangan masyarakat luas. Ia sebagai santri, sejak kecil dididik taat beragama oleh kedua orang tuannya, RMT Tjakranegara I dan R. Ayu Dadas. Apalagi ayahnya menjabat sebagai bupati Ponorogo ke III dan sekaligus ulama yang dikenal luas oleh masyarakat, kakeknya Kyai Kasan Besari merupakan pemimpin pondok Pesantren Tegalsari. Kultur keluarga pesantren, sangat jelas pula turut membesarkan Imam Bukhori, yang secara langsung memberi pengaruh kehidupannya dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pendewasaannya. Peran itu sangat berarti bagi pembentukan kepribadiannya.

RMT Tjakranegara I dan R. Ayu Dadas tentu menjadi pendidik pertama dan utama bagi Imam Bukhori Tjakraamijaya. Orangtuannya telah menanamkan pendidikan agama kepada putra-putrannya dengan baik, termasuk Imam Bukhori Tjakraamijaya, maka tidak heran ketika dewasa banyak putra-putrannya yang menjadi ulama maupun bangsawan yang berhasil, Di antaranya Tjakradipraja menjabat sebagai bupati Bojonegoro, Tjakraamisena ayah HOS Tjakraaminoto sebagai wedana (Di atas Camat) kleco Madiun, Ibnu Hasan Tjakradipura sebagai Patih Ponorogo dan Imam Buchori Tjakraamijaya meneruskan kedudukan ayahnya menjabat sebagai bupati Ponorogo.

Imam Bukhori Tjakraamijaya setelah diangkat menjadi bupati Ponorogo pada tahun 1882 dengan gelar RMT Tjokronegoro II atau dikenal dengan sebutan Gusti Kanoman, pergantian bupati ini pada awalnya menjadi gejolak di masyarakat karena Imam Buchori Tjakraamijaya merupakan anak ragil ketujuh, sedangkan seharusnya yang menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Bupati pada waktu itu adalah kakaknya yang bernama Ibnu Hasan Tjakradipura yang menjabat sebagai Patih Ponorogo, namun ternyata Ibnu Hasan Tjakradipura mendapat penolakan dari pemerintah Belanda karena Ibnu Hasan Tjakradipura dikenal selalu menentang kebijakan Belanda, sehingga RMT Tjakranegara I mengusulkan Imam Bukhori Tjakraamijaya sebagai penerus bupati Ponorogo dan kakaknya tetap menjabat sebagai Patih.

Selang dua tahun kepemimpinan RMT Tjakranegara II atau tepatnya pada tanggal 15 September 1885, Ponorogo terjadi kekacauan di wilayah kecamatan Pulung, tepatnya didesa Patik. Kekacauan yang dipimpin oleh lurah patik Wiryadikrama dan Raden Martareja ini membakar gudang kopi milik Belanda. Kekacauan ini dilatar belakangi oleh beban pajak terlalu tinggi dan monopoli hasil tanaman kopi yang harus dijual murah ke penjajah. Kejadian tersebut, di catat oleh sejarawan UI Onghokam, Ph.D dalam bukunya yang berjudul Rakyat dan Negara sebagai pemberontakan patik. Dengan pemberontakan tersebut, Belanda menjadi marah, untuk meredam gejolak yang lebih besar maka belanda memerintahkan Bupati Tjakranegara II menangkap pelaku, ketika lurah patik ditangkap ternyata diketahui dalang dibalik pemberontakan adalah kakaknya Ibnu Hasan yang menjabat sebagai Patih, kemudian akibat dari itu Patih Ibnu Hasan dipindah tugas ke Gresik oleh Belanda.

Berkat keberhasilan RMT Tjakranegara II dalam meredam gejolak tersebut, pemerintah menghadiahkan emas kepada Bupati Tjakranegara II. Pasca peristiwa tersebut kondisi relatif kondusif salah satunya adalah terlaksananya Program Bupati Tjakranegara II di bidang pendidikan. Program ini merupakan program utama dalam membangun masyarakat dengan budaya keilmuan untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan.

Wujud program bupati pada waktu itu mendirikan sekolah-sekolah di Ponorogo dimulai pada tahun 1900 berdirinya SD Kepatihan,

SD Brotonegaran pada tahun 1901, SD Banyudono pada tahun 1903, SD Mangkujayan pada tahun 1904, SD Bangunsari tahun 1905 dan SD *ongko loro* yang berada di desa-desa pada tahun 1914. Atas dasar kebijakan bupati tersebut, Bupati Tjakranegara II mendapat sebutan Sang Pendidik, karena usaha dan upayanya dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan.

Bupati Tjakranegara II menjabat selama 12 tahun, yakni periode 1882 sampai dengan 1896. Beliau wafat pada tahun 1919 dan di makamkan di pesarean Purnamasari belakang masjid Agung Ponorogo.

2.5 BUPATI SASRAPRAWIRA TERSINGKAT MEMIMPIN PONOROGO

Raden Tumenggung Sasraprawira merupakan bupati Ponorogo ke 5 kota tengah atau kota sekarang ini. Ia sebelumnya menjabat sebagai Patih di Kabupaten yang terkenal dengan sebutan 1001 goa yakni Pacitan. Ketika menjabat sebagai Patih di Pacitan, Bupati Pacitan pada waktu itu di Pimpin oleh Raden Adipati Tjakranegara II (Berdasarkan Surosilah Tegalsari saking Pajtitan yang menjabat Bupati Patjitan adalah Tjakranegara III sedangkan menurut Daftar Bupati Patjitan adalah Tjakranegara II) atau tepatnya putra Tjakranegara I yang menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Jadi antara Bupati Patjitan dan Bupati Ponorogo, yaitu Raden Mas Adipati Tjakranegara II dan Raden Mas Tjakranegara III adalah saudara kakak beradik putra dari Raden Mas Tumenggung Tjakranegara I.

Raden Tumenggung Sasraprawira terkenal dengan segudang pengalaman. Ia memiliki pengalaman panjang di dunia Pemerintahan yang ia tekuni. Selain mendampingi Bupati Tjakranegara III sebagai patih kabupaten Patjitan, Ia juga memiliki trah darah priyayi yang diwarisi oleh keluarganya yang menjabat sebagai demang Punggul. Jadi kultur keluarga birokrasi sudah tidak asing bagi bupati Sasraprawira. Setelah sekian lama menjabat sebagai Patih di Pacitan, ia mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk di pindah tugaskan menjadi Bupati Ponorogo.

Di Ponorogo, Ia menggantikan kedudukan Bupati Ponorogo yang ke 4 yakni RMT Tjakranegara II yang telah memasuki masa pensiun pada tahun 1914. Jadi, R. Sasraprawira merupakan bupati Ponorogo yang ke 5 setelah dilantik dan ditetapkan oleh pemerintah pada waktu itu. Bupati

Sasraprawira merupakan putra kelahiran asli dari Kabupaten Trenggalek, Ia diangkat menjadi Bupati Ponorogo pada tahun 1914. Setelah dilantik ia tinggal di rumah dinas Ponorogo, belakang Pringgitan yang dulu digunakan oleh bupati sebelumnya.

Biasanya setelah dilantik menjadi Bupati merupakan masa-masa indah “bulan madu” bagi seorang kepala daerah dengan pengenalan program kerja, visi, misi dan menjalin sosialisasi dengan masyarakat Ponorogo secara lebih luas. Namun tidak demikian bagi Raden Sosraprawira karena suatu hal, kehendak Allah berkata lain. Raden Sasraprawira tepat menjabat selama tujuh hari di Ponorogo Ia di panggil oleh Allah atau meninggal dunia, sehingga programnya banyak yang belum terlaksana.

Kepergian Raden Sasraprawira kepada Allah ini banyak membuat masyarakat Ponorogo belajar atas kepergian bupati baru di Ponorogo. Bahwasanya kematian pasti datang dimanapun kalau sudah datang waktunya maka tidak ada yang bisa menundanya atau memajukan walaupun sedetikpun. Siapapun itu, tidak melihat kedudukan, maupun jabatan. Jika Allah berkendak semuanya bisa terjadi karena manusia didunia pasti akan mengalami kematian.

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan.” Surat al Ankabut:57. Jadi setiap makhluk bernyawa yang hidup di muka bumi ini ditakdirkan untuk mati tidak memandang itu bupati maupun pejabat tinggi, muda atau tua, kaya atau miskin. Semuanya tanpa terkecuali.

Kepergian Raden Sasraprawira tersebut, tentu menyisakan banyak kesedihan bagi masyarakat Ponorogo dengan kepergiannya yang sangat “mendadak”. Namun maut tidak bisa diajak kompromi, oleh karena itu kematian menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi yang masih hidup. Dan salah satu dari pelajaran dari kematian adalah sebagai penasehat terbaik untuk semua yang masih hidup. Nasehat untuk lebih sadar akan tiba giliran kita yang pasti akan datang sehingga mempersiapkan kematian merupakan orang yang cerdas sebagaimana Hadist Riwayat Ibnu Majah.

“Secerdik cerdik manusia ialah yang terbanyak ingatannya kepada kematian serta yang terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdik dan mereka akan pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia dan akhirat”

Kepergian Raden Sasraprawira yang “mendadak” ketika menjabat bupati Ponorogo pada waktu itu benar-benar menjadi “viral” di masyarakat yakni menjadi bupati tersingkat memimpin Ponorogo, Ia setelah wafat dimakamkan di daerah asalnya yakni di desa kamalon, kecamatan durenan kabupaten Trenggalek.

2.6 BUPATI TJAKRAHADINEGARA SANG SENIMAN

Raden Tumenggung Tjakrahadinegara merupakan Bupati Ponorogo ke 6 kabupaten Ponorogo, ia menggantikan kedudukan Bupati terdahulu yakni Raden Sasraprawira yang meninggal dunia pada tahun 1914. Raden Tjakrahadinegara semula ia menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Tulungagung periode 1902 sampai 1907. Pengalaman sebagai bupati Tulungagung selama 5 tahun tentu menjadi guru terbaik bagi Raden Tjakrahadinegara dalam mengembangkan kabupaten Ponorogo lebih maju.

Bupati Tjakrahadinegara berupaya dalam memajukan masyarakat Ponorogo dengan berbagai cara. Antara lain membuat perkumpulan kesenian wayang orang, ketertarikan ini didasari karena bupati yang akrab dengan sebutan Raden Tjakra ini juga seorang ahli di bidang seni karawitan dan seni tari. Apalagi secara sosiologis masyarakat Ponorogo terkenal sebagai gudangnya penari, utamanya seni tari Reyog.

Bakat Bupati dalam bidang seni ini, kemudian diwujudkan dengan mendirikan perkumpulan di beberapa tempat, bahkan ada salah satu perkumpulan yang anggota kelompoknya dari etnis cina yang nama kelompoknya disebut Wan Hien. Dari setiap perkumpulan tersebut, diadakan semacam perlombaan. Kelompok yang terbaik pada waktu itu dimenangkan dari desa Temanggung.

Selain itu, program yang dilakukan oleh bupati Tjakrahadinegara adalah meneruskan program pemerintahan terdahulu yaitu program Bupati Tjakranegara II dalam bidang pendidikan. Jika Bupati

Tjakranegara II merintis berdirinya sekolah-sekolah dasar di perkotaan, maka Bupati Tjakrahadinegara merintis berdirinya sekolah di wilayah kawedanan atau kecamatan di Ponorogo.

Program tersebut, sebagai upaya pemerataan pendidikan bagi rakyat agar mudah dijangkau bagi masyarakat sehingga kemajuan rakyat dapat direalisasikan dengan cepat tanpa harus pergi ke pusat. Kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh rakyat, banyak masyarakat yang antusias terhadap program ini. Bupati Tjakrahadinegara paham betul, sebuah kemajuan rakyat dapat dicapai dengan pendidikan.

Bupati Tjakrahadinegara untuk mewujudkan itu, beliau selalu aktif di masyarakat dengan berbagai kegiatan baik melalui pendidikan maupun dunia kesenian. Melalui dunia kesenian sebagai upaya pendekatan kepada rakyat dengan menyampaikan pentingnya pendidikan. Hal ini dikarenakan kesenian merupakan cara efektif dan banyak diminati oleh masyarakat. Jadi hubungan Bupati dengan rakyat sangatlah dekat.

Pun ketika awal berdirinya sarekat Islam yang didirikan oleh HOS Tjakraaminata, Bupati Tjakrahadinegara cepat tangap. Ia sebagai salah satu pendukung dengan aktif menjadi anggota Sarekat Islam di Ponorogo. Keikutsertaan ini wujud kepedulian Bupati terhadap kondisi bangsa Indonesia yang dijajah oleh kolonial Belanda. Apalagi pada medio tahun itu, organisasi Sarekat Islam baru berdiri sudah banyak menyedot perhatian masyarakat Indonesia dengan banyaknya anggota Sarekat Islam pada waktu itu.

Apalagi pendiri Sarekat Islam adalah cucu dari Bupati Tjakranegara I. Berdirinya Sarekat Islam ini, tidak jauh ketika era kepemimpinan Bupati Tjakrohadinegara. Jika Sarekat Islam berdiri pada tahun 1912, maka Bupati Tjakrahadinegara menjabat pada tahun 1914. Hal ini tentu Sarekat Islam masih menjadi “hangat-hangatnya” pergerakan di Indonesia, apalagi HOS Tjokraminata pada waktu itu sering berkunjung ke Ponorogo untuk menjenguk Istrinya yang tinggal di desa Tegalsari, sebelum dibawa ke Surabaya. (Amelz, 1952)

Keikutsertaan Bupati Tjakrahadinegara dalam organisasi Sarekat Islam ini, ternyata tidak disukai oleh belanda dan membuat belanda menjadi khawatir akan memberontak terhadap belanda. Hal ini terbukti

Tjakrahadinegara sering bertentangan dengan perintah Residen Belanda di Ponorogo maupun di Madiun. Sehingga pada tahun 1916 Bupati Tjakrahadinegara diberhentikan dari kedudukannya menjadi Bupati Ponorogo. Jadi Bupati Tjakranegara menjabat Bupati Ponorogo selama dua tahun yakni tahun 1914 sampai dengan 1916. Bupati Tjokrahadinegara setelah tidak menjabat Bupati tinggal di Madiun hingga akhir hayatnya. Beliau wafat dan dimakamkan di desa Tamanan Madiun.

2.7 BUPATI KUSUMAYUDA SANG MUSISI

Kanjeng Pangeran Kusumayuda adalah bupati Ponorogo ke tujuh era penjajahan kolonial Belanda. Ia menggantikan kedudukan Bupati terdahulu Raden Mas Tjakrahadinegara. Ia merupakan bupati kelahiran asli dari kota Budaya Surakarta Hadiningrat. Pada saat era pemerintahannya adat Jawa sangat kental, karena Pangeran Kusumayuda tumbuh dan Besar dikota Bengawan. Kebiasaan Adat Jawa tersebut, di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali ketika menjabat Bupati Ponorogo.

Bupati Pangeran Kusumayuda menerapkan Adat Istiadat Keraton Solo diterapkan pula ketika menjabat Bupati Ponorogo. Ia mewajibkan seluruh pegawai negara (priyayi) mulai dari pangkat mantri hingga kepala dinas memakai seragam pada saat upacara hari besar. Pakaian tersebut terdiri dari kampuh, dodot, boroboro dan serempang. Sehingga nuansa adat begitu kental pada masyarakat Ponorogo.

Pangeran Kusumayuda memiliki hobi bermain musik. Ia menjadi seorang ahli memainkan berbagai alat musik, maka tidak heran ia terkenal di masyarakat Ponorogo sebagai Bupati, sekaligus seorang musisi. Kecintaannya terhadap dunia musik ini membuatnya tertarik membeli peralatan musik dari negeri menara eifel Prancis, lengkap dengan semua peralatan dan pakaian.

Peralatan tersebut, dirawat oleh perkumpulan pemuda ahli musik yang terletak di desa kauman, barat alun-alun. Setiap terdapat even pemerintah maupun hajatan dari masyarakat perkumpulan ini sebagai pengiring ataupun yang menghibur para undangan. Maka perkumpulan ini sangat terkenal ke berbagai daerah di Ponorogo.

Bupati Kusumayuda ketika memimpin Ponorogo, kondisi Ponorogo pada tahun 1917 terserang wabah gagal panen yang mengakibatkan hasil tani rusak dimakan hama tikus. Masyarakat benar-benar terjadi larang Pangan sehingga membuat kondisi masyarakat Ponorogo mengalami musibah penyakit perut atau pes. Hal ini dikarenakan mengkonsumsi makanan yang kurang layak pada waktu itu. Gagal panen ini benar-benar membuat masyarakat “tirakat” masal.

Setelah ujian masyarakat Ponorogo berangsur-angsur pulih, Kondisi perekonomian masyarakat Ponorogo mulai pulih. Hal ini ditandai dengan beberapa faktor antara lainnya adalah dibukanya trayek Jalur kereta api Ponorogo-Badegan pada tahun 1918. Jalur kereta api ini mempermudah akses perekonomian masyarakat. Pada tahun 1921 salah seorang bangsawan belanda yang bernama L.J.C Van Es memanfaatkan trayek perjalanan Ponorogo-Badegan untuk mengunjungi wilayah Sampung guna melakukan penelitian terhadap goa Lawa yang ditemukan oleh karyawan pabrik gula Pagotan saat mencari pupuk untuk tanaman tebu.

Salah satu upaya yang dilakukan L.J.C. Van Es dengan cara membuka kotak galian pada bagian barat dan timur laut Goa mencapai ketinggian 1,75 meter (Soejono,1984:147). Pada lapisan budaya yang memiliki ketebalan sekitar 3.5 meter ditemukan fragment gerabah berhias, mata panah, alat tulang (Sundip, mata tombak, mata kail dan jarum) alat tanduk perhiasan kulit karang, batu giling, pelandasa, hematit, rangka manusia dan fragmen tulang-tulang hewan (DA. Tanudirjo,1985:23-25) Berdasarkan temuan tersebut, dugaan penulis Ponorogo merupakan bekas peradapan kuno. Biasanya secara sosiologis peradapan itu tidak jauh dari sungai atau sumber air. Hal ini jika melihat lokasi goa tidak jauh dari itu.

Pada era Bupati Kusumayuda juga ditandai berdirinya organisasi Islam dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* Muhammadiyah Cabang Ponorogo yang dipelopori oleh Bapak Hasan Muhammad, Ali Diwiry, dan Karso Diwiry seorang juragan Batik Ponorogo, Ia menjalin interaksi dengan Tokoh Pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan di Jogyakarta. Pada suatu kesempatan KH. Ahmad Dahlan menghadiri acara Sarekat Islam di Ponorogo, KH Dahlan sempatkan bersilaturahmi dan pembinaan ke keluarga Besar Hasan Muhammad, Karso Diwiry, Ali Diwiry di Langgar

Etan Pasar (sekarang Mushola Nyai Ahmad Dahlan). Dari Proses Pembinaan tersebut, menjadi sebuah embrio berdirinya Muhammadiyah di Ponorogo dan Muhammadiyah resmi berdiri di Ponorogo pada tanggal 22 Februari 1922 dengan jumlah anggota awal 22 orang. (Ponorogo T. P., 1988)

Dinamika perkembangan masyarakat Ponorogo ketika dipimpin bupati Kusumayuda tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat Ponorogo terus mengalami perkembangan yang baik. Bupati Kusumayuda menjabat Bupati Ponorogo selama 10 tahun, tepatnya tahun 1916 sampai dengan 1926. Setelah beliau tidak menjabat bupati ia mengisi hari tua dengan kembali ke daerah asalnya Surakarta.

*Menurut Informasi yang saya peroleh Pangeran Kusumayuda memiliki tujuh anak, anak ragilnya bernama Haryatie kelahiran Ponorogo 24 Agustus 1940 saat dewasa, ia menikah dengan presiden RI pertama IR Soekarno pada tanggal 21 Mei 1963 yang menjadi saksi Menteri Agama RI K.H Saefuddin. Jadi ada 3 istri Soekarno yang memiliki kedekatan dengan Kabupaten Ponorogo. Pertama, Siti Utari putri Hos Tjakraaminata yang menikah pada tahun 1920, Kedua Hartini putri dari Bapak Osan yang beralamat di Jalan Batoro Katong menikah pada 7 Juli 1954 dan Ketiga Haryati putri Pangeran Kusumayada. *Wallahualam bishowab*

2.8 BUPATI ARIA SAM ERA KONDANGNYA BATIK PONOROGO

Raden Aria SAM adalah Bupati Ponorogo yang ke 8 mengantikan kedudukan bupati Ponorogo sebelumnya Pangeran Kusumayuda. Karier Bupati Raden Aria SAM sebelumnya menjabat sebagai patih kabupaten Malang mendampingi Bupati R. Adipati Aria Soeriodiningrat yang menjabat Bupati Malang periode tahun 1898-1934. Pengalamannya sebagai patih kabupaten malang, membuat ia tidak terlalu lama beradaptasi dengan masyarakat Ponorogo.

Raden Aria SAM merupakan bupati yang memiliki pola pikir moderat, ia menghilangkan budaya sembah terhadap bupati, yang dikhawatirkan bisa mengarah kepada kultus pribadi sehingga aturan-aturan itu dihilangkan, bahkan biasanya jika memasuki lingkungan

pendopo kabupaten ada kebiasaan melepas sandal, maka tidak demikian bagi Bupati Aria SAM. Ia membolehkan menggunakan sandal, jika ketahuan tidak dipakai maka Bupati Aria SAM tidak sungkan mengambil dan menyuruh memakai sandal kepada tamu yang *sowan* ke Pendopo.

Raden Aria SAM terkenal sangat senang berbaur dengan masyarakat. Kedekatan dengan rakyat ia tunjukan setiap ada undangan dari masyarakat ia selalu datang. Kedekatan Bupati Aria SAM dengan rakyat membuatnya dikenal masyarakat sebagai bupati yang merakyat. Ia tidak membedakan golongan, maupun status sosial di masyarakat istilah orang jawa adalah *empan papan* maksud istilah tersebut adalah seseorang harus bisa menyesuaikan diri dimana seseorang itu berada. Ketika bergaul dengan masyarakat kecil, ia bisa menyesuaikan diri. Pun demikian ketika bergaul dengan kalangan elitis ia bisa beradaptasi. Sehingga sifat tersebut bisa diterima oleh siapapun.

Bupati Aria SAM paham betul terkait kultur masyarakat Ponorogo yang terkenal dengan Kesenian Reyog, untuk menjalin kedekatan itu bupati Aria SAM menjalin kedekatan dengan *konca* Reyog. Utamanya para warok yang terkenal sebagai jagoannya masyarakat Ponorogo maka tidak heran kondisi masyarakat di Ponorogo pada era Bupati Aria SAM sangat kondusif, aman dan tentram. Selain memiliki kedekatan dengan para warok, Bupati Aria SAM juga terkenal dekat dengan para Ulama, dengan begitu masyarakat Ponorogo terjadi hubungan harmonis terhadap seluruh elemen masyarakat.

Pada saat Bupati Aria SAM memimpin Ponorogo, juga ditandai dengan berdirinya Organisasi Islam Nahdatul Ulama Cabang Ponorogo pada tahun 1930 di dusun Durisawo Kelurahan Nologaten. Kepengurusan pertama terdiri dari KH. Moh Mansyur, KH. Jaelani, K.Moh Sidiq.,K.Suyuti, K.Kurmen, K.Zaeni, KH. Syamsudin Afandi, K.Moh Romli.,K. Abu Dawud. (Soemarto, 2011)

Kehadiran Organisasi Nahdatul Ulama ini, menambah semarak dakwah di Kabupaten Ponorogo bersamaan dengan Organisasi Muhammadiyah yang lebih dulu hadir di Ponorogo. Hal ini membuat Ponorogo semakin dinamis dalam masyarakat. Dinamisasi ini ditandai dengan majunya perekonomian pada waktu itu khususnya dari sektor batik Ponorogo yang mayoritas dikelola santri-santri yang berafiliasi

kepada dua ormas Islam tersebut.

Peneliti berkebangsaan Inggris yang bernama Christine Dobbin dalam Penelitiannya yang berjudul : *Accounting for the failure of the muslim Javanese Business Class: Example From Ponorogo and Tulung Agung (1880-1940)* mengatakan bahwa Ponorogo pada abad 20 sangat maju, tepatnya pada tahun 1934. Ponorogo menjadi pusat batik terbesar kedua di Pulau Jawa. Bahkan pasar khusus batik di Ponorogo digelar 5 hari dalam sepekan saking ramainya Batik Ponorogo. Hebatnya lagi kemajuan ini hampir sepenuhnya dikuasai oleh pribumi, oleh kaum santri. Menurut Cristine terdapat 77 perusahaan batik di Ponorogo, hanya 2 yang dikelola Cina. Kejadian ini pada tahun 1931, (Dobbin, 1994)

77 perusahaan yang terdapat di Ponorogo tersebut, ada sekitar 1200 pengrajin Batik yang tersebar di berbagai desa di Ponorogo seperti Kadipaten, Kertosari, Ronowijayan, Nologaten, Cokromenggalan, Cekok, Kepatihan, Singosaren dan daerah lainnya sekitaran Kota lama dan Kecamatan Babadan. Pada saat Bupati Ario SAM ini Ponorogo *kondang-kondangnya* Batik Ponorogo pada kancah Nasional. Bupati Ario SAM menjabat bupati Ponorogo selama kurun waktu delapan tahun. Tahun 1926 sampai dengan 1934 karena pada tahun itu pula Bupati Aria SAM kembali ke daerah asalnya, untuk ditugaskan menjadi Bupati kabupaten Malang terhitung mulai tanggal 9 November 1934 sampai dengan 31 Juli 1945.

2.9 RADEN SUTIKNO BUPATI PONOROGO ERA PENJAJAHAN JEPANG

Raden Sutikno adalah bupati Ponorogo ke 9. Ia menggantikan kedudukan bupati sebelumnya Raden Adipati Aria SAM yang dipindah tugaskan ke kabupaten Malang. Raden Sutikno menjabat bupati selama 10 tahun, tepatnya tahun 1934 sampai dengan 1944. Ia ketika menjabat Bupati Ponorogo terkenal dengan Bupati yang Gila Hormat (Purwowijoyo,1985) karena setiap orang yang bertemu dengannya diwajibkan untuk berjalan *ndodok*. Kewajiban *ndodok* ini, tidak hanya diberlakukan ketika berada di Pendopo Kabupaten, tetapi juga ketika bertemu di jalan.

Pada era Bupati Sutikno, Kabupaten Ponorogo dijajah oleh Jepang, Jepang masuk ke Ponorogo pada bulan April tahun 1942. Strategi penjajahan Jepang mirip yang dilakukan oleh Belanda dengan penyamaran sebagai pedagang, dan mengaku sebagai saudara tua. Sehingga di masyarakat lebih mudah diterima. Nampaknya kebaikan masyarakat Indonesia dan khususnya Ponorogo, tidak berbanding lurus dengan apa yang dilakukan oleh Jepang pada masyarakat.

Seiiring Perkembangannya Jepang, kelihatan “belangnya” yakni menjajah Indonesia. Jepang masuk ke Ponorogo dan tinggal di tiga kecamatan antara lain Jenangan, Balong dan Jetis. Jepang merubah struktur yang telah dilakukan oleh Belanda dengan membekukan organisasi politik dan merubah itu semua sesuai dengan keinginan dan kehendak negeri yang terkenal dengan Samurai itu. Struktur tersebut antara lain *Tunari Gumi* atau organisasi masyarakat setingkat Rukun Tangga (RT), Kemudian organisasi ibu-ibu sejenis PKK dengan sebutan *Fu Jin Kai*, *Seinendan* sejenis Karang Taruna.

Pada saat Jepang menjajah Indonesia, khususnya di Ponorogo mereka juga melakukan kerja paksa yang dinamakan *Romusha*. Kerja paksa tersebut, terbagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan usia dan tingkatan pelajar di sekolah. Organisasi *Sainendan* setingkat kelas 1 sampai 3 SD yang diwajibkan menanam lahan kosong, pun sama dengan organisasi *Koto Gakko Tai* setingkat kelas 4 sampai 6 SD.

Organisasi para pemudanya dinamakan *Kei Bo Dan*. Para pemuda memiliki tugas sebagai pekerja untuk mengelola perkebunan dan mencari tenaga kerja. Mereka semua diawasi ketat oleh pasukan Jepang yang dinamakan tentara *Hei Ho*, Jepang dalam menjajah Indonesia meski selama 3,5 tahun, mereka terkenal dengan ganas, tidak segan-segan menghancurkan, menyiksa dan bahkan membunuh bagi siapapun yang melawan.

Tentara Jepang dalam menjajah Indonesia mempunyai semboyan *Hara Kiri* yang artinya dari pada kalah lebih baik mati bunuh diri. Etos semangat Jepang dalam menjajah tersebut, benar-benar membuat rakyat Ponorogo menderita. Harta rakyat dirampas secara paksa tanpa memiliki rasa iba, rakyat sulit mendapatkan sandang dan pangan untuk kebutuhan

sehari-hari. Rakyat juga diwajibkan tanam paksa pohon kapas dan Jarak yang disetor ke Jepang.

Penderitaan tersebut, merata tidak hanya bagi rakyat biasa. Para pegawai pun demikian, ia memperoleh gaji hanya 30 % saja sehingga kemiskinan merajalela. Kebijakan Jepang tidak berhenti itu saja. Mereka menerapkan kebudayaan dan adat istiadat Jepang diberlakukan kepada masyarakat Ponorogo. Kebudayaan itu antara lain seluruh siswa sekolah *Kokumin Gakko* sebutan Jepang untuk sekolah tingkat SD (sekolah Dasar) harus berbahasa Jepang. Selain itu, setiap pagi sebelum pelajaran di mulai semua siswa diwajibkan hormat kepada kaisar Jepang. Budaya hormat tersebut dinamakan *Tai So*.

Kebijakan tersebut, sebagai upaya Jepang untuk merubah dan menghilangkan kebudayaan asli Indonesia sejak dini. Sehingga dengan begitu Jepang dengan mudah menguasai di kemudian hari. Untuk memperkuat kedudukan Jepang di Ponorogo, ia membuat markas militer yang bertempat di Jalan Basuki Rahmad. *Tangsi* militer peninggalan Jepang ini setelah Indonesia merdeka menjadi Hak Milik Kodim 0802.

Ada seorang agen rahasia Jepang yang masuk di kecamatan Balong membuat rumah di selatan pasar Ngumpul. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, agen rahasia ini menetap dan menikah dengan gadis Ngumpul, dia berganti kewarganegaraan dan berganti nama menjadi Husein (Soemarto, 2011)

Penjajahan Jepang tersebut, membuat rakyat Ponorogo benar-benar menderita. Tidak hanya masyarakat, pun demikian yang dialami oleh Bupati Ponorogo Raden Sutikno. Pada tahun 1944 Ia dianggap bersalah oleh Jepang dan menerima hukuman disiksa hingga meninggal dunia.

2.10 M.R SOESANTO TIRTA PRADJA BUPATI PONOROGO SANG AHLI HUKUM



(Gambar 2.2: Soesanto Tirtapradja, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Raden Soesanto Tirtapradja merupakan Bupati Ponorogo pertama pada era transisi pada akhir penjajahan Jepang dan awal Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia lahir di kota budaya Solo, Jawa tengah pada tahun 1900. Semasa kecil ia sudah menjadi anak yang tekun dan gemar belajar maka tak heran semasa dewasa ia menjadi seorang pribadi yang cerdas, serta memiliki etos menuntut ilmu yang tinggi. Ia memperoleh kesempatan beasiswa pendidikan dari pemerintah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan kuliah dalam bidang Hukum di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1925.

Pada masa pergerakan Ia aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan bergabung Partai Indonesia Raya di Surabaya dan di percaya didaulat sebagai salah satu pengurus inti partai. Pengalaman dalam dunia pergerakan membuat Soesanto muda memiliki jiwa dan karakter kepemimpinan yang baik. Perjalanan panjang Soesanto di dalam dunia keilmuan sekaligus aktifis tulen, membuat Soesanto dipercaya oleh pemerintah bekerja dan bertugas di bidang Hukum tepatnya di kantor Pengadilan. Ia pernah ditugaskan ke berbagai daerah di Indonesia seperti Yogyakarta, Bogor, Kebumen dan Kediri.

Pada tahun 1944-1945 di masa-masa peralihan dari penjajahan Jepang menuju era kemerdekaan Indonesia, Raden Soesanto Tirtapradja dipercaya oleh pemerintah diamanahi menjadi bupati pada 3 kabupaten

sekaligus yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa Raden Mr Soesanto Tirtoprodjo memiliki mobilitas tinggi, mengingat jarak antar ketiga kabupaten tersebut satu dengan yang lainnya tidaklah dekat. Apalagi alat transportasi belum memadai seperti sekarang ini dan ditambah kondisi keamanan Indonesia yang masih belum relatif kondusif.

Mr. Soesanto Tirtopradja menjabat sebagai Bupati di tiga kabupaten tersebut relatif singkat hanya satu tahun. Semasa Jadi Bupati Ponorogo, ia pernah mengerakan perjuangan rakyat Ponorogo dalam melawan Penjajah. Setelah Indonesia merdeka, Soesanto kiprahnya didunia politik semakin melejit. Setelah tidak menjabat sebagai bupati Ponorogo, Ia diamanahi oleh pemerintah menjadi menteri di berbagai sektor antara lain Menjabat Perdana Menteri Indonesia masa Jabatan 20 Desember 1949 sampai dengan 16 Januari 1950, yang pada waktu itu sekaligus menjabat menteri dalam Negeri Indonesia yang ke 8 dilantik bersamaan ketika menjabat sebagai perdana menteri, namun masa jabatan sebagai menteri dalam negeri berakhir pada tanggal 6 September 1950.

Selain itu, Soesanto menjabat menteri Kehakiman yang ke 3 di Indonesia selama empat tahun tepatnya sejak tanggal 2 Oktober 1946 dan berakhir pada tanggal 21 Januari 1950. Jadi selama menjabat menteri, ia pernah menjabat tiga kementrian sekaligus pada waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman dan kepawaian Soesanto tidak diragukan lagi, Ia merupakan salah satu Pakar Hukum di Indonesia pada waktu itu sehingga Kiprahnya sangat di butuhkan Negara dalam mengelola tata pemerintahan.

Banyaknya amanah yang diemban oleh Mr. Susanto Tirtapradja pada waktu bersamaan selama menjabat sebagai bupati di tiga kabupaten maupun sebagai menteri di tiga kementrian yang berbeda, menjadikan ia sebagai sosok yang langka di Indonesia. Maka, atas Jasa-jasanya tersebut, Bupati Soesanto Tirtapradja dianugahi Penghargaan Bintang Gerilya dan Bintang Mahaputra Kelas III oleh Pemerintah pada tahun 1960.

2.11 BUPATI PONOROGO TJAKRADIPRADJA SANG PELINDUNG



(Foto: Bupati Tjakradipraja, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Raden Mas Koesnan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Raden Tjakradipraja merupakan bupati Ponorogo ke 11 atau ke 2 setelah Indonesia Merdeka. Ia adalah asli putra kelahiran bumi Reyog Ponorogo yang tidak lain memiliki garis keturunan dari Kyai Muhammad Besari tepatnya sebagai Wereng. Ayahnya adalah Raden Ibnu Hasan atau Raden Mas Tjakradipura dan ibunya Raden Ayu Sedah. Raden Tjakradipraja merupakan anak tunggal dari istri *Garwo* ke 2.

Ayahnya Raden Mas Ibnu Hasan dulu menjabat sebagai Patih di Ponorogo mendampingi Bupati Ponorogo Raden Mas Tjakranegara II. Raden Mas Ibnu Hasan terkenal dengan sebutan Patih *Jliteng*, berperawakan seperti Pangeran Diponegoro, berjenggot menggunakan sorban dan berkulit agak hitam. Selain sebagai Patih Ayahnya terkenal sebagai dai di masyarakat. Ayahnya sangat dicintai oleh rakyat dan memang sangat dekat dengan rakyat.

Raden Mas Ibnu Hasan juga senang menolong kaum lemah dan selalu membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ia terkenal lantang menyuarakan kebenaran dan menentang penindasan yang dilakukan oleh Belanda di Ponorogo. Salah satu kebijakan Belanda di Ponorogo adalah kultur stesel, yakni tanam paksa kopi atau tom kepada rakyat. Raden Mas Hasan menjadi garda depan dalam perlawanan terhadap Belanda. Ia bersama lurah Patik Wiryadikrama, dan Wedana

Mertareja mengatur siasat pemberontakan Patik dengan membakar gudang kopi milik Kountroler Belanda.

Akibat perlawanan itu Ayah Raden Mas Koesnan ditangkap dan dibuang ke Gresik, untuk menghilangkan pengaruh di masyarakat Ponorogo lebih luas. Namun, di Gresik Raden Mas Hasan dipercaya mendapatkan amanah sebagai Patih. Nampaknya darah heroisme dan patriotisme Raden Mas Hasan tersebut, mengalir kepada anaknya Raden Mas Koesnan. Raden Mas Koesnan menjabat bupati Ponorogo pada periode 1945-1949.

Raden Mas Koesnan lebih dikenal dengan nama Raden Tjokradipraja, ia merupakan kakak keponakan Raden Haji Omar Said Tjakraaminata. Karena ada hubungan darah antara ayah R. Tjokradipura dan ayah Hos Tjakraaminata adalah kakak beradik putra dari Raden Mas Tjakranegara I.

Trah Kyai dan Pejuang benar-benar membentuk kepribadian Raden Tjokradipraja dalam kepemimpinan Ponorogo. Pada saat ia menjabat Bupati, terjadi Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1948. Maka ia sebagai Bupati bersama Komandan Batalion Ponorogo Suprato Soekowati (Namanya diabadikan sebagai Patung di Dusun Jarakan) memimpin bersama rakyat membela NKRI melawan penumpasan PKI. Salah satu Tokoh PKI Muso tertembak di Pekarangan milik Haji Shoib di Semanding Kauman.

Pun demikian pada saat terjadi agresi militer II pada 19 Desember 1948 meletus belanda melakukan Operasi Gagak: *Operatie Kraai*, serta menggunakan taktik *blitzkreig* dengan menguasai Yogyakarta sebagai ibukota RI pada waktu itu dengan Cepat. Pada saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memutuskan untuk tetap bertahan di ibukota meski mereka akan di tawan oleh Belanda, dengan alasan mereka tetap bisa menjalankan misi diplomasi. Selain itu, serangan Agresi Militer II tidak mungkin dilakukan terus menerus dalam penyerangan, karena presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang sudah di tawan oleh belanda.

Sementara itu, sebelum terjadinya agresi militer II Jendral Sudirman sebagai paglima besar angkatan perang menderita sakit paru-paru yang sangat parah, Jendral Sudirman berpesan jika belanda

menyerang Yogyakarta, maka ia akan memegang kembali pimpinan angkatan perang dan memimpin prajurit bergerilya. Pada akhirnya Jendral Sudirman turun gunung dan turut berjuang meski dalam kondisi sakit parah. Jendral Sudirman bersama pasukannya menempuh rute gerilya sejauh 1009 km dengan melewati berbagai daerah seperti Yogyakarta, Wonogiri, Pacitan dan Ponorogo.

Pada saat di Ponorogo. Jendral Sudirman melewati Sumoroto, Sambit, Sawoo, Jetis, Sooko, Ngebel dan Pulung. Ketika berada di Ngebel, rombongan pasukan Jendral Sudirman berkesempatan menerima kunjungan meteri Pemuda dan Olah Raga Supomo dan menteri Kehakiman MR Susanto Tirtopradja yang didampingi oleh Bupati Raden Tjakradipradja untuk membicarakan langkah perjuangan selanjutnya. Di tempat ini pula Jendral Sudirman menerima *caraka* Letkol Suharto yang melaporkan rencana serangan umum terhadap Yogyakarta.

Kehadiran Rombongan Jendral Sudirman bersama bupati tersebut, difasilitasi oleh masyarakat Ngebel yang bernama Kamituwo Mbacak yang bernama bapak Siman dan Pak Samidjo. Nampaknya Belanda mengetahui keberadaan Jendral Sudirman bersama Bupati sehingga Belanda berusaha mengkapnya. Berkat doa dan bantuan masyarakat, pada saat itu Jendral Sudirman berhasil lolos dari Belanda, sedangkan Raden Tjakradipradja tertangkap oleh Belanda di Watu Maling, Desa Talun Ngebel pada tanggal 18 Januari 1949, karena perjuangan Raden Tjakradipradja dalam melindungi Jendral Sudirman tersebut, Bupati Ponorogo ini terkenal dengan sebutan Sang Pelindung.

2.12 RADEN PRAJITNA, MEMINDAHKAN KABUPATEN KE MLARAK



(Foto: Bupati Prajitna, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Raden Prjitna merupakan bupati ke dua belas Kabupaten Ponorogo sejak zaman belanda atau ke tiga Setelah Indonesia Merdeka. Bupati Prajitna berasal dari Kabupaten Pacitan. Ia menjabat pada saat Agresi Militer II Belanda yang berdiaspora keberbagai daerah termasuk di Ponorogo. Ia mengantikan kedudukan Bupati sebelumnya Raden Tjakradipradja yang ditangkap oleh Belanda karena melindungi Jendral Sudirman saat Bergerilya. Untuk mengisi kekosongan maka pemerintah mengangkat Raden Prajitna sebagai Bupati yang sebelumnya ia menjabat sebagai wedana di Ponorogo.

Bupati Prajitna saat menjabat Bupati Ponorogo memimpin gerakan perang gerilya terhadap Belanda, sehingga pada waktu itu, banyak fasilitas negara yang rusak akibat perlawanan dan peperangan melawan belanda. Fasilitas yang rusak antara lain sekolah-sekolah banyak yang dibakar, Pasar, Jembatan, Gudang Belanda, bahkan pendopo kabupaten. Rusaknya fasilitas tersebut, membuat beberapa bangunan penting tidak bisa di manfaatkan secara maksimal. Sehingga Bupati Raden Prajitna memindahkan pusat pemerintahan untuk sementara waktu berada di desa Kaponan Mlarak.

Dipilihnya desa Kaponan Mlarak, bukan berarti tidak ada alasan. Alasan utamanya adalah desa Kaponan terkenal dengan kondisinya yang relatif aman, selain itu kepala desanya merupakan figur yang disegani.

Perpindahan tersebut, juga diikuti oleh beberapa fasilitas lainnya seperti Rumah Sakit, Kantor Polisi, Kantor CPM. Perpindahan tersebut, menjadikan desa yang berada di timur tenggara Ponorogo menjadi pusat “kota baru” dalam kondisi darurat.

Pusat pemerintahan Ponorogo berada di desa Kaponan Mlarak berlangsung selama enam bulan, sampai kondisi Ponorogo relatif aman setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada tanggal 27 Desember 1949, yaitu ketika penyerahan kedaulatan yang ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Pihak Belanda Khawatir bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sama dengan mengakui tindakannya sebagai aksi Polisionil pada tahun 1945 sampai dengan 1949 adalah perbuatan yang Ilegal, sehingga Pada tahun 1950 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomer 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah guna memperkuat Pemerintahan Indonesia, yang sebelumnya daerah-daerah di Jaman penjajahan Belanda merupakan bagian wilayah pemerintahan Hindia Belanda. Dengan dikeluarkan Undang-Undang tersebut memperkuat dan mempertegas wilayah seperti Ponorogo, menjadi bagian dari Pemerintahan Republik Indonesia. Masa ini dikenal dengan era pergolakan kemerdekaan.

Masa pergolakan kemerdekaan situasi dan kondisi relatif kurang stabil, hal ini ditandai dengan situasi Politik yang tidak menentu, antara lain adanya pemberontakan dan ancaman dari negara lain yang mengancam kedaulatan Negara. Akibatnya mengalami gangguan di berbagai sektor seperti keamanan, yang berimplikasi kepada sendi-sendi perekonomian. Salah satunya adalah Indonesia terjadi krisis Moneter yang mengakibatkan mata uang indonesia melemah. Sehingga terjadi pemotongan nilai rupiah (*Sanering*) uang kertas Rp 5 ke atas dinyatakan bernilai separuh. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara pada pemerintahan RIS tindakan ini dilakukan pada tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5.1 Miliar.

Krisis tersebut, juga berdampak ke daerah daerah seperti Kabupaten Ponorogo Akibatnya, situasi perekonomian di Ponorogo pada saat dijabat Raden Prajitna mengalami lumpuh total. Raden Prajitna menjabat Bupati Ponorogo selama kurun waktu dua tahun, dimulai sejak

tahun 1949 sampai dengan 1951. Jadi Bupati Raden Prajitna menjadi bupati terakhir pada masa pergolakan kemerdekaan Indonesia.

2.13 BUPATI PONOROGO MUHAMMAD MANGUNDIPRADJA : SANG PAHLAWAN NOVEMBER 1945



(Foto: Bupati Mangundipradja, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Raden Haji Muhammad Mangundipraja merupakan seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan perwira militer Indonesia. Mangundipraja, begitu sapaan akrabnya, ia lahir pada tanggal tanggal 5 Januari 1905 di kabupaten Sragen Jawa Tengah. Ia hidup dalam lingkungan keluarga pejuang. Secara garis keturunan ia adalah cicit dari Setyadiwirja atau yang lebih dikenal luas oleh masyarakat dengan sebutan Kyai Ali Muntoha. Setyadiwirya sendiri merupakan teman seperjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Keduanya memperluas pemberontakan melawan penjajah Belanda hingga ke daerah Kertosono, Ngawi dan Banyuwangi.

Mangundipraja, begitu sapaan akrabnya, saat masa kecil hidup dalam keluarga bangsawan maka tidak heran jika ayahnya yang bernama Sastramarjana memberikan pendidikan yang terbaik pada waktu itu, yakni dengan menyekolahkan di ELS (Eurpese Lager School) di Sala, namun pada tahun 1915 Mangundipraja dipindahkan di ELS Sragen dengan pertimbangan sekolah di Sragen sambil belajar mendalami ilmu agama di rumah pak dhe-nya yang seorang ulama. Pada tahun 1921 Mangundipraja

lulus dari ELS melanjutkan jenjang studi Sekolah Teknik di Yogyakarta, namun Mangundipraja tidak sampai lulus karena tidak berbakat dibidang teknik, ia melanjutkan di Opleiding School Voor Inlandche Ambtenaren (OSVIA) Madiun dan lulu tahun 1927. Setelah lulus kemudian ia bekerja sebagai pamong praja dimulai sebagai pelayan wedana Gorang gareng Madiun, Mantri Polisi Lapangan di Lamongan, Wakil Kepala Jaksa di Kalisosok Surabaya dan pada tahun 1934 menjadi Asisten Wedana di Diwek Jombang.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia ia berubah haluan, ia lebih memilih menjadi tentara dengan bergabung menjadi anggota Pembela Tanah Air (PETA) pada tahun 1944. Mungkin darah pejuang membuat hati Mangundipraja terpanggil sebagaimana para keluarganya. Setelah menyelesaikan pendidikan militer di Surabaya. Mangundipraja ditugaskan sebagai Daidancho atau komandan Batalion PETA di Sidoarjo. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 semua anggota PETA menjadi pasukan inti Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat, yang merupakan embrio dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Meskipun Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kondisi pada waktu itu masih belum relatif kondusif, hal ini ditandai dengan kembalinya pasukan belanda NICA di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 yang merupakan operasi militer terbesar pertamanya. Mangundipraja bersama Bung Tomo, Doel Arnowo, Abdul Wahab, dan Drg Moestopo memimpin perlawanan terhadap pasukan sekutu yang berlangsung diseluruh penjuru Surabaya hingga tanggal 29 Oktober 1945 pimpinan Sekutu mengadakan pertemuan dengan Bung Hatta untuk melakukan gencatan senjata. Pada pertemuan tersebut, Muhammad Mangundipraja diangkat oleh Jenderal Oerip Soemohardjo sebagai pimpinan TKR Divisi Jawa Timur dan melakukan kontak biro dengan pasukan Sekutu.

Pada hari yang sama, 29 Oktober 1945 di sore hari, Muhammad Mangundipraja bersama Brigadir Mallaby berpatroli keliling kota Surabaya untuk melihat kemajuan gencatan senjata. Rombongan ini berhenti di Jembatan Merah di depan Gedung Internatio. Di dalam

gedung itu, tentara Inggris dari kesatuan Gurkha sedang dikepung oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk diminta menyerah. Muhammad Mangundipraja lantas masuk ke dalam gedung yang dikuasai Inggris untuk melakukan negosiasi. Tanpa disangka, Muhammad Mangundiprodjo malah disandera oleh tentara Gurkha dan terjadilah tembak-menembak antara tentara Inggris dan pemuda Surabaya. Mallaby tewas dalam mobilnya yang meledak dan terbakar.

Tewasnya Mallaby membuat Inggris marah. Inggris mengultimatum rakyat Surabaya yang mempunyai senjata untuk menyerahkan senjatanya. Ultimatum ini spontan ditolak oleh Muhammad yang kemudian memimpin TKR dan pemuda Surabaya melakukan pertempuran yang berpuncak pada tanggal 10 November 1945. Perang terbuka di Surabaya ini berlangsung selama 22 hari dan menewaskan 6.315 pejuang anggota TKR. Muhammad sendiri bertugas memimpin pertempuran melawan tentara Sekutu.

Setelah pertempuran Surabaya usai, Muhammad Mangundipraja dipromosikan menjadi Mayor Jenderal oleh Presiden Soekarno. Setelah mengakhiri karier militer, Muhammad ditugaskan sebagai Bupati Ponorogo dari tahun 1951 sampai 1955 menggantikan Bupati Raden Prajitna, Ketika menjabat Bupati salah satu misinya adalah mengamankan daerah Madiun pasca pemberontakan PKI pada tahun 1948. Pada awal menjabat sebagai Bupati Ponorogo Muhammad Mangundipraja menggelar hajatan pernikahan putrinya yang bernama Widaningsri dengan Soesilo Soedarman seorang Prajurit TNI pada tanggal 15 April 1951 di Pendopo Kabupaten Ponorogo.

Istri dari ibu Kamariatun ini ketika menjabat Bupati Ponorogo relatif aman, sehingga prestasi ini kemudian mengantarkan Bupati Muhammad Mangundipraja menjadi Residen (Gubernur) pertama Lampung dengan misi utama mengendalikan keamanan di daerah ini. Muhammad Mangundipraja tutup usia di Bandar Lampung pada 13 Desember 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bandar Lampung. Atas jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan, Presiden Joko Widodo menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 7 November 2014. Pemberian gelar tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomer 115/TK/Tahun 2014

tanggal 6 November 2014 (Setneg, 2014). Penerimaan tanda jasa ini diwakili oleh cucunya, Menteri Kemaritiman Indonesia Indroyono Soesilo.

2.14 BUPATI PONOROGO RADEN MAHMOED ERA BANGKITNYA KESENIAN REYOG



(Foto : Bupati Mahmoed, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Raden Mahmoed merupakan bupati Ponorogo ke 14 sejak era penjajahan Belanda atau Kota Baru Sekarang ini. Ia menggantikan kedudukan bupati sebelumnya Raden Mangundiprodo yang dipindah tugaskan menjadi Gubernur di Lampung Sumantra. Raden Mahmoed sebelum menjabat Bupati Ponorogo, ia adalah Patih di Kabupaten yang terkenal dengan Gunung Bromo, Probolinggo. Pengalaman sebagai patih tentu menjadikan guru yang baik bagi Raden Mahmoed dalam mengembangkan Kabupaten Ponorogo ke arah yang lebih baik.

Ia selama menjadi Bupati, misinya adalah memperbaiki dan meneruskan pembangunan bangunan-bangunan yang hancur dan rusak akibat agresi militer II Belanda. Tidak bisa di pungkiri akibat penjajahan tersebut banyak fasilitas pemerintah yang tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya seperti Rumah Sakit, Jembatan, Gudang, Sekolah Dasar, maupun pasar sebagai pusat perekonomian rakyat.

Bupati yang terkenal memiliki hobi berkuda ini, meneruskan pembangunan-pembangunan yang telah dirintis oleh bupati sebelumnya Raden Muhammad Mangoendiprojo. Percepatan pembangunan ini sebagai upaya memulihkan kondisi Ponorogo secara total yang meliputi berbagai sektor. Utamanya yang berkaitan dengan hajat orang banyak dengan skala prioritas tertentu seperti pasar, sekolah dan rumah sakit.

Raden Mahmoed setiap sore ia berkeliling Ponorogo menunggang kuda, meninjau dan memantau perkembangan Ponorogo. Kegiatan ini juga ia gunakan sebagai sarana silaturahmi dan menemui rakyat guna melihat kondisi keadaan masyarakat pasca pemulihan situasi pasca agresi militer II. Karena akibat dari itu semuanya tiarap baik ekonomi, sosial maupun seni budaya.

Seperti halnya dalam seni budaya, kesenian Reyog pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang kesenian ini dilarang, karena Reyog dianggap sebagai kesenian yang membawa pengaruh dan merugikan pemerintahan kolonial. Sehingga perkumpulan dan kegiatan kesenian Reyog dapat dikatakan tenggelam. Seniman-seniman tidak menampakkkan diri. Hal ini disebabkan karena dengan seringnya berkumpul akan mengundang kecurigaan pemerintah penjajah dan akhirnya dilarang sama sekali (Lihat PKDT II, 1993:5).

Seiiring perkembangannya pasca Indonesia merdeka kesenian Reyog mulai tampil lagi pada dekade tahun 1950an. Hampir setiap desa memiliki Reyog, kuantitas menunjukkan jumlah yang baik, namun kualitas belum menunjukkan kemajuan. Pada tahun 1950an Reyog mempunyai fungsi yang berbeda, kesenian Reyog sempat mati dan hidup lagi. Namun sangat disayangkan karena kesenian Reyog digunakan sebagai kepentingan politik. Hal ini berakibat pada kualitas kesenian Reyog yang tidak lagi digunakan untuk meningkatkan kesenian Reyog, tetapi dijadikan alat perjuangan Politik.

Bangkitnya Reyog ini, ketika Bupati Mahmoed menjabat bupati pada tahun 1955 atau bertepatan dengan pemilu di Indonesia, termasuk di Ponorogo. Pemilu 1955 memunculkan partai-partai politik besar antara lain PKI, PNI, NU dan Masyumi. Masa ini merupakan kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan penting dalam bernegara melalui sistim parlementer. Semua partai berlomba meraup suara

terbanyak dengan cara menggandeng kesenian, Pada masa itu Reyog tidak luput sebagai alat untuk memobilisasi massa. Reyog menjadi paling banyak menarik perhatian masa pendukung dan apresiator di wilayah Ponorogo.

Hampir tidak dijumpai partai politik di Ponorogo pada saat itu tidak menggandeng Reyog sebagai alat untuk meraih simpati dan dukungan rakyat. Bahkan setiap partai mendirikan wadah seni budaya agar terlihat serius mengapresiasi kesenian. Dominasi PKI dalam membawa Reyog merebut masa sangat besar dan sulit digoyahkan. Barisan Reyog PKI semakin berada di puncak kejayaan ketika doktrin kerakyatan memperoleh sambutan yang hangat dikalangan *konca* Reyog. Oleh karena itu kalangan santri di Ponorogo kurang bersahabat dengan Reyog karena diidentikan dengan PKI. Oleh sebab itu, NU mendirikan Cabang Kesenian Reyog Agama (CAKRA) untuk menaungi Reyog, PNI mendirikan BREN (Barisan Reyog Nasional) dan PKI lebih indetik kepada BRP (Barisan Reyog Ponorogo).

Kepopuleran Reyog di kalangan masyarakat pada saat itu membuat partai politik, terutama PKI menggunakan Reyog sebagai alat untuk mengumpulkan massa, PKI juga memanfaatkan Reyog untuk mengalihkan perhatian masyarakat, yaitu ketika pengangkatan jenazah korban pembunuhan PKI di lubang-lubang PKI. Perhatian masyarakat dialihkan melalui kesenian Reyog (Jawa Pos, 26 September 1989). Hal ini dilakukan PKI agar terlihat baik dan mendapat simpati dari masyarakat. Seiring dengan adanya persaingan antara golongan nasionalis, komunis dan agama.

Pada saat itu sebagian besar kelompok reyog tergabung dalam Barisan Reyog Ponorogo (BRP) yang pada awalnya milik masyarakat Ponorogo, tetapi kemudian dimenangkan PKI. Kondisi tersebut memancing PNI membuat BREN, NU membuat CAKRA pada tahun 1955. Domiasi PKI dalam BRP mendapat simpati besar dari masyarakat Ponorogo. Hal itu terlihat dari pemerolehan pemilu pada tahun 1955. PKI memperoleh suara terbanyak. Sedangkan di Jawa timur PKI mendapat jumlah suara 2.266.801 atau 20 % lebih dari jumlah pemilih 10.961.181. (Suluh Indonesia: 22 November 1955).

Sedangkan di Ponorogo PKI juga mendominasi pada urutan pertama dengan perolehan 17816 suara, disusul NU dengan perolehan 9.609 suara, kemudian PNI memperoleh 79.008 suara, Masyumi: 34.198 Suara, Partai Buruh mendulang 6.023 suara dan Partai Kristen Indonesia (Perkindo) mendapat raupan 361 suara. (Berita berita Daerah Jawa Timur “Dalam Terompet Masyarakat, Rabu tanggal 10 Januari 1956). Dominasi PKI di Ponorogo ini, membuat kondisi Ponorogo menjadi mengkhawatirkan, benar saja akibat dari itu Bupati Mahmoed sebagai pertaruhannya. Ia diberhentikan menjadi Bupati selang dua tahun kemudian tepatnya tahun 1958 dan digantikan oleh Bupati Hariyogi seorang Wedana Sumoroto yang dirasa telah berhasil mengamankan Sumoroto dari PKI dimana salah satu Tokoh PKI Muso tertembak di Semanding. Jadi Bupati Mahmoed menjabat selama tiga tahun, sejak tahun 1955 sampai dengan akhir jabatannya 1958.

2.15 BUPATI PONOROGO R. M. HARIYOGI PUTRA MAHKOTA KEMBALI BERTAHTA



(Foto: Bupati Haryogi, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Raden Mas Haryogi merupakan Bupati Ponorogo ke lima belas, atau ke 5 setelah Indonesia merdeka. Raden Mas Haryogi merupakan putra asli daerah kota Reyog. Ia tinggal berada di sebuah rumah yang lokasinya berada di sebelah selatan Kantor BRI pusat jalan Sukarno Hatta atau disebelah utara pertigaan segitiga emas Ngepos. R.M Haryogi berasal

dari keluarga bangsawan ayahnya adalah Raden Mas Tandhawinata seorang wedono di Tamansari Sambit, yang tidak lain adalah Putra dari Bupati Sumoroto ke IV atau yang terakhir yang bernama Raden Mas Bratadirja. Jadi Raden Mas Haryogi adalah cucu dari Raden Mas Bratadirja. Ibunya Raden Ayu Tandhawinata II berasal dari Kunti Sampung.

Keluarga besarnya, terkenal di masyarakat memiliki jiwa Wira'i atau kesatriannya Masyarakat Ponorogo. Kakeknya Raden Sumaonegara menentang kebijakan Belanda dalam upaya tanam paksa, kakeknya menolak takluk dan tunduk terhadap perintah belanda sehingga kakeknya diasingkan ke makasar, namun sebelum diasingkan ke Makasar beliau wafat dimakamkan di Ngampel Surabaya, sementara Istrinya *sumare* di Astana Srandil Gedung *Kulon*.

Pun demikian ayahnya ketika menjabat wedana di Sambit pernah menangkap gerombolan perampok yang meresahkan masyarakat. Perampok itu diketuai oleh Eka yang dikenal memiliki kesaktian ilmu kijing kencana. Raden Mas Tondhawinata bersama tujuh lurah menghadapi perampok itu ketika mereka beraksi di Senepo Slahung. Mengetahui hal tersebut, pimpinan perampok yang bernama Eka, ini menghadapi sendiri tujuh lurah dan Raden Tandhawinata, sementara dua puluh orang anggota perampok hanya disuruh melihat oleh Eka, kecuali jika kalah maka anak buah boleh bertindak. Perampok Eka ini mampu mengalahkan lima lurah, hingga mereka berlari. Namun tidak demikian bagi Raden Mas Tandhawinata, ia hadapi kesombongan perampok Eka hingga ia takluk.

Melihat demikian anggota perampok yang berjumlah 20 orang tidak terima pimpinannya kalah, sehingga mereka menyerang Raden Tandhawinata hingga terkulai lemas dan dibuang ke sungai oleh perampok. Berkat pertolongan Allah Raden Mas Tandhawinata selamat dan gerombolan perampok eka dapat ditangkap oleh dua lurah sahabat Raden Mas Tandhawinata. Perampok Eka kemudian mendapat hukuman di penjara, setelah usai masa tahanannya ia menemui Raden Mas Tandhawinata untuk meminta maaf, Raden Mas Tandhawinata pun memberi maaf kepada orang yang telah mencoba membunuhnya.

Ibarat sebuah pepatah *buah Jatuh tidak jauh dari pohonnya* maksudnya sifat anak tidak jauh dengan orang tuanya begitulah mungkin gambaran bagi Bupati Ponorogo Raden Mas Haryogi yang memiliki beberapa kesamaan dengan orang tuanya. Jika orang tuanya dahulu pernah menjabat sebagai wedanan di sambit, maka Raden Mas Haryogi pun demikian. Ketika Raden Mas Haryogi pada saat masa Penjajahan Jepang, ia menjabat *onder* atau camat di beberapa daerah antara lain Balung Bendo, Uteran, Nambangan, ia juga ikut bergerilya melawan penjajahan Jepang pada tahun 1942.

Setelah usai penjajahan Jepang dan Indonesia Merdeka, Bupati yang memiliki hobi bermain sepak bola dan berkuda ini pun mendapat promosi tempat tugas baru ke daerah asalnya di Ponorogo tepatnya sebagai wedana di Sowoo. Pada saat pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun Meletus dan merambah ke daerah-daerah sekitar seperti Magetan, Ngawi dan Ponorogo, banyak anggota PKI yang mencari perlindungan maupun keamanan yang lari ke wilayah Sumoroto, karena daerah ini terkenal dengan banyaknya orang yang memiliki linuwih di bidang supranatural atau *kesakten*.

Untuk mengantisipasi pengaruh dan perluasan gerakan PKI ke wilayah Sumoroto maka Raden Mas Haryogi ditempatkan sebagai Camat di Sumoroto, yang bertugas mengamankan wilayah leluhurnya dari ancaman PKI karena pada waktu itu warga dan masyarakat Sumoroto memiliki rasa *sungkan* dengan Camat Raden Mas Haryogi karena leluhurnya merupakan orang-orang yang *babad* Kabupaten Sumoroto. Sehingga wilayah Sumoroto relatif aman dari PKI saat dipimpin oleh Camat Raden Mas Haryogi, bahkan tokoh gembong PKI yang bernama Joyo Begug dan Muso pada waktu itu tertangkap di Wilayah Sumoroto dengan perlawanan dramatis.

Keberhasilan Raden Mas Haryogi dalam memimpin beberapa Kawedanan di berbagai daerah membuat Raden Mas Haryogi mendapat kepercayaan menjabat sebagai bupati Ponorogo menggantikan kedudukan Raden Mahmoed. Naiknya Raden Mas Haryogi sebagai bupati Ponorogo ini, kembalinya trah Bupati Sumoroto menjadi pemimpin Ponorogo menandakan putra sang mahkota kembali Bertahta.

Pada saat Raden Mas Haryogi menjabat sebagai Bupati Raden Mas Haryogi melaksanakan amanat U.U No 12 1950 bersama DPRD Ponorogo dengan mengangkat seorang kepala BRI yang bernama Raden Prajasayaga sebagai Bupati. Jadi pada waktu itu terjadi dualisme kepemimpinan, ada Bupati dan Kepala daerah. Bupati Raden Mas Haryogi sebagai kepala daerah yang menguasai seluruh teritorial Ponorogo dan Bupati Raden Prajasayaga sebagai bupati kantor.

Bupati Raden Mas Haryogi masa jabatannya selama dua tahun tepatnya tahun 1958 sampai dengan 1960. Setelah masa jabatan habis, ia pindah tugas di Kabupaten Jombang sampai pensiun. Setelah itu ia kemudian kembali ke Ponorogo. Pada tanggal 23 Februari 1969 beliau wafat dan Jenazahnya di makamkan di Astana Srandil. Beliau meninggalkan dua Istri. Istri yang pertama bernama Raden Ayu Sudarti dari Solo berputra dua yakni Raden Mas Bambang Heri Permadi dan Raden Mas Bambang Partono sedangkan Istri Kedua putri dari Kediri yang bernama Dra. Daryulina mempunyai tiga putri. Putri pertama Raden Ayu Estu Prayogi, Kedua Raden Ayu Teti* dan yang ragil Raden Ayu Rini*.

*Nama panggilan karena Informan Bapak Moko, keponakan R.M Haryogi lupa nama lengkap terkait saudara sepupunya tersebut.

2.16 **BUPATI PONOROGO RADEN DASOEKI** **PRAWIRAWASITA SANG PEMERSATU**



(Foto: Bupati Dasoeki, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Tahun 1963 Kabupaten Ponorogo mendapat bencana gagal panen terjadi dimana-mana. Pagebluk tersebut diakibatkan oleh tikus yang merajalela. Semua hasil tani seperti Padi, Jagung, Singkong yang ada di lumbung habis dimakan tikus. Bahkan pepohonan yang masih berada di sawah maupun tegalan pun disikat habis.

Tikus tidak hanya merambah pada sawah dan perkebunan tetapi juga sudah masuk kedalam dapur rumah maupun gudang lumbung hasil pertanian. Jumlahnya ribuan, anehnya tikus yang ada di sawah jika kepergok manusia langsung menceburkan diri ke air hingga beberapa saat, namun masih tetap hidup. Pemerintah bersama rakyat hampir setiap hari mengadakan perburuan tikus.

Akibat dari itu, Ponorogo kekurangan bahan pangan, semua pangan harganya sangat mahal. Walaupun ada uang, tetapi bahan pangan tidak tersedia, Upaya pemerintah mendatangkan bahan pangan dari daerah lain pun tidak mencukupi bahkan tergolong sangat kurang. Karena keterbatasan bahan pangan, bahkan gapek yang sudah tidak layak pun juga dimakan, meski gapek tersebut dalam kondisi Gamblong atau gapek yang sudah hancur.

Hal ini mengakibatkan, penyakit wabah HO (*Honger Odium*) dan penyakit busung lapar. Banyak masyarakat yang menderita wabah tersebut, sampai-sampai rumah sakit di Ponorogo tidak mampu menampung jumlah pasien, sehingga harus dibuatkan tenda-tenda darurat. Adalah Raden Dasoeki, bupati Ponorogo ke 16 atau ke 6 setelah Indonesia merdeka ini mengatasi permasalahan Wabah tikus di Ponorogo dengan bijaksana.

Nama lengkapnya Raden Dasoeki Prawirawasita, Ia membuat sayembara dalam mengatasi Wabah tikus yang merajalela. Sayembara tersebut dibuat semacam perlombaan antar desa. Barangsiapa yang berhasil menangkap jumlah tikus yang paling banyak, maka berhak memperoleh hadiah sapi. Hadiah Sapi tersebut merupakan hadiah yang besar pada waktu itu. Karena sapi tergolong sebagai *mas picis raja brana*. Maksudnya adalah Sapi sebagai harta kekayaan yang menjanjikan, mengingat harga sapi sangat mahal.

Sayembara tersebut diikuti oleh semua warga desa-desa di Kabupaten Ponorogo. Lomba ini, dilaksanakan dengan mekanisme pengumpulan dilakukan di setiap kecamatan masing-masing untuk didata jumlah tikus terbanyak. Dari berbagai desa yang ada di Ponorogo, desa yang berhasil menangkap tikus paling banyak adalah desa singkil dari kecamatan Balong dengan perolehan hasil tangkapan tikus sebanyak 10100 ekor.

Raden Dasoeki dikenal sebagai bupati yang memiliki pemikiran brilian, ia menyelesaikan sebuah masalah tanpa masalah. Permasalahan hama tikus yang semula menjadi “momok” masyarakat, dapat diselesaikan dengan baik. Tidak hanya itu, Bupati yang memiliki latar belakang sebagai Polisi ini, juga menyatukan kesenian Reyog sebagai kesenian asli Ponorogo, yang sempat “bersi tegang” antar kelompok akibat agitasi Politik yang memanfaatkan kesenian Reyog sebagai media mendulang massa dengan pecahnya Reyog menjadi berbagai kelompok Reyog seperti BREN (Barisan Reyog Nasional) representasi kelompok Nasionalis, CAKRA (Cabang Kesenian Reyog Agama), KRIS (Kesenian Reyog Islam) wakil dari kelompok Islam. Untuk memperkuat solidaritas dan *ukhuwah wathoniah*, maka Bupati Dasoeki mengadakan musyawarah Reyog se kabupaten Ponorogo yang dihadiri sebanyak 364 unit Reyog.

Selama menjabat sebagai Bupati Ponorogo, Ia banyak melakukan pembangunan antara lain adalah berdirinya SMA Negeri pada tahun 1960, kemudian disusul STM Negeri pada tahun 1964, pada tahun yang sama juga diikuti berdirinya SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Adapun pembangunan lainnya adalah Terminal Ponorogo yang berlokasi di Kelurahan Tonatan, terminal ini sebagai akses penting transportasi masyarakat, baik internal kabupaten yang melayani perjalanan antar kecamatan yang ada di Ponorogo maupun secara eksternal yang menghubungkan Ponorogo dengan daerah lainnya di Indonesia.

Bupati Dasoeki, juga membangkitkan Jiwa Nasionalisme Rakyat Ponorogo dengan membangun 2 Patung Pahlawan. Patung yang pertama dibangun berlokasi di Ngepos pada tahun 1962 dan yang kedua di Jarakan pada tahun 1966. Patung yang berada di Jarakan dengan mengambil figur Jendral Suprpto Soekawati yang merupakan Komandan Batalion TNI di Ponorogo yang sekaligus Komandan Penumpasan PKI Madiun yang

dipimpin oleh Muso. Patung tersebut, juga sebagai upaya mengingatkan perjuangan dan pengorbanan Pahlawan dalam rangka membela (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Bupati Dasoeki membangun taman makam Pahlawan sebagai tempat para pejuang kemerdekaan. Raden Dasoeki Prawirawasita menjabat sebagai bupati Ponorogo selama tujuh tahun, tepatnya sejak tahun 1960 sampai dengan 1967, Masyarakat mengenalnya sebagai Bupati sang pemersatu, karena upayanya dalam menyatukan masyarakat dalam membangun Ponorogo.

2.17 BUPATI PONOROGO RADEN SOEYASA SOSOK YANG SEDERHANA



(Foto: Bupati Soeyoso, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Raden Soeyoso merupakan sosok birokrat tulen, ia meniti karir sejak dari bawah hingga menjadi Bupati Ponorogo ke 17 sejak era penjajahan Belanda atau ke delapan pasca Indonesia Merdeka. Sebelum menjadi Bupati ia adalah seorang Wedono Ponorogo. Bupati asli putra daerah ini, menggantikan kedudukan bupati sebelumnya Raden Dasoeki Prawirowasita yang menjabat pada tahun 1960 sampai dengan 1967. Ia menjabat hanya selang waktu satu tahun, karena posisinya hanya menggantikan sementara atau istilahnya Plt (Pelaksana Tugas atau Pejabat Tugas Singkat).

Raden Soeyoso menjabat pada tahun 1967 sampai tahun 1968, meskipun relatif singkat Bupati Soeyoso melaksanakan tugas dengan baik. Kesempatan yang singkat itu, ia gunakan dengan maksimal membangun Ponorogo dengan dinamis. Pengalaman Raden Soeyoso sebagai Wedono di Ponorogo tidak di ragukan lagi, manajerial dan kepemimpinannya dalam memimpin sebuah birokrasi terkenal dengan kedisiplinan sehingga ia dipercaya sebagai Bupati menggantikan kedudukan Bupati Dasoeki Prawirowasito sementara waktu sampai Bupati secara definitif dipilih.

Bupati Raden Soeyoso, paham betul selama menjabat Bupati Pelaksana Tugas (Plt) tidak boleh mengangkat, memindahkan maupun memberhentian pegawai. Maka kesempatan yang relatif singkat tersebut, ia gunakan menjalin ukhuwah dengan menjalin silaturahmi dengan berbagai element masyarakat. Sehingga pada masa transisi tersebut, kondisi Ponorogo relatif aman dan kondusif dalam upaya mempercepat kemajuan di Ponorogo.

Pada saat Bupati Soeyoso menjabat kondisi masyarakat di Ponorogo relatif maju, utamanya di bidang Pendidikan hal ini ditandai dengan berdirinya IAIM (Institut Agama Islam Muhammadiyah). Ide berdirinya IAIM berasal dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tergabung dalam IGM (Ikatan Guru Muhammadiyah), untuk merealisasikan ide tersebut dibuat tim pendiri yang terdiri Bapak Moehadi Abdusalam, Bapak Winarno, Bapak Djoko Setiantoro, Bapak Soewardi, DR. Mahmud Sujuthi, Bapak Sulaiman, SH. Bapak Kasran, BA. Bapak Z Basjoeni, BSc, dan Bapak Soejono. IAIM resmi awal perkuliahan dan operasional pada tanggal 1 Mei 1968 yang dikemudian hari bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Tidak berselang lama, Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama juga mendirikan Perguruan Tinggi pada tanggal 8 November 1968 oleh Drs Maksum Umar Wakil Rektor NU Sunan Giri Malang. Pada saat upacara peresmian pendiriannya bersamaan dengan acara malam “Aneka Sari” yang digelar oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif yang bertempat di Balai Pertemuan Bakti Ponorogo. Perguruan Tinggi NU ini, pada awalnya bernama Universitas NU Sunan Giri (FTT NU Sunan Giri) Malang Cabang Ponorogo, sekarang menjadi INSURI (Institut Sunan Giri)

Jadi pada tahun 1968, atau era kepemimpinan Bupati Soeyoso di Ponorogo berdiri dua Perguruan Tinggi yang lahir dari dua ormas besar di Indonesia. Berdirinya Perguruan Tinggi ini menunjukkan bahwa perkembangan dunia Pendidikan di Ponorogo semakin maju. Karena salah satu Indikator kemajuan sebuah peradapan dan kunci mercusuar sebuah kebangkitan diawali dengan berdirinya kampus-kampus.

Bupati Soeyoso ini memang terkenal dengan sosok pecinta pendidikan, maka dalam kepemimpinannya lebih mendorong kepada siapapun untuk mencintai ilmu. Maka pada saat pemerintahannya ia sangat senang dengan berdirinya dua Kampus pada saat ia memimpin Ponorogo, kecintaan terhadap dunia pendidikan ini tidak hanya mendorong kepada seluruh masyarakat tetapi juga kepada keluarganya. Bupati yang memiliki sifat sederhana dan bersahaja dalam berperilaku kehidupan sehariannya ini, ia lebih mementingkan pendidikan terhadap anak-anaknya maka tidak heran banyak putra-putri Bupati Soeyoso yang berhasil menjadi Dokter. Pada akhir tahun 1968 Bupati Soeyoso mengakhiri masa Jabatannya sebagai Bupati, setelah masa jabatannya selesai ia digantikan oleh Bupati definitif yang bernama Soedono Soekirjo. Maka ia kembali kembali menempati rumah kediaman aslinya yang berada di Jalan Gajah Mada tepatnya barat Gereja Katolik.

2.18 BUPATI PONOROGO RADEN SUDONA SUKIRDJA PENDIRI STADION GBK (GELORA BATORO KATONG)



(Foto: Bupati Sudono, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Raden Sudono Sukirdjo merupakan Bupati Ponorogo yang ke 9 era pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum menjabat sebagai bupati ia adalah Kapolres Ponorogo. Pengalamannya sebagai pemimpin tertinggi di kepolisian resor daerah Ponorogo menjadi bekal terbaik ketika memimpin Ponorogo. Ia sudah terbiasa berbaur dengan masyarakat luas di Ponorogo sejak menjadi komandan pada seragam coklat tersebut.

Pak Dono, begitu panggilan akrab beliau menjadi bupati memiliki tugas berat yaitu mengamankan Ponorogo pasca pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1965. Pemberontakan PKI tersebut, tidak hanya pada Kabupaten Madiun tetapi sudah meluas keberbagai daerah disekitar seperti Ngawi, Magetan dan Ponorogo. Pengalamannya sebagai Polisi inilah menjadi guru terbaik bagi Pak Dono dalam mengantisipasi meluasnya pemberontakan PKI yang merambah ke Ponorogo.

Setelah usai pemberontakan PKI kondisi Ponorogo relatif aman, banyak Program yang dilakukan oleh kepemimpinan bupati Pak Dono. Program tersebut antara lain pembangunan SMEA Negeri pada tahun 1969, pembangunan ini dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga terampil bagi siswi-siswi dibidang ketrampilan tertentu seperti Tata Boga, Tata

Busana, dan lain sebagainya. Selain itu, ia juga melaksanakan Instruksi Presiden tentang kebijakan sekolah dasar di setiap desa dan kelurahan dengan nama SD Impres (Sekolah Dasar Instruksi Presiden).

Bupati Sudono Sukirdjo menjabat juga bersamaan dengan lahirnya REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Banyak anggaran dari pusat untuk diperbantukan pembangunan daerah. Dana tersebut, oleh Bupati Sudono Sukirdjo diperuntukan membangun berbagai fasilitas di Ponorogo seperti dimulainya pembangunan stadion Gelora Batoro Katong (GBK) pembangunan ini dirasa sangat penting untuk memfasilitasi masyarakat Ponorogo dibidang Olahraga.

Bupati Dono menyadari betul adagium *Mens sana in corpore sano* yang artinya jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat, maksudnya jika jiwa seseorang sehat, maka tubuhnya akan sehat pula dan begitu juga sebaliknya. Namun sayangnya pembangunan ini sempat berhenti karena ada seorang anak SD yang meninggal dunia karena terlindas alat berat pada saat proses pembangunan stadion berlangsung.

Selain stadion sebagai pusat kegiatan olahraga masyarakat, bupati Dono juga mempercantik pemandian balai kambang yang dirintis oleh Bupati Tjakranegara I dengan menambahi fasilitas kolam renang di sebelah barat telaga mini. Bale kambang ini dikemudian hari lebih dikenal dengan sebutan taman wisata Ngembag karena lokasinya berada di dusun Ngembag Kelurahan Ranawijayan.

Di bidang kesenian Bupati Dono juga memperkenalkan reyog sebagai kesenian Ponorogo dalam kancah Nasional pada bulan Juli 1969 saat acara pembukaan PON (Pekan Olahraga Nasional) yang ke Tujuh Di Surabaya. Tampilnya kesenian Reyog dalam kancah nasional ini dimanfaatkan sebagai media Promosi Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu Kota Budaya di Jawa Timur dan menandai bangkitnya Kesenian Reyog di Ponorogo.

Menurut Catatan yang dirilis oleh Bupati Sudono Sukirdjo Kesenian Reyog Ponorogo Pasca meletusnya pemberontakan PKI, terdapat 61 Group yang terdiri dari 1.206 anggota. Jumlah ini menurun drasatis dikarenakan agitasi Politik terhadap kesenian Reyog yang terpecah-pecah, yang berafiliasi kepada organisasi Politik termasuk hal ini PKI. Pada saat pemberontakan PKI meletus inilah banyak paguyuban

Reyog tiarap karena khawatir di cap sebagai PKI. (Kartomi, 1976)

Oleh karena itu, Bupati Ponorogo membangkitkan Jiwa masyarakat Ponoragan dengan kembali *wiri-wiri* kebudayaan dengan menampilkan Reyog pada kancah Nasional untuk membangkitkan kembali semangat berkesenian masyarakat Ponorogo. Upaya yang dilakukan Bupati Dono ini sebagai bentuk menjaga kelestarian kesenian Reyog Ponorogo.

Bupati Dono dilihat dari beberapa kebijakan saat menjabat di Ponorogo menunjukkan bahwa arah pembangunan utamanya adalah di bidang Pariwisata, hal ini tentu sebagai upaya membangkitkan perekonomian masyarakat Ponorogo melalui hal tersebut, yang dirasa sebagai salah satu andil besar dalam kontribusi Pembangunan Ponorogo.

Pada saat Bupati Dono menjabat Bupati Ponorogo, Ia juga mendapat amanat berat yaitu menyelenggarakan pemilu pertama pada era orde baru pada tahun 1971. Maka konsekuensi dari pemilihan tersebut adalah membangun gedung DPRD, hal ini mengingat setelah pasca pemilihan Umum pada tahun 1971 anggota dewan belum memiliki gedung yang representatif bagi legislator yang merupakan mitra pemerintah dalam membangun Ponorogo. Adapun pembangunan lainnya yakni gedung pendopo diperbaiki lebih menarik.

Banyak jasa yang ditorehkan Bupati Sudono Sukirdjo saat menjabat Bupati Ponorogo, Ia menjabat Bupati selama enam tahun, dimulai sejak tahun 1968 sampai dengan 1974. Seusai masa jabatannya, Ia digantikan oleh rekannya sesama Polisi yakni Bupati Sumadi.

2.19 BUPATI PONOROGO SOEMADI SOSOK MIKUL DHUWUR MENDEM JERO



(Foto: Bupati Sumadi, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Bupati Sumadi merupakan Kepala daerah Ponorogo yang ke 19, ia sebelumnya menjabat sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi di Blitar. Ia menggantikan kedudukan bupati Ponorogo yang sesama rekan di Kepolisian Bapak Sudono Sukirdjo. Bupati Sumadi resmi menjabat Bupati Ponorogo pada tanggal 28 Mei 1974. Prosesi pelantikan dilaksanakan di Gedung DPRD Ponorogo.

Bupati Sumadi ini oleh masyarakat Ponorogo dikenal sebagai seorang yang memiliki sifat *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* maksudnya bisa menjunjung derajatnya orang tua. Dalam artian selama ia menjabat bupati Ponorogo, ia menghormati para pendahulunya yang turut membangun Ponorogo. Sikap itu ia tunjukan dengan melakukan pemugaran makam para pendiri Ponorogo.

Pada tanggal 28 Agustus 1977 ia membuat kebijakan mengenai renovasi pemugaran makam Raden Batoro Katong, mengingat makam Raden Batoro Katong sudah usang setelah 450 tahun tanpa ada perbaikan. Renovasi yang dilakukan antara lain pemugaran pagar yang mengelilingi makam dengan cara ditinggikan, kemudian Cungkup makam Batoro Katong genting atap diganti dengan genting Karang Pilang Surabaya.

Pada waktu bersamaan Bupati Sumadi juga merehab beberapa makam. Selain Makam Raden Batoro Katong, ia juga merehab makam Raden Mas Mertahadinegara Bupati Pertama Kota tengah yang berlokasi di Pemakaman Tajug Siman dengan melakukan renovasi *Gedhong* dan lantainya di tegel. Hal ini supaya makamnya bersih dan membuat kenyamanan bagi para peziarah. Selain itu, Bupati Sumadi Juga merenovasi Taman Makam Pahlawan Wira Patria Paranti yang berada di Kelurahan Bangunsari.

Pada saat renovasi di area Taman Makam dahulu ada bukit kecil dan Taman yang di jadikan tempat bermain anak-anak, Karena Taman Makam Pahlawan dulu bagian dari Kantor Residen Belanda (Sekarang SMP 1) Bukit ini terkenal dengan nama Adiwarna atau Kebon Raja yang terdapat pohon Sono karena renovasi tersebut, gundukan diratakan dan ternyata ditemukan kerangka manusia yang diduga kuat adalah jenazah Warok Nurhamdan yang dibunuh oleh Belanda karena dituduh Membunuh saudara seperguruan Warok Mertapura.

Awal ceritanya adalah ketika Residen Belanda Antoni Willem Vincen melakukan kebijakan tanam paksa Kopi dan tom kepada rakyat yang hasilnya harus dijual murah kepada Belanda, selain itu Antoni Willem Vincen juga menyenangi Istri Warok Mertapura. Hal ini membuat Warok Mertapura marah dan membunuh Residen Belanda tersebut di Kantornya pada tahun 1853, kejadian tersebut membuat Belanda marah besar dengan berusaha menangkap Warok Mertapura sampai ketemu.

Upaya pencarian Belanda ini tidak berhasil, maka dengan terpaksa belanda menangkap keluarga ibu, istri dan anaknya di tahan. Meskipun upaya yang dilakukan dengan menahan keluarga, Belanda juga belum berhasil menangkap Warok Mertapura maka Pemerintahan Belanda membuat Sayembara kepada masyarakat untuk menangkap Warok Mertapura dengan imbalan Kekayaan dan Jabatan. Akhirnya Warok Mertapura berhasil ditangkap oleh rekan Seperguruan yakni Warok Nurhamdan, yang tergoda dengan imbalan dan Jabatan dari Belanda.

Warok Mertapura saat berada di dalam tahanan Belanda, ia di jenguk oleh Warok Nurhamdan sebelum Warok Mertapura dieksekusi hukuman gantung. Pertemuan dua saudara seperguruan tersebut, menjadi

curahan terakhir bagi Warok Mertapura yang dikhianati oleh teman seperguruan. Tanpa disangka ketika saat Warok Nurhamdan berkunjung, Warok Mertapura berupaya bunuh diri, ia berpendapat lebih baik mati bunuh diri dari pada mati ditangan Belanda dengan cara menusukan keris kecil seukuran jari yang digunakan membunuh Residen Belanda. Pada saat itulah, di dalam tahanan gempar Warok Mertapura telah mati, kemudian Jenasahnya di buang ke Sampah. Sedangkan Warok Nurhamdan dituduh oleh Belanda yang membunuh Warok Mertapura. Warok Nurhamdan dihukum dieksekusi pancung secara langsung tanpa menunggu proses peradilan dan jenazah mereka berdua dimakamkan di belakang kantor residen.

Raden Mertapura yang dianggap sudah mati bunuh diri, ternyata hanya pingsan. Apalagi cara penguburannya tidak sempurna sehingga Warok Mertapura dapat menggerakkan kepala dan tubuhnya keluar dari kuburnya. Dengan susah payah akhirnya Raden Mertopuro dapat melarikan diri sampai di desa Mangunsuman bertemu dengan orang dan menceritakan semua kejadian, setelah itu menghembuskan nafas terakhir oleh masyarakat kemudian dimakamkan di Palem Guruh Mangunsuman. Gundukan bukit kecil yang semula makam Warok Mertopura dan Warok Nurhamdan diratakan dan digunakan sebagai kantor kelurahan Bangunsari.

Adapun kebijakan pembangunan yang lain saat dipimpin oleh Bupati Sumadi adalah meneruskan Pembangunan Stadion Batoro Katong yang telah dirintis oleh Bupati Sudono Sukirdjo, Bupati Sumadi juga menambahi fasilitas olahraga yang lain yaitu Kolam Renang Tirta Menggala. Nama kolam renang ini, dengan mengambil dari tokoh Warok Suramenggala “Bhayangkara” yang berperan sebagai pasukan Raden Batoro Katong dalam menjaga keamanan wilayah Ponorogo.

Dalam bidang pendidikan, Bupati Sumadi juga membangun Sekolah tingkat SMP di luar Kecamatan Ponorogo, yang pertama dibangun adalah SMP N 1 Jetis. Banyaknya pembangunan pada era Bupati Sumadi ini, membuat ia dipercaya memimpin Ponorogo pada periode kedua pada tahun 1979 sampai dengan 1984. Pada periode kedua kepemimpinannya kebijakannya adalah di bidang Kesehatan dengan mendirikan PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) di setiap

kecamatan sehingga memudahkan akses kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada saat era Bupati Sumadi kondisi pertanian di Ponorogo juga sangat maju. Banyak petani yang senang karena hasil pertaniannya melimpah. Prestasi dibidang pertanian ini, membuat Bupati Sumadi memperoleh penghargaan dari Presiden pataka “Pra Samnya Purya Karya Nugraha” yakni simbol penghargaan atas keberhasilannya menyediakan surplus pangan beras. Bupati Sumadi menjabat sebagai bupati Ponorogo selama 10 tahun sejak tahun 1974 sampai 1984, setelah tidak menjabat ia kembali ke daerah asalnya di Surabaya.

2.20 BUPATI PONOROGO SOEBARKAH PUTRA HADIWIRYA PENCETUS GREBEG SURA



(Foto: Bupati Soebarkah, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Pada setiap malam satu sura ada kebiasaan masyarakat Ponorogo dengan melaksanakan muhasabah atau intropeksi diri dengan berkumpul di salah satu rumah sesepuh dalam suatu masyarakat di kampung dengan melakukan berbagai aktifitas seperti mendengarkan *wejangan*, sejarah yang diwariskan secara turun temurun serta doa keselamatan kepada Illahi Robbi bagi masyarakat Ponorogo pada khususnya.

Kebiasaan ini kemudian dilanjutkan dengan begadang atau *lek-lekan* dengan jalan-jalan mengelilingi kampung dan berkumpul di alun-alun. Menurut sebagian kepercayaan masyarakat Ponorogo, Pada malam satu sura banyak para warok melakukan pendadaran dan kaderisasi

kepada calon warok dengan menurunkan ilmunya kepada siswa warok. Orang yang sudah memperoleh gelar warok dalam masyarakat memiliki tugas berat sebagai pemimpin, pelindung, dan pengayom masyarakat.

Tugas tersebut, sudah sejak zaman dahulu melekat pada warok. Warok pada waktu itu memiliki peran penting menjadi punggawa kerajaan Wengker yang bertugas mengamankan suatu wilayah. Seperti Warok Hanggalana (Sukorejo), Warok Suramenggala (Balong), Warok Surahandaka (Jetis), Warok Sura Gentho (Bungkal), Warok Singokubra (Slahung), Warok Guna Seca (Siman) dan Warok Singabawa (Jenangan).

Melihat Tradisi masyarakat Ponorogo seperti itu, Bupati Soebarkah Poetra Hadiwirya memiliki sebuah gagasan mengelola tradisi dalam sebuah acara untuk melestarikan budaya yang hidup di masyarakat Ponorogo dengan mewadahi sebuah acara grebeg Sura. Acara ini kemudian dikemas dengan berbagai kegiatan yang arahnya adalah pelestarian budaya seperti Festival Reyog Nasional serta Pengukuhan Warok Kehormatan bagi orang-orang yang telah berjasa terhadap Ponorogo, Pawai Lintas Sejarah dari Kota Lama menuju Kota Sekarang ini serta Larungan Risalah Doa.

Bupati Soebarkah Poetra Hadiwirya adalah bupati Ponorogo ke 10 era Kemerdekaan Republik Indonesia ini pembangunannya lebih banyak mengarah kepada Budaya. Hal dikarenakan melihat potensi Ponorogo yang sangat kaya dengan kesenian dan budaya yang ada di Masyarakat Ponorogo. Maka dari itu setelah ia dilantik sebagai Bupati Ponorogo pada hari Kamis Pahing Tanggal 15 Ramadhan 1404 H atau bertepatan dengan tanggal 14 Juni 1984 ia membuat motto pembangunannya adalah “INTAN GANDINI” yang memiliki kepanjangan “Industri, Pertanian, Olahraga, Pendidikan dan Kesenian”

Motto tersebut, diperoleh berdasarkan pemikiran dan penghayatannya terhadap potensi Ponorogo. Bupati yang sebelumnya menjabat Kadindik (Kepala Dinas Pendidikan) Provinsi ini, paham betul mengenai makna dari motto tersebut, selain sebagai visi misi pembangunan, juga sebagai upaya strategis pendekatan kepada Jiwa masyarakat Ponorogo, mengingat Bupati Soebarkah berasal dari Surabaya. Upaya strategis pendekatan melalui motto dengan mengambil kata terakhir dari motto yang tidak asing bagi masyarakat Ponorogo yakni

Gandini. Gandini merupakan wanita hindu pertama di Ponorogo yang masuk agama Islam, yang tidak lain adalah Istri Raden Djoko Pitoeroen.

Sehingga secara emosional terjalin kedekatan dengan masyarakat Ponorogo, hal ini terbukti ketika resmi dilantik sebagai bupati Ponorogo. Bupati Soebarkah berbaur dengan ratusan Warok Ponorogo berpakaian adat Panaragan hitam-hitam bersama *Konca* Reyog beserta Ribuan Massa yang berkumpul di alun-alun.

Dalam aplikasi kebijakan Bupati Soebarkah selama menjabat bupati pun tidak lepas dari kebudayaan. Hasilnya antara lain ialah menggelar pentas pagelaran wayang kulit yang digelar di Paseban, wayang kulit ini merupakan hiburan edukatif bagi masyarakat luas yang memiliki unsur-unsur filosofis. Pagelaran wayang kulit ini digelar setiap Kamis pahing atau bertepatan malam Juma'at Pon. Dalangnya berasal dari Ponorogo, hal ini sebagai upaya memunculkan seniman-seniman lokal, sehingga harapannya bisa pada kancah Nasional.

Selain itu dari segi aspek pembangunan, bupati Soebarkah merenovasi Makam Ulama sekaligus Umaro Ponorogo Raden Djoko Pitoeroen. Ia juga membuat kebijakan mendirikan tugu-tugu Reyog di setiap kelurahan atau balai desa serta tugu Reyog yang berada di Mlilir perbatasan Madiun dan di perbatasan Trenggalek. Hal sebagai upaya mempertegas bahwa Ponorogo adalah kota Reyog. Bupati Soebarkah ini menjabat di Ponorogo berlangsung selama satu periode. Dimulai tahun 1984 dan berakhir masa Jabatannya pada tahun 1989, setelah tidak menjabat beliau kembali ke daerah asalnya di Surabaya.

2.21 BUPATI PONOROGO GATOT SUMANI SOSOK PEDULI LITERASI



(Foto: Bupati Gatot Sumani, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Bupati Gatot Sumani merupakan bupati Ponorogo yang ke 21 atau ke 11 setelah Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berasal dari kota Surabaya, menggantikan posisi sesama rekan dari Surabaya yakni Drs. Soebarkah Poetro Hadiwiryono. Sebagai Bupati baru, didaerah baru tentu memerlukan adaptasi dan menjalin kedekatan dengan masyarakat Ponorogo. Salah satu cara menjalin kedekatan tersebut, Bupati Gatot mempunyai motto pembangunan di Ponorogo dengan motto pembangunan “SIMPATI” bisa dikatakan Simpati adalah sebuah perasaan yang menaruh perhatian kepada rakyat. Lebih dari itu, kata simpati oleh bupati Gatot diterjemahkan dalam motto pembangunan dengan arti “Siap Menuju Ponorogo Aman Tertib dan Indah”.

Moto Pembangunan tersebut bukan hanya slogan dan pepesan kosong, tetapi sebuah visi singkat padat dan tepat. Untuk mewujudkan motto pembangunan tersebut, Bupati Gatot membuat Program-program untuk direalisasikan di Masyarakat. Diantara program yang menarik adalah Bupati Gatot mengumpulkan para warok, yang mana sebagai sesepuh dan tokoh sosial di Masyarakat yang memiliki peran sentral sebagai pengayom dan pelindung rakyat.

Tujuan mengumpulkan para warok tersebut adalah membahas Pedoman Kesenian Reyog Ponorogo dalam pentas Budaya Bangsa yang perlu adanya dibakukan. Tujuannya adalah pendokumentasian, membina serta penghayatan terhadap kebudayaan Ponorogo pada umumnya, dan kesenian Reyog khususnya sebagai warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang mana masih adanya perbedaan persepsi terhadap seni Reyog, baik dari kemasan, atraksi, peragaan serta standar mutunya.

Sehingga diharapkan dari sarasehan para warok Ponorogo diterbitkan sebuah Pedoman yang dibukukan untuk memperkaya khasanah kepustakaan tentang Reyog Ponorogo yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memupuk, membina dan meningkatkan apresiasi terhadap Seni Reyog Ponorogo sekaligus sebagai pedoman dalam Pentas. Hal ini mengingat masih sedikitnya buku-buku mengenai kesenian Reyog, yang jika tidak mau dikatakan langka dalam kepustakaan di Ponorogo sendiri yang mana sebagai tempat lahirnya kesenian adiluhung ini.

Kepedulian Bupati Gatot terhadap dunia literasi di Ponorogo tidak berhenti pada itu saja, Ia juga mendokumentasikan dan Memetakan Kekayaan Ponorogo di berbagai bidang yang ada di wilayah-wilayah Kecamatan yang ada di Ponorogo dengan menerbitkan sebuah Buku yang berjudul Mengenal potensi dan dinamika Ponorogo yang diterbitkan pada tahun 1994. Jadi selama ia menjabat sebagai bupati ada dua buku penting yang dapat diwariskan kepada generasi masyarakat Ponorogo. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati Gatot memiliki kepedulian terhadap dunia Literasi, dunia yang memberi pencerahan bagi siapapun yang menginginkan sebuah perubahan.

Untuk melengkapi serta menunjang informasi kesenian dan kebudayaan Ponorogo selain dalam penerbitan buku, Bupati Gatot juga melengkapi fasilitas tempat untuk mengembangkan kesenian dengan mendirikan Gedung Kesenian yang lokasinya berada di jalan Pramuka. Gedung Kesenian ini dinamakan “Padepokan Reyog” yang sekaligus untuk Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan Olahraga. Dipilihnya Padepokan Reyog di Jalan Pramuka ini sebagai zonasi fasilitas kebudayaan, dan olahraga yang ada seperti kolam renang, stadion dan fasilitas olahraga yang lain.

Adapun di bidang Perekonomian, Bupati Gatot merehab pasar legi selatan atau yang lebih dikenal pasar *lanang* dengan konsep dua lantai. Pasar ini mengkhususkan jualan yang berkaitan dengan pakaian atau kebutuhan sekunder lainnya. Pembangunan ini juga melengkapi pasar *wedok* yang sudah berdiri yang mengkhususkan kebutuhan primer masyarakat. Harapannya, dengan dibangunnya sarana perbelanjaan tradisional tersebut, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi yang mana agar tidak kalah bersaing dengan pasar modern yang mulai merambah kota Ponorogo.

Simpati Bupati Gatot terhadap rakyat memang tergolong tinggi, tidak hanya membangun rakyat dalam bentuk fisik dan fasilitas nagari namun juga disertai membangun sumber daya insani agar masyarakat peduli terhadap dunia literasi. Maka tidak heran sosok bupati Gatot Sumani sebagai salah satu Bupati yang peduli terhadap Literasi. Bupati Gatot ini menjabat sebagai bupati Ponorogo selama satu periode dimulai sejak tahun 1989 dan berakhir masa Jabatannya pada tahun 1994 setelah ia tidak menjabat sebagai Bupati Ponorogo ia kembali ke daerah asalnya Surabaya dan kedudukannya digantikan oleh Bupati Markum Singodimedjo.

2.22 BUPATI PONOROGO MARKOEM SINGADIMEDJA SANG FENOMENAL



(Foto: Bupati Markum Singodimedjo, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Dr. HM. Markum Singodimedjo adalah nama yang tidak asing bagi Masyarakat Indonesia, khususnya Ponorogo. Sebab ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pilihan IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban dengan raupan suara terbesar ke 2 dengan perolehan suara 75.611. Bahkan sebelum menjadi anggota Dewan Dr. HM Markum Singodimedjo, menjabat sebagai Bupati Ponorogo selama dua periode. Masa bakti pertama tahun 1995-1999 dan untuk masa jabatan yang kedua pada tahun 1999-2004.

Pak Markum, demikian sapaan akrabnya di masyarakat Ponorogo, adalah seorang yang mengerti, mendalami dan memahami sosiologis masyarakat Ponorogo dengan baik. Ia memiliki wawasan sosial yang mumpuni. Pemikirannya cemerlang mampu memahami dengan kritis perkembangan pemikiran yang terjadi pada masanya. Sebagai seorang yang tahu kondisi masyarakat Ponorogo. Ia mempunyai motto pembangunan REOG (Resik Endah Omber dan Girang Gemirang). Membangun identitas Ponorogo sebagai kota Reyog dengan patung-patung diperempatan jalan maupun diarea alun-alun. Sehingga Alun-alun terkenal dengan sebutan Blok M yang artinya area Macan karena tepat di depan Paseban Alun-alun terdapat 7 ekor harimau yang menggambarkan diorama Penaklukan Singobarong oleh Raja Klanasewandana.

Pak Markum dilahirkan di kabupaten Malang pada tanggal 16 Agustus 1945 atau satu hari sebelum Indonesia Merdeka. Ia menamatkan studi dasar di SR (Sekolah Rakyat) pada tahun 1958. Pada tahun 1961 ia menamatkan pendidikan jenjang SMP di SMP X, setelah itu ia melanjutkan jenjang SMA di SMA teladan Surabaya pada tahun 1964. Gelar Sarjananya, ia selesaikan di Universitas 17 Agustus 1945 dan lulus pada tahun 1970 sebelum di Untag Surabaya ia juga kuliah di kampus berbeda tepatnya di IPN lulus tahun 1967. Jadi Bupati Markum memperoleh gelar sarjana pada dua Universitas yang berbeda. Semangat belajar pada bangku perkuliahan tidak berhenti disitu saja, ia kemudian melanjutkan ke jenjang Pascasarjana di Universitas Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa bupati Markum seseorang yang haus akan ilmu dan pada tahun 2003, ia memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari NCGU.

Kepemimpinan Bupati Markum Singodimedjo di Ponorogo secara resmi dimulai sejak tahun 1995 menggantikan kedudukan bupati sebelumnya Drs. Gatot Sumani. Kepemimpinannya berlangsung selama dua periode. Masa bakti pertama tahun 1995-1999 dan untuk masa jabatan yang kedua pada tahun 1999-2004 dengan didampingi wakilnya H. Muryanto, SH dari PDI Perjuangan. Dalam kepemimpinan Bupati Markum Singodimedjo sebagai Bupati Ponorogo banyak memberi kontribusi pemikiran maupun pembangunan yang dilakukan untuk memajukan Ponorogo dari berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya.

Pembangunan bupati Markum antara lain di bidang Budaya merubah kirab prosesi pemindahan kota lama ke kota baru tidak berjalan kaki, tetapi menggunakan dokar serta routenya disesuaikan dengan aslinya dimulai dari Makam Raden Batoro Katong menuju Rumah Dinas Bupati di Kelurahan Mangkujayan.

Pada tahun 1996, bupati Markum mengundang para sejarawan, budayawan, serta sesepuh Ponorogo guna melakukan sebuah kajian penelitian dan penggalian data guna mencari sejarah Ponorogo untuk penentuan Hari Jadi Ponorogo, berdasarkan Hasil Kajian tersebut ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 1496 M. Penentuan Hari jadi ini, kemudian diperingati setiap tahunnya dengan menggelar Festival Reyog Mini sebagai wadah mencari bibit-bibit seniman Reyog di Ponorogo.

Bupati yang memiliki hobi olahraga ini, juga melestarikan kesenian Reyog dengan memprakarsai pentas malam bulan purnama yang bertempat di panggung alun-alun. Pada setiap bulannya, diwakili dari paguyuban-paguyuban Reyog yang ada di Ponorogo. Acara ini selain untuk melestarikan kesenian Reyog, juga sebagai upaya untuk menghidupkan sisi pariwisata maupun perekonomian masyarakat seiring dengan ramainya perkembangan kota Reyog.

Dari sisi pembangunan desa, Bupati Markum juga mempunyai gagasan GEMPUR AC (Gerakan Menanam Pohon Untuk Anak Cucu) dengan menghijaukan Gunung di Desa Pager Ukir Sampung. Adapun pada aspek perkotaan bupati Markum membangun berbagai sarana seperti Gedung DPRD, Gedung Krida Praja dengan memiliki Lantai 8 Gedung Pemerintahan termegah di Jawa Timur dengan arsitektur bangunan eropa, dan Gedung Sasanan Praja.

Banyaknya karya-karya fenomenal beliau selama menjabat Bupati, membuat Ponorogo berhasil memperoleh berbagai Penghargaan diantaranya Piala Kalpataru atas keberhasilannya menghijaukan Ponorogo dengan gerakan menanam, kemudian pada tahun 1997 memperoleh piala Adipura dengan Kota bersih, untuk menandai keberhasilan tersebut Bupati Markum membuat patung warok Ponorogo dengan mengangkat piala Adipura yang ditempatkan di perempatan Pasar Legi.

Atas perannya dalam mengemban amanah sebagai Bupati Ponorogo, Bupati Markum memperoleh penghargaan dan tanda Jasa dari Pemerintah antara lain Lencana Satria Bhakti Husada Arutala di Bidang Kesehatan, Bidang Dharma Budaya atas keberhasilannya membangun masyarakat Ponorogo sebagai Kota Budaya, Satya Karya Satya di Bidang Pengabdian, Satya Lencana Pembangunan di bidang Pertanian, dan Manggala Karya Kencana di bidang Keluarga Berencana.

2.23 BUPATI PONOROGO MURYANTO PECINTA MUSIK CAMPURSARI



(Foto: Bupati Muryanto, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Bupati H.Muryanto,SH merupakan Bupati Ponorogo ke 13 Ponorogo sejak era Kemerdekaan. Bupati Muryanto lahir pada 1 Juli 1963 di Ponorogo. Ia berasal dari *kulon kali* atau istilah lain untuk menyebutkan wilayah kota barat tepatnya desa Sumoroto Kauman Ponorogo. Salah satu

desa yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi Ponorogo.

Pada tahun 1971, Muryanto bersekolah formal di Sekolah Dasar 1 Sumoroto dan tamat pada tahun 1977. Setamat dari SDN 1 Sumoroto Ia melanjutkan ke jenjang lebih tinggi masuk pada SMP Negeri 1 Ponorogo, yang merupakan salah satu sekolah favorit di Ponorogo dan selesai pada tahun 1980. Setelah dari SMP N 1, ia melanjutkan sekolah di SMA PGRI 1 Ponorogo serta lulus pada tahun 1983. Gelar Sarjana Hukumnya diperoleh dari Unmer Ponorogo pada tahun 1987.

Seusai menimba ilmu di bangku perkuliahan ia merintis karier dengan mengembangkan usahanya dan turut aktif dalam kegiatan Politik. Keterlebitan di dunia Politik, diawali dengan bergabung pada PDI Perjuangan dengan mendapat amanat sebagai Bendahara Umum DPC (Dewan Pimpinan Cabang), dari partai berlambang banten moncong putih inilah mengantarkannya menjadi wakil bupati Ponorogo mendampingi Bupati Markum Singodimedjo yang berasal dari partai Golkar pada masa bakti 1999 sampai dengan 2004.

Selama menjabat sebagai wakil bupati, ia bersama bupati Ponorogo Markum Singodimedjo banyak melakukan perubahan dan pembangunan kota Ponorogo. Hasil pembangunan pada era duet kepemimpinan tersebut antara lain membangun pasar disetiap sudut kecamatan Ponorogo, hal ini didasari bahwa salah satu jalan mempercepat laju perekonomian kerakyatan adalah Pasar. Hal sebagai upaya menggairahkan perekonomian Ponorogo yang sempat lesu setelah dihantam krisis moneter pada tahun 1997/1998.

Pasangan ini juga mempercantik penampilan alun-alun Ponorogo dengan menambahi fasilitas seperti Panggung Utama alun-alun sebagai tempat berbagai even atau acara. Selain itu, pada setiap sudut alun-alun dibangun patung macan sebagai simbol dan identitas masyarakat Ponorogo sebagai kota Reyog, pun demikian pada kompleks kabupaten. Selain itu, di pinggir jalan Kabupaten dulu juga diberi *gupon* atau tempat sangkar burung dara, burung dara ini sengaja dipelihara dalam sangkar selama beberapa bulan dan akhirnya dilepaskan untuk menghiasi kompleks alun-alun dan sekitarnya.

Pada tahun 2003, atau selang satu tahun menjelang masa berakhir kepemimpinannya ia bersama bupati Markum memindahkan terminal yang semula berada di kelurahan Tonatan beralih lokasi di Cekok Babadan. Terminal yang baru ini kemudian diberi nama terminal Seloadji, yakni mengambil salah satu nama tokoh dalam babad Ponorogo yang berperan sebagai patih raden Djoko Pitoeroen. Pemberian nama ini sebagai upaya mengingat jasa dan perjuangan para pendahulu, yang dahulu pernah berjasa terhadap berdirinya kabupaten Ponorogo.

Pada saat tahun 2004, Bupati Markum mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI maka konsekuensinya ialah melepaskan kedudukannya sebagai Bupati Ponorogo. Maka untuk mengisi kekosongan Bupati pada waktu itu, Bupati Muryanto ditetapkan sebagai Bupati menggantikan Bupati Markum. Ia menjabat Bupati Ponorogo selama satu tahun, atau istilahnya penjabat singkat sementara. Sehingga pada era bupati Muryanto ini tidak banyak melakukan kebijakan strategis yang dilakukan karena menyangkut keterbatasan kewenangan saat menjabat Pelaksana tugas.

Setelah Usai Jabatannya sebagai wakil bupati, ia mencoba mencalonkan Bupati Ponorogo bersama pasangan Moch Supadjar dalam pemilu 2005 yang di usung PDIP. Pemilu 2005 diikuti oleh tiga pasangan yang lain yaitu Muhadi-Amin yang di usung PKB dan PKS, Namun pada pemilu 2005 Calon Bupati Muryanto kalah bersaing merebutkan suara masyarakat dengan Muhadi Amin calon sesama dari *kulon kali*.

Setelah gagal pada pemilu bupati 2005, ia kembali kepada habitatnya mengembangkan usahanya yang telah dirintis sejak muda pada tahun 1982 yakni memiliki sebuah Toko Muda Jaya Sumoroto, selain itu ia juga menjadi Manajer pada sebuah Even Organizer yang bernama EMJIE. Nampaknya naluri berpolitiknya tidak bisa ditinggalkan, ia kembali berkecimpung dalam Partai Politik namun berbeda dengan partai terdahulunya. Ia bergabung dengan Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) dan didaulat sebagai Ketua dewan Penasehat dari partai yang didirikan oleh Purnawirawan Jendral Wiranto.

Bupati yang memiliki hobi mendengarkan musik capursari ini, kembali mencoba peruntungan di dunia Politik dengan kendaraan berbeda baik Partai PDI Perjuangan maupun Hanura. Ia lebih memilih dengan kendaraan baru partai yang didirikan oleh Surya Paloh yakni

Partai Nasdem. Di Partai Nasdem ia didaulat sebagai salah satu Bakal Calon Legislatif Propinsi Jawa Timur pada pemilihan Umum tahun 2014 dengan memperoleh nomer urut dua daerah Pemilihan 7 yang meliputi Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan dan Trenggalek, namun sayangnya dewi fortuna belum menghingapi bapak dua anak ini.

2.24 BUPATI PONOROGO MUHADI SUYONO KAYA PRESTASI BERGENGSI



(Foto : Bupati Muhadi Suyono, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Muhadi Suyono merupakan bupati ke 24 Ponorogo sejak dimulainya pemerintahan belanda di Ponorogo. Ia merupakan asli putra daerah kelahiran 28 Desember 1945. Ia dibesarkan dalam tradisi NU yang kuat. Nuansa keagamaan yang kental serta tempaan disiplin yang ketat dari kedua orang tua, membuat Muhadi sebagai sosok yang tangguh dan disiplin.

Sejak kecil, Muhadi Suyono telah belajar mandiri, semasa sekolah Jiwa tersebut semakin terasah ketika ia bergabung dengan organisasi IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama), salah satu badan otonom milik Nahdatul Ulama ini, karier aktivisnya pun berlanjut hingga masa-masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Ia bergabung dengan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Pengalaman di dunia aktivis tersebut membuat jiwa kepemimpinan dan manejerialnya terbentuk.

Setelah lulus kuliah ia pernah bekerja sebagai dosen Universitas Merdeka pada Fakultas Hukum, setelah itu kariernya terjun dalam dunia birokrasi sebagai PNS ia tempuh dengan penuh dedikasi. Ia mengawali karier di dunia birokrasi sebagai staf perundang-undangan di DPRD, tidak berselang lama kariernya naik menjadi kepala bagian Perundang-undangan, kepala bagian hukum, kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian Pendapatan, Kepala BP-7 hingga menjadi Sekertaris Daerah Kabupaten Probolinggo masa bakti 1997-2005.

Kemampuannya di birokrasinya sudah tidak diragukan lagi, meski begitu ia tidak pernah berhenti semangat belajar menuntut ilmu untuk memperbarui dan menunjang kemampuannya. Semangat tersebut ia lakukan dengan belajar keberbagai negara dengan mengikuti kursus pendidikan dan kedinasan baik tingkat Nasional maupun Internasional seperti pelatihan Manajemen Pembangunan di Belanda, Inggris, perancis dan belgia.

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2005 ia mendapatkan amanah dari rakyat Ponorogo sebagai Bupati Ponorogo bersama pasangannya Amin. Di bawah kepemimpinannya, Ponorogo mengalami banyak perubahan. Kebijakan pembangunannya dikelola berdasarkan prinsip keseimbangan antara desa dan kota. Sehingga banyak program pembangunan yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh rakyat secara merata baik di desa maupun di kota.

Di masa era kepemimpinannya, banyak prestasi dan penghargaan berhasil diraih Kabupaten Ponorogo, baik tingkat Provinsi maupun Nasional. Selama menjabat sebagai bupati, tercatat 35 lebih penghargaan yang berhasil diraih oleh kabupaten Ponorogo. Penghargaan tersebut antara lain Pada tahun 2006 mendapat penghargaan dari seniman Indonesia Anti Narkoba dalam pelestarian Budaya Seni Tradisional Reyog Ponorogo dan aktif kampanye anti Narkoba.

Pada tahun 2007 Ponorogo tiada hari tanpa prestasi, tercatat dalam tahun ini ada 7 penghargaan yang di terima oleh Bupati antara lain Memenangkan Otonomi Award dalam kategori terobosan Inovatif bidang pemerataan Ekonomi dari The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, serta Inovasi di Bidang Akuntabilitas Pemerintah dari Lembaga yang sama. Juara 1 Keluarga Berencana Award Kategori Pembiayaan dari Provinsi

Jawa Timur, Kemudian menerima Penghargaan Sebagai Pengelola Terbaik Program Bina Keluarga Balita, Tingkat Provinsi Jawa Timur. Di Bidang Kesehatan memperoleh Juara 1 Puskesmas Berprestasi dengan Inovatif tingkat Provinsi Jawa Timur diwakili Puskesmas Jenangan.

Sementara itu, Ponorogo pada tahun 2008 menempati nominasi otonomi award kategori sebagai daerah dengan terobosan inovasi bidang pelayanan administrasi dasar, kemudian juga memperoleh pemenang dibidang terobosan pertumbuhan ekonomi. Kedua penghargaan tersebut dari Jawa Pos Institute of Pro otonomi. Selain itu, Ponorogo kembali memperoleh piala Adipura setelah sekian lama berpuasa selama 11 tahun tidak memperoleh Piala bergensi di bidang Kebersihan lingkungan ini. Penghargaan bergensi lainnya ia peroleh dari kepala BKKBN Pusat dengan memperoleh Manggala Karya Kencana dalam pelaksanaan Keluarga Berencanaan Nasional. Serta menduduki lima Besar dalam lomba tari tradisional se Indonesia Kategori iringan tari. Adapun Penghargaan yang diterima secara pribadi oleh Bupati Muhadi Suyono, di antaranya adalah Satya Lencana Pembangunan (Anugrah Pertumbuhan Ekonomi), Parahita Ekapraya (Anugrah President dalam Kesetaraan Gender), Widyakrama (Anugrah Presiden di bidang Pendidikan) dan masih banyak yang lainnya.

Banyaknya penghargaan tersebut, menunjukkan bahwa bupati yang menganut prinsip sedikit bicara banyak bekerja ini sebagai sosok bupati yang berpengalaman, santun, pekerja keras dan cerdas. Bupati yang tinggal di jalan Bhayangkara ini selesai masa jabatannya tahun 2010, ia mencoba kembali menjadi bupati pada periode kedua namun gagal, kalah bersaing dengan wakil yang dulu ia ajak bersama dalam membangun Ponorogo. Pada tanggal 12 September 2012 bupati Muhadi menghadap ke rahmatulloh pukul 21/05 Wib di RSUD Ponorogos, dan jenazahnya di makamkan dipemakaman Tamarum.

2.25 BUPATI PONOROGO AMIN SOSOK YANG RAMAH



(Foto: Bupati Amin, Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Bupati Amin merupakan Bupati Ponorogo yang ke 25. Ia merupakan bupati asli kelahiran Ponorogo tepatnya dari *kutho kulon* di desa Tosanan Kauman lahir pada tanggal 7 Agustus 1953. Sebagai seorang yang tumbuh dewasa di wilayah *kulon kali* budaya Jawa sangat kental utamanya yang berkaitan dengan pola sosial yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, maupun *tata krama*.

Hal ini merujuk bahwa wilayah *kulon kali* dahulu merupakan daerah yang terkenal memiliki sejarah tinggi. Konon Kerajaan Bantarangin berdiri tahun 1200 yang terkenal dengan Raja Klanasewandana, yang merupakan asal muasal lahirnya kesenian Reyog Ponorogo. Pun demikian di wilayah Sumoroto dulu merupakan Wilayah Kabupaten sendiri, dengan menganut sistim Kerajaan. Adipati pertamanya adalah Prawiradirja putra dari Raden Wirareja keturunan ke 12 Prabu Brawijaya V. Kedua, Raden Mas Tumenggung Sumaonegara, Bupati Ketiga Raden Mas Bratadirja dan Keempat Raden Mas Bratadingrat.

Semua trah keturunan Bupati Sumoroto secara konsisten menentang penjajahan Belanda. Maka dari itu, semua keturunannya tidak ada yang menjadi pejabat pemerintahan, kecuali Raden Mas Haryogi yang menjadi Bupati Ponorogo. Itu pun setelah penjajahan Belanda sudah

berakhir di Indonesia. Berdasarkan historis tersebut, maka secara tidak langsung membentuk lingkungan dan kepribadian masyarakat yang melekat kuat, bagi warganya.

Hal demikian tentu juga membentuk kepribadian Bupati Amin. Bupati yang memiliki hobi tenis meja ini terkenal dengan karakter ramah, sopan santun dan menghargai semua kalangan. Bupati amin menempuh Pendidikan formalnya di SD Semanding 1 pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1967, kemudian melanjutkan Jenjang SMP diujian Persamaan Surabaya pada tahun 1984 dan selesai 1987, SMA-nya ia selesaikan pada Program Paket C pada tahun 1999 sampai 2002. Gelar Sarjananya diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Ponorogo pada tahun 2006 dan Lulus pada tahun 2010.

Semasa muda, Bupati Amin aktif dalam kegiatan di masyarakat. Keaktifannya ia tunjukan sebagai ketua GP Ansor cabang Kauman periode tahun 1975-1980, sentuhan di pergerakan Islam di bawah payung Nahdatul Ulama ini membuat pribadi Amin memiliki jiwa sosial dan dakwah semakin terasah. Ia dipercaya oleh Masyarakat untuk mengisi pengajian-pengajian sehingga bupati Amin mulai banyak dikenal oleh masyarakat luas sebagai dai.

Pada tahun 1982 ia di percaya mendapat amanat sebagai ketua cabang KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang mewakili dari Unsur GP Ansor. Dipilihnya amin sebagai Ketua Cabang KNPI Kauman ini, karena kiprah Amin sudah tidak diragukan dalam manajemen Organisasi maupun pengalaman di dunia kepemimpinan selama menjabat Ketua GP Ansor Kauman.

Meroketnya Amin di dalam aktifitas sosial di masyarakat, membuat ia dipercaya menjadi Kepala Desa Tosanan selama 16 tahun atau selama 2 periode. Periode pertama tahun 1990 sampai dengan 1998 dan periode kedua tahun 1998 -2006. Selama menjadi kepala desa, ia dipercaya oleh paguyuban kepala desa dan perangkat untuk menjadi ketua paguyuban periode 2000-2005. Tentu konsekuensi sebagai ketua, ia menaungi kepala desa seluruh Ponorogo, sehingga menambah pergaulan dan koneksi semakin luas.

Kiprahnya sebagai Ketua Paguyuban Kepala desa dan perangkat ini, kemudian ia dilirik menjadi wakil Bupati oleh Muhadi Suyono pada pemilihan kepala daerah tahun 2005. Pertarungan kepala daerah ini diikuti oleh 4 Kontestan. Pasangan pertama Muhadi-Amin, Pasangan Kedua, Supadjar-Muryanto, Pasangan Ketiga Supriyanto-Handoko Sudrisman dan pasangan Keempat Yuli Nursanto-Sunarno.

Pemilu 2005 ini, pasangan Muhadi-Amin mengguguli diantara pasangan lainnya sehingga karier politik Amin menjadi naik dari Kepala Desa menjadi Wakil Bupati. Pada saat jadi Wakil Bupati, Amin dipercaya didaulat sebagai Ketua Kwartir Pramuka periode 2006-2011. Setelah masa periode Wakil Bupati selesai tahun 2010. Ia menjalonkan jadi Bupati bersama dengan pasangan Yuni Widyaningsih yang aktif menjadi anggota DPRD dengan perolehan suara terbesar di Ponorogo melalui partai Golongan Karya.

Pada Pemilu 2010 inilah, Amin dipercaya oleh rakyat Ponorogo menjadi Bupati periode 2010-2015 mengalahkan dua pasangan lainnya yaitu Muhadi Suyono-Yusuf Pribadi dan Supriyanto-Nyamut Suseno. Bupati Amin ini kemudian ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur diawal Ramadhan, tanggal 12 Agustus 2010. Ia dalam motto pembangunannya adalah “Menyatukan, Cipta, Rasa, dan Karsa Agawe Rahuyu Bumi Reyog”

Hasil pembangunan kepemimpinan periode ini antara lain Renovasi Pendopo Kabupaten Ponorogo beserta Paseban, membangun gedung terpadu Lantai 6 dibekas lahan terminal lama serta pembangunan Monumen Bantarangin di desa Sumoroto Kauman, yang mana tempat ini diduga sebagai Kerajaan Bantarangin tempo dulu dan diresmikan oleh Bupati Amin pada bulan Januari tahun 2011. Setelah tidak menjabat Bupati Ponorogo, Bupati Amin kembali berdakwah di Masyarakat dan mengelola Koperasi Bantarangin yang telah dirintisnya.

2.26 BUPATI PONOROGO MASKUR SANG AHLI PETERNAKAN



(Foto : Ir. H. Maskur, M.M., Dokumen : Dinas Arsip Ponorogo)

Bupati Ponorogo yang ke 26 setelah Indonesia Merdeka adalah Ir. H. Muhammad Maskur, M.M. ia resmi menjabat bupati pada tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 15 Pebruari 2016. Ia mengantikan kedudukan Bupati Amin yang masa baktinya telah habis pada tanggal 12 Agustus 2015, maka untuk sementara waktu guna mengisi kekosongan roda pemerintahan, maka diisi oleh Bupati Maskur yang semula adalah kepala dinas Peternakan Jawa Timur. Pelantikan Bupati Maskur dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo.

Ditetapkannya Ir. H. M Maskur, M.M. sebagai Bupati Ponorogo berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 1135-4695 Tahun 2015, bersamaan dengan 3 kepala daerah lainnya yang berasal dari Kabupaten Lamongan, Kediri dan Blitar. Bupati kelahiran 20 Juli 1956, ini salah satu misi utamanya yang diamanatkan oleh Gubernur Soekarwo adalah mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2015, yang salah satunya adalah Kabupaten Ponorogo.

Pemilu Bupati Ponorogo diikuti dengan 4 Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Ketiga calon tersebut adalah pertama pasangan Sugiri dan Sukirno yang diusung Partai Demokrat, PKS, dan Golkar, pasangan nomer urut dua yaitu *Incumbent* Amin dan Agus Widodo yang diusung PKB dan PDIP Pasangan Ketiga Misranto-Isnén dari Independent dan

yang pasangan urut keempat adalah Ipong Muchlissoni-Djarno yang diusung oleh Gerindra, PAN dan Nasdem.

Banyaknya kandidat Bupati Ponorogo yang mayoritas diusung oleh Partai Politik kuat membuat Pemilu rawan konflik antar pendukung diarus bawah, oleh karena itu untuk menjaga Ponorogo agar tetap kondusif maka salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Bupati Maskur adalah mengundang semua kandidat dalam jamuan makan kepada empat pasangan calon Bupati untuk silaturahmi dan menjaga agar pemilu Ponorogo berjalan aman. Sehingga kekompakan dan kerukunan diantara pasangan calon bisa menjadi teladan bagi para pendukungnya.

Bapak yang dikaruniai tiga orang anak yang bernama Lexy Fatharany Kurniawan, Luky Dafira Nugroho, Lulytha Rahmanike Putri, selain misi utamanya menjalankan amanat mensukseskan pemilu, ia juga memprioritaskan sektor-sektor agrobisnis, pertanian dan pariwisata agar menjadi lebih baik. Prioritas tersebut, dikarenakan berdasarkan letak geografis Ponorogo yang sangat strategis di bawah lereng Gunung Wilis selain itu, juga didukung keahlian Bupati Maskur yang memiliki latar belakang panjang di dunia Pertanian dan Peternakan.

Pengalaman terhadap sektor tersebut didasari keilmuannya yang ia peroleh selama mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil Program Studi Peternakan dan Perikanan. Setelah lulus menjadi mahasiswa ia mendarma baktikan ilmu yang dimiliki di berbagai jejang pengkaderan birokrasi. Ia pernah memperoleh amanat menjadi kepala seksi pelayanan usaha pengelolaan hasil dan pemasaran tahun 26-05-1997, Kepala balai pembibitan Ternak dan hijauan makanan ternak Karangwaru Tuban 28-05-2001, Kepala sub dinas peternakan 07-4-2005, Kepala bidang Agribisnis pada dinas peternakan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebelum diangkat Menjadi Pjs Bupati Ponorogo. Pengalaman dalam bidang tersebut, membuat ia ahli dalam bidang Peternakan.

Pada saat Bupati Maskur menjabat Bupati Ponorogo, terdapat peristiwa yang menggegerkan dunia maya dan nyata, yakni salah satu pusat perbelanjaan di Ponorogo menggelar tarian senam *aerobic* yang dipandang tidak sesuai dengan norma Islam. Bupati Maskur bersama jajarannya langsung menegur pihak panitia, karena acara tersebut dirasa sangat

menciderai hati masyarakat karena dilakukan di tempat terbuka yang notabene di pusat perbelanjaan yang tentu sangat ramai dan dilihat oleh berbagai kalangan usia. Kepedulian Bupati Maskur terhadap masalah-masalah sosial banyak diapresiasi masyarakat. Maka tidak heran apabila Bupati Maskur meski relatif singkat menjabat Bupati Ponorogo, tetapi meninggalkan kesan baik di hati Masyarakat. setelah tidak menjabat lagi sebagai Bupati Ponorogo ia kembali ke Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelz. (1952). *H.O.S Tjokroaminata: Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Akkheren, Philips Van. (1995). *Dewi Sri dan Kristus*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Dobbin, C. (1994). Accounting for the Failure of the Muslim Javanese Business Class: Examples from Ponorogo and Tulungagung (1880-1940). In: *Archipel Volume 48*, 87-101.
- Kartomi, M. (1976). Performance, Music, and Meaning of Reyog Ponorogo. *Cornel Modern Indonesia Proect*, 85-130.
- Mardjono. (1965). *Silsilah Tegalsari Saking Mojopahit*. Ponorogo
- M.C. Ricklefs. (1991). *Sejarah Indonesia Modern* (terj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moedjiyanto. (1987). *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moelyadi. (1986). *Ungkapan Sejarah Kerajaan Wengker dan Reyog Ponorogo*. Ponorogo: DPC Pemuda Panca Marga.
- Muis, Abdul (1999). Surapati. cet. 11. Jakarta: Balai Pustaka.
- Onghokham. (1975). *The Residency of Madiun: Prijaji and Peasant in the nineteenth Century*. Amerika: Disertasi Doktor Universitas Yale.
- Ponorogo, P. K. (1993). *Pedoman Dasar Kesenian Reyog Ponorogo Dalam Pentas Budaya Bangsa*. Ponorogo: Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- Ponorogo, P. K. (1994). *Mengenal Potensi dan Dinamika Ponorogo Jawa Timur*. Ponorogo: Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- Ponorogo, P. K. (1996). *Hari Jadi Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- Ponorogo, T. P. (1988). *Selintas Perkembangan Muhammadiyah Ponorogo*. Ponorogo: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.
- Purwadi. (2007). *Sejarah Raja-Raja Jawa*. Yogyakarta: Media Ilmu
- Purwowijoyo. (1985). *Babad Ponorogo Jilid I-VII* Ponorogo: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo.

- Shinta, S. d. (2012). Mobilisasi Massa Partai Melalui Seni Pertunjukan Reog di Ponorogo tahun 1950-1980. *Verleden. Vol 1 No 1* , 66.
- Soemarto. (2011). *Melihat Ponorogo Lebih Dekat*. Ponorogo: Apix Offset.
- Sudikan, Setya Yuwana. (2003). *Ponorogo dalam Panggung Sejarah Nasional Tradisi Lisan dan Teks Sastra Sebagai Sumber Informasi Sejarah*. Surabaya: Citra Wacana.
- Sugianto, Alip. (2015). *Eksotika Pariwisata Ponorogo*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Wilson, Ian. (1999) Reog Ponorogo: Spirituality, Sexuality, and Power In Javanese Performance Tradition. *Intersection*, edisi 2 , 146-156

GLOSARIUM

Adipati : sebuah gelar kebangsawanan untuk orang yang menjabat sebagai kepala wilayah.

Bupati : sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten.

Candrasengkala : rumusan tahun dengan kata-kata yang setiap kata melambangkan angka, dibaca dari depan dan ditafsirkan dari belakang: kronogram Jawa yang memakai sistem perhitungan bulan.

Cungkup : bangunan beratap di atas makam sebagai pelindung makam : rumah kubur.

Gebyog : Suara yang titir

Gerdon : tempat istirahat atau sebagai tempat memantau situasi yang berada dipinggir jalan.

Lawe : tali yang digunakan untuk mengikat

Otonomi : kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat.

Paseban : tempat berupa balai yang digunakan untuk menghadap raja, atau bupati.

Reyog : kesenian tradisional yang terdiri dari barongan dan dihiasi bulu merak dengan beberapa unsur pemain seperti *jathil*.

Senering : pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang.

Umaro : pemimpin dalam pemerintahan

Warok : tokoh masyarakat Jawa Ponorogo yang terkenal memiliki linuwih

Wedana : wilayah administrasi pemerintahan yang berada dibawah kabupaten dan di atas kecamatan.

TENTANG PENULIS



Alip Sugiarto adalah staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. ia tertarik mengkaji tentang kebudayaan Ponorogo. Beberapa karyanya dalam bentuk buku antara lain: *Eksotika Pariwisata Ponorogo* (2015), *Bahasa dan Budaya Etnik Jawa Panaragan* (2016), *Ponorogo dalam Cerita* (2017), *Etnolinguistik Teori dan Praktik* (2018), *Sejarah Kesenian Kebo Bule bersama Tim* (2019), *Sejarah Adipati dan Bupati Ponorogo: 1496-2016* (2020). Selain menulis dalam bentuk buku juga aktif menulis dalam berbagai jurnal nasional dan Internasional, serta media massa seperti *Jawa Pos*, *Media Mataraman*, *Ponorogo Pos* dan lainnya.